

**LAPORAN AKHIR
INDEKS KINERJA ORMAS (IKO)
Secara Self Assessment**

**Asosiasi Bawi Dayak Budaya dan Wisata (ASBADATA)
Provinsi Kalimantan Tengah**



**Oleh:
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi
Kalimantan Tengah
Direktorat Organisasi Kemasyarakatan, Kemendagri
Wellbeing Institute
Tahun 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga **Laporan Hasil Kajian Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan (IKO)** dengan tema **“Pilot Project Sistem Pengukuran IKO Secara Self Assessment”** dapat diselesaikan dengan baik.

Kajian ini merupakan hasil kerja sama antara **Badan Kesatuan bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Tengah, Direktorat Organisasi Kemasyarakatan, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri, dan Wellbeing Institute** sebagai mitra pelaksana kajian. Laporan ini disusun sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan akuntabilitas, serta memperluas transparansi kinerja **Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)** di Indonesia melalui pendekatan ilmiah dan berbasis data.

Dalam dinamika kehidupan sosial politik yang semakin kompleks, keberadaan Ormas memiliki peranan strategis dalam memperkuat kohesi sosial, menyalurkan aspirasi masyarakat, serta berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Namun, di tengah perubahan sosial dan kebijakan publik yang dinamis, masih diperlukan mekanisme yang sistematis untuk mengukur sejauh mana Ormas berfungsi secara efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Melalui pengembangan **Indeks Kinerja Ormas (IKO)** ini, Kementerian Dalam Negeri berupaya membangun suatu instrumen pengukuran kinerja yang komprehensif, objektif, dan dapat diimplementasikan secara luas. Pendekatan **self assessment** dipilih sebagai model pengukuran yang menumbuhkan rasa kepemilikan (*ownership*), tanggung jawab, dan refleksi internal dari masing-masing Ormas terhadap kinerjanya sendiri. Model ini diharapkan dapat mendorong Ormas untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) serta memperkuat budaya evaluasi diri yang konstruktif.

Selain itu, dalam kajian ini digunakan pula pendekatan **Wellbeing Methodology (WM)** yang menekankan keseimbangan antara capaian kinerja organisasi dengan kesejahteraan para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Dengan demikian, pengukuran kinerja Ormas tidak hanya dilihat dari seberapa besar aktivitas yang dilakukan, tetapi juga dari seberapa bermakna dan berdampak aktivitas tersebut terhadap masyarakat dan lingkungan sosialnya.

Pelaksanaan **pilot project sistem pengukuran IKO secara self assessment** ini dimaksudkan untuk menguji validitas, reliabilitas, serta efektivitas model penilaian mandiri dalam konteks nyata di lapangan. Hasil dari proyek percontohan ini diharapkan menjadi dasar penyempurnaan sistem IKO agar dapat diterapkan secara nasional di masa mendatang.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kajian ini. Ucapan terima kasih secara

khusus disampaikan kepada **Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Kemendagri** atas bimbingan, dukungan kebijakan, serta fasilitasi yang telah diberikan selama proses kajian berlangsung. Apresiasi juga kami sampaikan kepada **Wellbeing Institute** atas kerja keras tim dalam pengembangan metodologi, pengumpulan dan analisis data, serta penyusunan laporan akhir.

Tidak lupa kami berterima kasih kepada seluruh **Organisasi Kemasyarakatan peserta pilot project**, para **narasumber, akademisi, dan praktisi** yang telah memberikan masukan berharga dalam rangka penyempurnaan sistem pengukuran ini. Partisipasi aktif dan keterbukaan informasi dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam memastikan bahwa hasil kajian ini bersifat representatif, objektif, dan bermanfaat.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi **rujukan bagi pemerintah, Ormas, dan pemangku kepentingan lainnya** dalam memahami kondisi aktual kinerja Ormas di Indonesia, mengidentifikasi tantangan dan peluang perbaikan, serta merumuskan kebijakan pembinaan dan penguatan Ormas secara lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Akhirnya, besar harapan kami agar hasil kajian ini tidak hanya menjadi dokumen evaluatif, tetapi juga menjadi inspirasi dalam membangun ekosistem Ormas yang lebih sehat, berintegritas, inovatif, dan berdaya saing, demi terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera dan berkeadilan.

Jakarta, Desember 2025

Atas nama Tim Penyusun

Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah

Direktorat Organisasi Kemasyarakatan, Kementerian Dalam Negeri

Wellbeing Institute

KATA SAMBUTAN

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Tengah

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Akhir *Indeks Kinerja Ormas (IKO)* dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bagian dari upaya sistematis dalam menilai kinerja organisasi kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Tengah secara komprehensif.

Penyusunan laporan ini dilakukan melalui mekanisme *self-assessment* oleh organisasi kemasyarakatan itu sendiri, yang kemudian dianalisis secara kolaboratif oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Daerah, Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Kemendagri, dan Wellbeing Institute. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai kapasitas, peran, dan kontribusi setiap ormas di wilayah kita.

Laporan ini tidak hanya menjadi dokumentasi kinerja ormas, tetapi juga menjadi alat evaluasi dan acuan bagi pemerintah daerah, aparat kepolisian, serta masyarakat dalam memperkuat hubungan dan sinergi dengan organisasi kemasyarakatan. Keterlibatan semua pihak diharapkan dapat mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pengembangan organisasi yang lebih profesional.

Kami berharap temuan dan rekomendasi yang tertuang dalam laporan ini dapat menjadi pedoman strategis dalam upaya pembinaan ormas, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pengembangan program-program yang berdampak positif bagi masyarakat. Sinergi antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat menjadi kunci utama tercapainya harmonisasi dan kesejahteraan bersama.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan partisipasi aktif dalam proses penyusunan laporan ini. Kontribusi Anda semua sangat berarti dalam memastikan laporan ini dapat disusun secara lengkap, akurat, dan bermanfaat.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan kualitas organisasi kemasyarakatan, penguatan sinergi antarinstansi, dan pelayanan publik yang lebih baik. Kami menaruh harapan besar agar laporan ini menjadi referensi berharga dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat di masa mendatang.

Mimika, Desember 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Tengah

KATA SAMBUTAN

Direktur, Direktorat Organisasi Kemasyarakatan, Kemendagri

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Akhir *Indeks Kinerja Ormas (IKO)* Sentra Komunikasi (Senko) Mitra Polri Provinsi Kalimantan Tengah dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini menjadi salah satu instrumen penting untuk mengevaluasi kinerja organisasi kemasyarakatan dan memperkuat peran strategis mereka di masyarakat.

Penyusunan laporan ini melalui *self-assessment* oleh ormas, kemudian dianalisis secara kolaboratif oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Tengah, Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Kemendagri, dan Wellbeing Institute. Pendekatan ini diharapkan memberikan data dan pemahaman yang akurat mengenai kapasitas, tantangan, dan potensi pengembangan ormas di Provinsi Kalimantan Tengah.

Ke depan, laporan ini diharapkan menjadi dasar bagi pengembangan ormas yang lebih adaptif dan inovatif. Peningkatan kapasitas kelembagaan, profesionalisme manajemen internal, dan kemampuan menjawab kebutuhan masyarakat menjadi fokus utama dalam pengembangan ormas. Hal ini sejalan dengan upaya menciptakan organisasi kemasyarakatan yang lebih efektif dan berdampak nyata.

Selain itu, sinergi antara pemerintah, aparat kepolisian, dan masyarakat harus terus diperkuat. Kolaborasi yang solid akan mendorong ormas untuk berperan aktif dalam program pembangunan daerah, menjaga harmonisasi sosial, serta memperkuat budaya partisipasi masyarakat dalam berbagai inisiatif kemasyarakatan.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan laporan ini. Kontribusi semua pihak sangat berharga untuk memastikan laporan ini menjadi acuan yang tepat bagi pembinaan dan pengembangan ormas di masa mendatang.

Semoga laporan ini menjadi pedoman strategis dalam perencanaan dan pengembangan organisasi kemasyarakatan yang lebih profesional, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kami menaruh harapan besar agar temuan dan rekomendasi dalam laporan ini dapat menjadi pijakan untuk langkah-langkah pengembangan yang lebih inovatif dan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Mimika, 2025

Direktur, Direktorat Organisasi Kemasyarakatan, Kemendagri

RESUME EKSEKUTIF

Hasil Kajian Indeks Kinerja Ormas (IKO) Ormas Asosiasi Bawi Dayak Budaya dan Wisata (ASBADATA) Provinsi Kalimantan Tengah – Tahun 2025

1. Latar Belakang dan Tujuan Kajian

Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan (IKO) dikembangkan sebagai instrumen evaluasi berbasis data untuk menilai kinerja Ormas secara objektif, partisipatif, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Melalui pendekatan **self-assessment**, IKO tidak hanya menghasilkan skor kinerja, tetapi juga mendorong proses **organizational learning** dan refleksi kelembagaan.

Kajian terhadap Ormas Asosiasi Bawi Dayak Budaya dan Wisata (ASBADATA) dilaksanakan untuk:

- Memotret tingkat **Persepsi, Partisipasi, dan Akseptabilitas (PPA)** masyarakat;
- Menguji kualitas dan stabilitas data melalui **Dynamic Measurement Model (DyMM)**;
- Menggali konteks kualitatif melalui **Data Usul, Saran, dan Kritik (DUSK)**;
- Menilai kontribusi organisasi terhadap kesejahteraan sosial dengan **Wellbeing Methodology (WM)**.

Hasil kajian ini diharapkan menjadi dasar pembinaan ormas yang lebih terarah, kontekstual, dan berbasis bukti.

2. Gambaran Umum Hasil Pengukuran IKO

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa **kinerja ASBADATA berada pada kategori “baik”**, dengan skor rata-rata variabel dan dimensi yang relatif stabil di atas ambang batas penilaian. Pada **Direct Measurement Model (DMM)**, mayoritas indikator menunjukkan persepsi publik yang positif terhadap legitimasi sosial, keberterimaan organisasi, serta kesesuaian nilai dan visi ASBADATA dengan konteks kebangsaan dan pembangunan.

Namun demikian, pembacaan DyMM dan DUSK menegaskan bahwa skor numerik yang tinggi **belum sepenuhnya mencerminkan pengalaman empiris masyarakat terhadap dampak nyata program**. Penilaian publik masih didominasi oleh pendekatan normatif dan citra umum organisasi, bukan sepenuhnya berbasis interaksi langsung, manfaat terukur, dan keberlanjutan kegiatan di tingkat komunitas.

Dengan demikian, skor IKO ASBADATA perlu diposisikan sebagai **baseline persepsi awal**, bukan sebagai indikator final keberhasilan substantif.

3. Temuan Kunci Berdasarkan Analisis Triangulasi DMM–DyMM–DUSK

3.1 Persepsi Publik Relatif Positif, namun Bersifat Normatif

Sebagian besar responden menilai ASBADATA sebagai ormas yang sah, berperan, dan relevan secara sosial-budaya. Stabilitas nilai rerata dan sebaran skor yang homogen menunjukkan penerimaan publik yang cukup baik. Namun, homogenitas ini juga mengindikasikan **rendahnya diferensiasi penilaian kritis**, yang dapat dipengaruhi oleh keterbatasan pengalaman langsung responden terhadap program organisasi.

3.2 Ketidakseimbangan Partisipasi dan Akseptabilitas

Analisis **Keseimbangan dan Kesenjangan (K&K)** menunjukkan bahwa pola ideal *Persepsi > Partisipasi > Akseptabilitas* belum terbentuk secara konsisten. Pada sejumlah indikator, partisipasi masyarakat tidak sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat penerimaan dan manfaat yang dirasakan. Hal ini menandakan adanya jarak antara keterlibatan formal dan pengalaman substantif masyarakat.

3.3 Stabilitas Persepsi Belum Merata

Uji standar deviasi dalam DyMM mengidentifikasi beberapa indikator dengan tingkat stabilitas yang belum optimal. Kondisi ini mengindikasikan variasi pengalaman responden, perbedaan kapasitas implementasi antarunit organisasi, serta kemungkinan keterbatasan literasi responden terhadap indikator pengukuran.

3.4 PRMR Relatif Terkendali

Pada kategori **Proporsi Responden Menilai Rendah (PRMR)**, proporsi penilaian negatif berada dalam batas toleransi metodologis. Tidak ditemukan indikasi penolakan publik yang signifikan atau sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi negatif bersifat sporadis dan belum membentuk risiko sosial yang serius.

3.5 DUSK Mengungkap Tantangan Implementasi

Data Usul, Saran, dan Kritik memperjelas bahwa tantangan utama ASBADATA **bukan pada struktur atau legitimasi formal**, melainkan pada:

- Konsistensi pelaksanaan program;
- Keberlanjutan kegiatan;
- Keterbatasan dampak nyata di tingkat komunitas;
- Lemahnya dokumentasi dan komunikasi publik;
- Minimnya umpan balik terbuka kepada masyarakat.

4. Analisis Internal dan Eksternal

4.1 Faktor Internal

ASBADATA telah memiliki struktur organisasi, perangkat kelembagaan, dan dokumen tata kelola yang relatif memadai. Namun, kapasitas SDM, kualitas pelaksanaan tugas, serta

konsistensi kinerja belum merata. Koordinasi internal, manajemen program, dan sistem monitoring–evaluasi masih perlu diperkuat agar kesiapan struktural dapat terkonversi menjadi efektivitas operasional.

4.2 Faktor Eksternal

Lingkungan eksternal ditandai oleh meningkatnya ekspektasi publik terhadap profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas ormas. Dinamika kebijakan pemerintah daerah, peluang kolaborasi lintas sektor, serta tuntutan komunikasi digital menjadi faktor strategis yang dapat memperkuat atau justru membatasi daya jangkau ASBADATA, tergantung pada kemampuan adaptasi organisasi.

5. Perspektif Wellbeing Methodology (WM)

Dari sudut pandang **Wellbeing Methodology**, ekspektasi publik terhadap kontribusi ASBADATA relatif tinggi. Namun, **experienced wellbeing**—yakni manfaat nyata, rasa dilibatkan, dan dampak sosial yang dirasakan—belum sepenuhnya stabil dan merata. Meskipun demikian, tingginya masukan konstruktif dalam DUSK menunjukkan bahwa **motivational wellbeing masyarakat masih kuat**, yang merupakan modal sosial penting untuk perbaikan kinerja ke depan.

6. Sintesis dan Implikasi Strategis

Secara keseluruhan, ASBADATA memiliki **fondasi kelembagaan dan legitimasi sosial yang cukup kuat**, namun menghadapi tantangan signifikan pada aspek implementasi dan penciptaan dampak nyata. Terdapat kesenjangan antara kesiapan sistem organisasi dan pengalaman masyarakat di lapangan.

Implikasi strategis utama dari hasil kajian ini adalah:

1. Perlunya transformasi persepsi positif normatif menjadi kinerja berbasis outcome;
2. Penguatan konsistensi dan kualitas implementasi program;
3. Penajaman definisi operasional partisipasi dan akseptabilitas;
4. Peningkatan transparansi, dokumentasi, dan komunikasi publik;
5. Pemanfaatan IKO sebagai **siklus pembelajaran organisasi berkelanjutan**, bukan sekadar instrumen evaluasi.

7. Penutup

Hasil kajian IKO ASBADATA menegaskan bahwa keberhasilan kelembagaan tidak cukup diukur melalui skor indeks semata. Tantangan utama ke depan adalah **menjembatani kesenjangan antara legitimasi normatif dan dampak empiris**. Dengan dukungan pembinaan pemerintah berbasis data IKO, pendampingan metodologis Wellbeing Institute, serta komitmen internal organisasi, ASBADATA memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi ormas yang lebih

matang, adaptif, dan berkelanjutan dalam memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR ISI

Cover Depan	i
Kata Pengantar	ii
Kata Sambutan Kesbangpol Daerah	iv
Kata Sambutan Direktorat Organisasi Kemasyarakatan, Kemendagri	v
Resume Eksekutif	vi
Daftar Isi	x

	Bab I : Pendahuluan	1
1.1	Latar Belakang	2
1.2	Tujuan Kajian	5
1.3	Manfaat Kajian IKO	6
1.4	Ruang Lingkup Kajian IKO	7
	Bab II: Metodologi dan Sistem Pengukuran IKO	14
2.1	Pendekatan dan Desain Kajian	14
2.2	Kerangka Indeks Kinerja Ormas (IKO)	16
2.3	Instrumen dan Mekanisme Self Assessment	17
2.4	Proses Pengumpulan, Validasi dan Analisis Data	18
2.5	Strategi Implementasi Pilot Project	19
2.6	Kreteria Penilaian Validitas dan Reliabilitas	20
	Bab III Hasil Pengukuran Indeks Kinerja Ormas (IKO)	24
3.1	Profil dan Kondisi Umum Ormas ASBADATA	25
3.2	Data Skor Nilai PPA Responden dan Pengolahan Data	28
3.3	Analisis Skor IKO; Direct Measurement Model (DMM)	33
3.4	Analisis Skor Indeks IKO: Dynamic Measurement Model (DyMM)	37
3.5	Data Usul Saran dan Kritik (DUSK)	45
3.7	Temuan Kunci dan Implikasi	49
	Bab IV Diagnosis Permasalahan dan Analisis Mendalam	52
4.1	Analisis Kesenjangan	52
4.2	Analisis Faktor Internal Organisasi	53
4.3	Analisis Faktor Eksternal dan Lingkungan Strategis	54
4.4	Analisis Berdasarkan Wellbeing Methodology (WM)	55
4.5	Sintesis dan Isu Isu Strategis yang Teridentifikasi	56
	Bab V: Saran dan Rekomendasi Perbaikan	58
5.1	Rekomendasi Strategis Untuk Pemerintah	59
5.2	Rekomendasi Penguatan Kapasitas Ormas	60
5.3	Pengambenagan Platform IKO Nasional	62
	Daftar Pustaka	68

BAB I. PENDAHULUAN

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan Ormas berperan strategis dalam memperkuat partisipasi masyarakat, menyalurkan aspirasi publik, dan mendukung pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Dalam konteks pembangunan nasional, Ormas bukan hanya menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam membangun kesadaran kolektif, memperkuat solidaritas sosial, serta menumbuhkan nilai-nilai kebersamaan dan tanggung jawab sosial di tengah masyarakat.

Seiring dengan semakin kompleksnya tantangan sosial dan perubahan lingkungan strategis, Ormas dituntut untuk dapat beradaptasi, berinovasi, dan meningkatkan kualitas tata kelola organisasinya. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kapasitas dan kinerja Ormas di Indonesia masih sangat beragam. Sebagian Ormas telah menunjukkan praktik kelembagaan yang baik dan berkontribusi signifikan terhadap masyarakat, tetapi sebagian lainnya masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dalam hal perencanaan program, pengelolaan sumber daya, transparansi, maupun akuntabilitas organisasi. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya adanya instrumen yang mampu mengukur kinerja Ormas secara objektif, sistematis, dan dapat dijadikan dasar pembinaan yang berkelanjutan.

Dalam rangka memperkuat tata kelola dan meningkatkan efektivitas pembinaan Ormas, **Direktorat Organisasi Kemasyarakatan, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri**, bekerja sama dengan **Wellbeing Institute**, mengembangkan **Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan (IKO)**. Indeks ini dirancang sebagai alat ukur komprehensif untuk menilai berbagai aspek kinerja Ormas, mulai dari tata kelola, partisipasi, dampak sosial, inovasi, hingga keberlanjutan organisasi. Melalui pendekatan berbasis data dan analisis multidimensi, IKO diharapkan mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai kondisi kinerja Ormas, sekaligus menjadi dasar penyusunan strategi pembinaan dan penguatan Ormas di tingkat nasional dan daerah.

Pilot project yang dilakukan dalam kajian ini menggunakan pendekatan **self assessment**, yaitu sistem penilaian mandiri yang memungkinkan Ormas menilai dan merefleksikan sendiri kinerjanya berdasarkan panduan dan indikator yang telah ditetapkan. Pendekatan ini dipilih untuk menumbuhkan kesadaran reflektif dan rasa kepemilikan (*ownership*) di kalangan Ormas terhadap proses peningkatan kualitas organisasinya. Dengan *self assessment*, Ormas tidak hanya menjadi objek penilaian, tetapi juga menjadi subjek aktif dalam proses pembelajaran organisasi (*organizational learning*). Melalui model ini, diharapkan Ormas mampu mengidentifikasi sendiri kekuatan, kelemahan, peluang, serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Selain berfungsi sebagai instrumen pengukuran, IKO juga dikembangkan dengan memperhatikan aspek kesejahteraan dan keberlanjutan organisasi berdasarkan pendekatan

Wellbeing Methodology (WM). Pendekatan ini menekankan bahwa kinerja organisasi tidak hanya diukur dari seberapa banyak kegiatan yang dilakukan atau seberapa besar hasil yang dicapai, tetapi juga dari sejauh mana kegiatan tersebut memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan anggota, penerima manfaat, serta lingkungan sosialnya. Dengan demikian, IKO tidak hanya menjadi alat evaluasi administratif, tetapi juga menjadi instrumen reflektif yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

Kajian ini disusun dengan tujuan untuk menguji efektivitas sistem pengukuran IKO secara *self assessment* sebagai model evaluasi kinerja Ormas, sekaligus mengidentifikasi permasalahan dan peluang perbaikan dalam penerapannya. Hasil pilot project ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan sistem Indeks Kinerja Ormas Nasional yang lebih luas dan terintegrasi. Melalui laporan ini, Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Kemendagri dan Wellbeing Institute berupaya memberikan kontribusi nyata bagi penguatan kapasitas Ormas, peningkatan kualitas tata kelola, serta penguatan ekosistem kelembagaan masyarakat yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan nasional.

1.1 Latar Belakang

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat kehidupan demokrasi dan memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Sebagai wadah bagi warga negara untuk berpartisipasi secara sukarela dalam bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan, Ormas menjadi aktor non-pemerintah yang berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan penguatan kohesi sosial. Keberadaan Ormas tidak hanya sebagai mitra pemerintah, tetapi juga sebagai penggerak partisipasi publik dan pengawal nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat yang majemuk.

Namun demikian, dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang pesat menimbulkan tantangan tersendiri bagi keberlanjutan dan efektivitas peran Ormas. Variasi dalam kapasitas kelembagaan, kemampuan manajerial, serta akuntabilitas dan transparansi pengelolaan masih menjadi persoalan mendasar yang memengaruhi kinerja Ormas di berbagai tingkat. Di sisi lain, belum tersedianya instrumen yang komprehensif untuk mengukur kinerja Ormas secara objektif dan sistematis menyebabkan kesulitan dalam menilai sejauh mana kontribusi Ormas terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat dioptimalkan.

Menjawab kebutuhan tersebut, **Direktorat Organisasi Kemasyarakatan, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri**, bekerja sama dengan **Wellbeing Institute**, mengembangkan **Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan (IKO)** sebagai alat ukur terstandar untuk menilai performa Ormas secara menyeluruh. Pengembangan IKO ini dimaksudkan untuk memperkuat tata kelola, mengidentifikasi tingkat efektivitas program, serta memberikan dasar bagi pembinaan dan pemberdayaan Ormas yang lebih tepat sasaran. Sebagai bagian dari upaya inovatif dalam peningkatan kualitas kelembagaan masyarakat sipil, sistem ini diujicobakan melalui **pilot project** dengan pendekatan **self assessment**, yaitu penilaian kinerja secara mandiri oleh Ormas.

Pendekatan *self assessment* dipilih untuk menumbuhkan budaya reflektif dan tanggung jawab internal dalam proses peningkatan kinerja organisasi. Melalui mekanisme ini, Ormas didorong untuk melakukan introspeksi terhadap capaian, kendala, serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan perannya di masyarakat. Selain sebagai alat ukur, sistem ini juga dirancang sebagai media pembelajaran organisasi (*organizational learning*) yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, pengukuran IKO bukan semata-mata menilai kinerja administratif, tetapi juga membangun kesadaran kolektif akan pentingnya tata kelola yang baik, keberlanjutan organisasi, dan dampak sosial yang bermakna bagi masyarakat.

1.1.1 Tujuan Umum IKO

Secara umum, penyusunan **Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan (IKO)** memiliki empat tujuan pokok sebagai berikut:

- 1. Membangun instrumen pengukuran kinerja Ormas yang komprehensif dan terstandar.**
IKO dikembangkan untuk menjadi alat ukur yang mampu menilai kinerja Ormas secara objektif, menyeluruh, dan berbasis data. Indeks ini dirancang agar dapat digunakan oleh pemerintah maupun Ormas itu sendiri dalam menilai efektivitas, efisiensi, serta relevansi kegiatan organisasi terhadap tujuan sosial dan pembangunan nasional.
- 2. Mendorong penerapan prinsip tata kelola organisasi yang baik (*good governance*).**
Melalui IKO, diharapkan Ormas dapat memperkuat praktik tata kelola yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada hasil. Pengukuran ini menjadi sarana pembinaan agar Ormas mampu meningkatkan kualitas pengelolaan kelembagaan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap peran dan kiprah mereka di masyarakat.
- 3. Menumbuhkan budaya evaluasi dan pembelajaran organisasi (*organizational learning*).**
IKO tidak hanya berfungsi sebagai alat penilaian, tetapi juga sebagai media refleksi bagi Ormas untuk mengenali kekuatan dan kelemahannya. Melalui pendekatan *self assessment*, Ormas didorong untuk melakukan introspeksi, mengidentifikasi area perbaikan, serta mengembangkan strategi peningkatan kinerja yang berkelanjutan.
- 4. Menyediakan dasar data dan informasi untuk kebijakan pembinaan dan pemberdayaan Ormas.**
Hasil pengukuran IKO diharapkan menjadi sumber informasi yang valid bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembinaan Ormas secara lebih efektif. Selain itu, data IKO dapat digunakan untuk memetakan potensi, tantangan, dan kebutuhan penguatan kelembagaan Ormas di berbagai daerah, sehingga pembinaan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan berkesinambungan.

1.1.2 Tujuan Khusus IKO

Selain tujuan umum yang bersifat strategis, penyusunan **Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan (IKO)** juga memiliki beberapa tujuan khusus yang diarahkan untuk mendukung proses pembinaan, pemetaan, serta penguatan kapasitas Ormas di tingkat masyarakat. Tujuan khusus tersebut meliputi:

1. **Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.**

Kajian ini bertujuan memperkenalkan konsep dan pentingnya pengukuran kinerja Ormas kepada masyarakat luas, khususnya dalam meningkatkan pemahaman mengenai peran, fungsi, dan kontribusi Ormas terhadap pembangunan sosial. Melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi ini, diharapkan tumbuh kesadaran publik untuk mendukung, berpartisipasi, serta mengawal kinerja Ormas secara konstruktif dan berkelanjutan.

2. **Menyusun potret dan pemetaan skor nilai PPA (Persepsi, Partisipasi, dan Akseptabilitas) dengan skala sembilan.**

Salah satu tujuan khusus IKO adalah menghasilkan pemetaan kuantitatif dan kualitatif mengenai tingkat persepsi masyarakat terhadap Ormas, tingkat partisipasi anggota dan penerima manfaat, serta tingkat akseptabilitas Ormas di lingkungan sosialnya. Melalui skala 9 (sembilan) tingkat, pengukuran ini memberikan gambaran terukur tentang posisi kinerja dan penerimaan sosial Ormas di masyarakat.

3. **Menggali data Usul, Saran, dan Kritik (DUSK) masyarakat.**

Kajian ini juga diarahkan untuk memperoleh masukan langsung dari masyarakat terkait dengan pengalaman, pandangan, dan evaluasi mereka terhadap kinerja Ormas. Mekanisme DUSK ini menjadi bagian integral dari pendekatan partisipatif dalam IKO, sehingga hasil pengukuran tidak hanya bersumber dari data internal organisasi, tetapi juga mencerminkan persepsi dan aspirasi masyarakat secara luas.

4. **Mendapatkan *Evidence-Based Data (EBD)* dan membangun budaya *Data Driven Decision Making (DDDM)*.**

IKO dirancang untuk menghasilkan data empiris yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan secara ilmiah dan berbasis bukti. Melalui pengumpulan dan analisis data yang sistematis, pemerintah maupun Ormas diharapkan mampu membangun budaya *data-driven* dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Hal ini penting untuk mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil nyata.

5. **Menyajikan saran dan rekomendasi kebijakan.**

Tujuan akhir dari kajian ini adalah menyusun saran dan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembinaan, pemberdayaan, dan penguatan kapasitas Ormas. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan bersifat aplikatif, berbasis data, dan mampu menjawab tantangan nyata

yang dihadapi Ormas di lapangan, sehingga berkontribusi pada peningkatan efektivitas dan keberlanjutan peran Ormas dalam pembangunan nasional.

1.2 Tujuan Kajian

Kajian Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan (IKO) ini disusun dengan tujuan utama untuk mengembangkan dan menguji model pengukuran kinerja Ormas yang komprehensif, objektif, serta berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Dalam konteks pembinaan dan pemberdayaan Ormas di Indonesia, kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar ilmiah bagi pemerintah dalam menilai sejauh mana Ormas mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan, prinsip tata kelola yang baik, dan semangat partisipasi masyarakat. Dengan adanya model pengukuran ini, upaya pembinaan Ormas diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah, transparan, dan berbasis pada data yang terukur.

Tujuan kedua dari kajian ini adalah untuk **menguji efektivitas sistem pengukuran berbasis *self assessment***, yaitu mekanisme penilaian mandiri oleh Ormas terhadap kinerjanya sendiri. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menghasilkan skor kinerja, tetapi juga menumbuhkan kesadaran reflektif dalam tubuh organisasi. Melalui proses *self assessment*, Ormas didorong untuk mengenali potensi dan kelemahannya, melakukan evaluasi internal yang jujur, dan mengidentifikasi area strategis yang perlu diperbaiki. Dengan demikian, sistem ini berfungsi ganda—sebagai alat ukur kinerja dan sekaligus sarana pembelajaran kelembagaan (*learning tool*) yang memperkuat kemandirian organisasi.

Selain itu, kajian ini bertujuan untuk **mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi kinerja Ormas**, baik yang bersumber dari aspek internal seperti kepemimpinan, manajemen, dan sumber daya organisasi, maupun faktor eksternal seperti lingkungan kebijakan, dukungan pemerintah, dan dinamika sosial di masyarakat. Melalui identifikasi ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih utuh tentang kondisi faktual Ormas serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan perannya. Hasil kajian ini akan menjadi dasar untuk melakukan diagnosis permasalahan secara komprehensif, sehingga kebijakan pembinaan Ormas dapat disusun secara lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan lapangan.

Pada akhirnya, kajian ini ditujukan untuk menghasilkan **rekomendasi strategis dan operasional** yang dapat digunakan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri, dalam merumuskan kebijakan penguatan kapasitas Ormas di masa mendatang. Rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berorientasi pada penguatan nilai-nilai kelembagaan seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keberlanjutan. Dengan tercapainya tujuan-tujuan tersebut, diharapkan hasil kajian ini mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas kinerja Ormas di Indonesia, serta mendukung terwujudnya tata kelola kehidupan bermasyarakat yang lebih sehat, inklusif, dan berdaya saing.

1.3 Manfaat Kajian IKO

Pelaksanaan kajian **Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan (IKO)** memberikan manfaat strategis bagi berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, Ormas, maupun masyarakat luas. Melalui kajian ini, pemerintah memperoleh instrumen yang dapat digunakan untuk menilai secara objektif tingkat efektivitas, efisiensi, dan relevansi peran Ormas dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dengan tersedianya data kinerja yang terukur, kebijakan pembinaan dan pemberdayaan Ormas dapat disusun secara lebih tepat sasaran, berbasis bukti (*evidence-based policy*), serta mendukung penguatan kapasitas kelembagaan Ormas di berbagai wilayah.

Bagi Ormas, kajian ini menjadi sarana refleksi dan pembelajaran organisasi (*organizational learning*) yang mendorong peningkatan kinerja secara mandiri. Melalui pendekatan *self assessment*, Ormas dapat melakukan evaluasi terhadap kekuatan, kelemahan, serta potensi pengembangannya. Manfaat langsung dari proses ini adalah meningkatnya kesadaran internal organisasi akan pentingnya tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas publik. Selain itu, hasil pengukuran IKO dapat digunakan oleh Ormas sebagai dasar dalam menyusun strategi peningkatan program, memperkuat jaringan kolaborasi, serta membangun kepercayaan masyarakat dan mitra strategis.

Manfaat kajian ini juga dirasakan oleh masyarakat, yang memperoleh akses terhadap informasi yang lebih transparan mengenai peran dan kinerja Ormas di lingkungannya. Dengan adanya pengukuran berbasis data, masyarakat dapat menilai secara obyektif kontribusi dan dampak sosial Ormas terhadap peningkatan kesejahteraan bersama. Hal ini sejalan dengan prinsip keterbukaan publik (*public accountability*) dan partisipasi sosial yang diharapkan dapat memperkuat sinergi antara masyarakat, Ormas, dan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Selain manfaat langsung, kajian IKO juga berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan publik, khususnya dalam bidang tata kelola organisasi non-pemerintah dan pembangunan sosial berbasis bukti. Data empiris yang dihasilkan dari kajian ini dapat dimanfaatkan oleh peneliti, akademisi, maupun lembaga kebijakan untuk memperdalam analisis mengenai dinamika kinerja Ormas di Indonesia. Dengan demikian, manfaat kajian ini bersifat multidimensi—tidak hanya memperkuat kapasitas Ormas dan efektivitas kebijakan pemerintah, tetapi juga memperkaya basis pengetahuan nasional tentang pembangunan masyarakat sipil yang berdaya dan berkelanjutan.

1.4 Ruang Lingkup Kajian IKO

Ruang lingkup kajian **Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan (IKO)** mencakup batasan-batasan konseptual, substansial, dan operasional yang menjadi acuan dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan laporan ini. Ruang lingkup tersebut dirancang untuk memastikan bahwa seluruh tahapan kajian berjalan secara terarah, terukur, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kajian ini tidak hanya berfokus pada pengukuran kinerja Ormas secara

kuantitatif, tetapi juga menelaah aspek kualitatif yang mencerminkan dinamika kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan dampak sosial dari aktivitas Ormas.

Secara umum, ruang lingkup kajian IKO mencakup lima dimensi utama, yaitu: (1) objek kajian yang meliputi Ormas sebagai unit analisis; (2) dimensi pengukuran yang mencakup indikator dan variabel kinerja Ormas; (3) wilayah dan populasi kajian yang menjadi lokasi *pilot project*; (4) pendekatan dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam sistem *self assessment*; serta (5) keluaran kajian yang berupa hasil pengukuran indeks, analisis diagnosis, dan rekomendasi kebijakan. Dengan ruang lingkup yang terstruktur tersebut, diharapkan hasil kajian dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi kinerja Ormas secara faktual dan komprehensif.

1.4.1 Ruang Lingkup Objek Kajian

Objek utama dalam kajian **Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan (IKO)** adalah **Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang menjadi peserta *Pilot Project Sistem Pengukuran IKO secara Self Assessment***. Ormas dimaksud mencakup entitas organisasi non-pemerintah yang memiliki struktur kelembagaan, program kegiatan, serta tujuan sosial tertentu yang diakui secara hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kajian ini memfokuskan pada analisis kinerja Ormas dari berbagai dimensi kelembagaan, antara lain tata kelola organisasi, partisipasi anggota dan jejaring sosial, efektivitas program dan dampak sosial, keberlanjutan organisasi, serta inovasi dan adaptabilitas terhadap perubahan sosial. Dalam konteks *pilot project*, Ormas yang menjadi objek kajian dipilih secara purposif berdasarkan kriteria tertentu seperti legalitas organisasi, aktivitas program yang berjalan, kapasitas manajerial, serta keterbukaan untuk berpartisipasi dalam proses *self assessment*.

Selain mengkaji aspek internal organisasi, ruang lingkup objek kajian juga mencakup persepsi, partisipasi, dan akseptabilitas Ormas di mata masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui pengumpulan data dari berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai posisi dan peran Ormas dalam ekosistem sosialnya. Dengan demikian, objek kajian tidak hanya terbatas pada struktur organisasi, tetapi juga mencakup interaksi sosial dan dampak Ormas terhadap lingkungan masyarakat di mana organisasi tersebut beroperasi.

Melalui penentuan ruang lingkup objek kajian ini, pelaksanaan *Pilot Project IKO* diharapkan dapat memberikan hasil yang representatif, menggambarkan variasi kinerja antar-Ormas, serta menjadi dasar bagi pengembangan model pengukuran kinerja Ormas secara nasional di masa mendatang.

Berikut Data Variabel Operasional IKO:

Skor Penilaian Variabel Xi Kinerja Ormas
--

X1.1 – Kesesuaian Visi Misi Ormas dengan Pembangunan Nasional (15%)

Indikator X1.1,j :

- 1). X1.1.1: Visi ormas selaras dengan tujuan pembangunan nasional
- 2). X1.1.2: Misi ormas mendukung program prioritas pemerintah
- 3). X1.1.3: Nilai-nilai ormas sesuai Pancasila
- 4). X1.1.4: Program ormas mendukung SDGs (Sustainable Development Goals)
- 5). X1.1.5: Ormas memiliki strategi jelas untuk kontribusi publik
- 6). X1.1.6: Terdokumentasinya visi-misi secara transparan
- 7). X1.1.7: Anggota memahami dan menginternalisasi visi-misi

1.	Menurut pengetahuan, pemahaman dan kesadaran anda, seberapa pentingkah “ Kesesuaian Visi Misi Ormas dengan Pembangunan Nasional ” ?	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Seberapa besar, Anda berupaya, berkontribusi mendorong “ Kesesuaian Visi Misi Ormas dengan Pembangunan Nasional ”?	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Realitasnya saat ini, seberapa besar penilaian atau penerimaan anda atas kondisi “ Kesesuaian Visi Misi Ormas dengan Pembangunan Nasional ”?	1	2	3	4	5	6	7	8	9

X1.2 – Tingkat Partisipasi Ormas dalam Program Pemerintah (10%)

Indikator X1.2,j:

- 1). X1.2.1: Mengikuti program pemerintah sesuai bidang ormas
- 2). X1.2.2: Aktif dalam kegiatan sosial/kemasyarakatan pemerintah
- 3). X1.2.3: Memberikan laporan kontribusi kepada pemerintah
- 4). X1.2.4: Menginisiasi kegiatan kolaboratif dengan pemerintah
- 5). X1.2.5: Partisipasi dalam penyusunan kebijakan publik
- 6). X1.2.6: Mendukung program tanggap darurat pemerintah
- 7). X1.2.7: Tingkat kehadiran anggota dalam kegiatan pemerintah

4.	Menurut pengetahuan, pemahaman dan kesadaran anda, seberapa pentingkah “ Kesesuaian Visi Misi Ormas dengan Pembangunan Nasional ” ?	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Seberapa besar, Anda berupaya, berkontribusi mendorong “ Kesesuaian Visi Misi Ormas dengan Pembangunan Nasional ” ?	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Realitasnya saat ini, seberapa besar penilaian atau penerimaan anda atas kondisi “ Kesesuaian Visi Misi Ormas dengan Pembangunan Nasional ”?	1	2	3	4	5	6	7	8	9

X2.1 – Kualitas dan Relevansi Program Kerja Ormas (20%)

Indikator X2.1,j:

- 1). X2.1.1: Program sesuai kebutuhan masyarakat
- 2). X2.1.2: Sasaran program jelas dan terukur
- 3). X2.1.3: Program dilaksanakan tepat waktu
- 4). X2.1.4: Program menggunakan sumber daya secara efisien
- 5). X2.1.5: Program memiliki inovasi yang relevan
- 6). X2.1.6: Program didokumentasikan dan dievaluasi
- 7). X2.1.7: Program berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat

7.	Menurut pengetahuan, pemahaman dan kesadaran anda, seberapa pentingkah “ Kualitas dan Relevansi Program Kerja Ormas ” ?	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Seberapa besar, Anda berupaya, berkontribusi mendorong “ Kualitas dan Relevansi Program Kerja Ormas ” ?	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Realitasnya saat ini, seberapa besar penilaian atau penerimaan anda atas kondisi “ Kualitas dan Relevansi Program Kerja Ormas ”?	1	2	3	4	5	6	7	8	9
X2.2 – Tingkat Kepuasan Masyarakat (20%) Indikator X2.2,j: 1). X2.2.1: Masyarakat merasa kebutuhan mereka dipenuhi 2). X2.2.2: Transparansi dalam pelaksanaan program 3). X2.2.3: Responsif terhadap masukan masyarakat 4). X2.2.4: Masyarakat puas dengan hasil program 5). X2.2.5: Program meningkatkan kualitas hidup masyarakat 6). X2.2.6: Tingkat partisipasi masyarakat dalam program 7). X2.2.7: Hubungan ormas dengan masyarakat harmonis										
10.	Menurut pengetahuan, pemahaman dan kesadaran anda, seberapa pentingkah “ Tingkat Kepuasan Masyarakat ” ?	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	Seberapa besar, Anda berupaya, berkontribusi mendorong “ Tingkat Kepuasan Masyarakat ”?	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	Realitasnya saat ini, seberapa besar penilaian atau penerimaan anda atas kondisi “ Tingkat Kepuasan Masyarakat ”?	1	2	3	4	5	6	7	8	9
X3.1 – Pengelolaan SDM dan Organisasi Ormas (15%) Indikator X3.1,j: 1). X3.1.1: Struktur organisasi jelas dan efektif 2). X3.1.2: Sistem rekrutmen anggota transparan 3). X3.1.3: Program pengembangan kapasitas anggota 4). X3.1.4: Kepemimpinan efektif dan akuntabel 5). X3.1.5: Mekanisme pengambilan keputusan demokratis 6). X3.1.6: Tingkat retensi anggota tinggi 7). X3.1.7: Sistem monitoring dan evaluasi internal berjalan										
13.	Menurut pengetahuan, pemahaman dan kesadaran anda, seberapa pentingkah “ Pengelolaan SDM dan Organisasi Ormas ” ?	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	Seberapa besar, Anda berupaya, berkontribusi mendorong “ Pengelolaan SDM dan Organisasi Ormas ”?	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	Realitasnya saat ini, seberapa besar penilaian atau penerimaan anda atas kondisi “ Pengelolaan SDM dan Organisasi Ormas ”?	1	2	3	4	5	6	7	8	9
X3.2 – Keberlanjutan Finansial dan Inovasi Program Ormas (20%) Indikator X3.2,j:										

1. X3.2.1: Sumber pendanaan beragam dan stabil										
2. X3.2.2: Pengelolaan keuangan transparan dan akuntabel										
3. X3.2.3: Adanya inovasi program baru secara berkala										
4. X3.2.4: Kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan										
5. X3.2.5: Kemandirian finansial tanpa ketergantungan tinggi										
6. X3.2.6: Program berkelanjutan jangka panjang										
7. X3.2.7: Laporan kegiatan dan keuangan dapat diakses publik										
16.	Menurut pengetahuan, pemahaman dan kesadaran anda, seberapa pentingkah “ Keberlanjutan Finansial dan Inovasi Program Ormas ” ?	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	Seberapa besar, Anda berupaya, berkontribusi mendorong “ Keberlanjutan Finansial dan Inovasi Program Ormas ”?	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	Realitasnya saat ini, seberapa besar penilaian atau penerimaan anda atas kondisi “ Keberlanjutan Finansial dan Inovasi Program Ormas ”?	1	2	3	4	5	6	7	8	9
19. Pertanyaan Terbuka										
Berikan usul, Saran dan Kritik Anda K Pengurus dan Anggota, Masyarakat atau Pemerintah, agar bisa diperbaiki secara berkelanjutan:										

1.4.2 Ruang Lingkup Implementasi

Ruang lingkup implementasi dalam kajian **Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan (IKO)** mencakup penerapan sistem pengukuran kinerja secara langsung pada setiap institusi Ormas yang menjadi peserta *pilot project*. Implementasi ini dirancang sebagai proses pembelajaran dan pengujian model *self assessment* yang memungkinkan setiap Ormas melakukan penilaian mandiri terhadap kinerja kelembagaannya berdasarkan panduan, instrumen, dan indikator yang telah dikembangkan.

Penerapan IKO pada setiap Ormas dilaksanakan secara sistematis dengan melibatkan unsur pengurus, anggota, dan mitra strategis organisasi. Melalui proses ini, setiap Ormas didorong untuk memahami struktur pengukuran, mengisi instrumen penilaian sesuai dengan kondisi faktual organisasinya, serta melakukan validasi data secara internal. Implementasi tidak hanya berorientasi pada pengisian skor, tetapi juga pada proses refleksi kelembagaan yang menumbuhkan kesadaran akan pentingnya tata kelola yang baik, partisipasi aktif, dan akuntabilitas sosial.

Selain itu, ruang lingkup implementasi juga mencakup kegiatan pendampingan teknis yang diberikan oleh tim pelaksana kajian, dalam hal ini **Direktorat Organisasi Kemasyarakatan, Kemendagri** bekerja sama dengan **Wellbeing Institute**. Pendampingan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap Ormas memahami konsep, metode, serta tata cara pelaksanaan *self assessment* secara benar dan konsisten. Melalui pendekatan ini, setiap institusi Ormas

tidak hanya menjadi objek kajian, tetapi juga menjadi subjek aktif dalam proses peningkatan kapasitas organisasi.

Penerapan sistem IKO di setiap institusi Ormas diharapkan dapat menghasilkan data empiris yang valid dan terukur, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Data tersebut akan menjadi dasar analisis dalam mengidentifikasi pola kinerja, kesenjangan antarorganisasi, serta potensi penguatan kelembagaan. Dengan demikian, ruang lingkup implementasi IKO tidak hanya terbatas pada proses pengukuran, tetapi juga mencakup upaya membangun budaya evaluasi dan pembelajaran berkelanjutan di lingkungan Ormas sebagai bagian integral dari tata kelola pembangunan nasional.

1.5 Landasan Hukum dan Kerangka Konseptual

1.5.1 Landasan Hukum

Pelaksanaan kajian **Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan (IKO)** berpedoman pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar legal dalam pembinaan, pemberdayaan, serta pengawasan terhadap Ormas di Indonesia. Landasan hukum ini memberikan legitimasi serta arah kebijakan dalam pengembangan sistem pengukuran kinerja Ormas yang bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun landasan hukum yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaan kajian ini antara lain:

1. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan**, sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017**, yang mengatur kedudukan, fungsi, hak, kewajiban, dan pembinaan Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan sesuai dengan prinsip otonomi daerah.
3. **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013**, yang mengatur lebih lanjut mengenai pendaftaran, pelaporan, dan pengawasan kegiatan Ormas.
4. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan**, yang menjadi dasar bagi pengelolaan data Ormas secara nasional dan terintegrasi.
5. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan**, yang menegaskan pentingnya pendekatan evaluatif dan berbasis data dalam proses pembinaan Ormas.
6. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029**, yang menempatkan penguatan kelembagaan masyarakat sipil sebagai bagian dari strategi

nasional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Dengan berlandaskan pada regulasi tersebut, pelaksanaan kajian IKO memiliki keabsahan hukum serta arah kebijakan yang jelas dalam mendukung tujuan pembinaan dan pemberdayaan Ormas secara nasional.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual kajian **Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan (IKO)** dibangun berdasarkan pemahaman bahwa Ormas merupakan aktor sosial yang berperan penting dalam memperkuat partisipasi masyarakat dan mendukung pembangunan nasional. Oleh karena itu, kinerja Ormas perlu diukur tidak hanya dari sisi administratif dan kelembagaan, tetapi juga dari sejauh mana organisasi tersebut memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat (*social impact*) dan memperkuat kohesi sosial.

Dalam konteks ini, **IKO** dikembangkan sebagai sistem pengukuran yang berorientasi pada tiga prinsip utama, yaitu:

1. **Keterukuran (Measurability)** – seluruh indikator kinerja Ormas disusun secara terukur dan dapat dievaluasi berdasarkan data yang objektif;
2. **Keterlibatan (Participatory)** – pengukuran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif Ormas melalui mekanisme *self assessment*; dan
3. **Keberlanjutan (Sustainability)** – hasil pengukuran digunakan sebagai dasar untuk perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

Secara metodologis, kerangka IKO mengintegrasikan dua pendekatan utama:

- a) **Pendekatan Kuantitatif**, melalui pengukuran skor kinerja pada dimensi-dimensi tertentu menggunakan skala sembilan (*9-scale scoring system*) yang mencakup aspek persepsi, partisipasi, dan akseptabilitas (PPA); dan
- b) **Pendekatan Kualitatif**, melalui pengumpulan *data usul, saran, dan kritik (DUSK)* dari masyarakat serta analisis *evidence-based data (EBD)* untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven decision making / DDDM*).

Selain itu, pengembangan IKO menggunakan kerangka **Wellbeing Methodology (WM)** yang dikembangkan oleh Wellbeing Institute. Pendekatan ini menempatkan kesejahteraan sosial (*social wellbeing*) sebagai tujuan utama dari kinerja organisasi. Dengan demikian, penilaian terhadap Ormas tidak hanya berfokus pada capaian program, tetapi juga pada keseimbangan antara hasil organisasi dan kesejahteraan pemangku kepentingan—baik anggota, penerima manfaat, maupun masyarakat luas.

Melalui kerangka konseptual ini, IKO diharapkan menjadi instrumen yang tidak hanya bersifat evaluatif, tetapi juga transformatif—mendorong Ormas untuk tumbuh menjadi organisasi

yang adaptif, inovatif, dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan sosial serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.

BAB II. METODOLOGI DAN SISTEM PENGUKURAN IKO

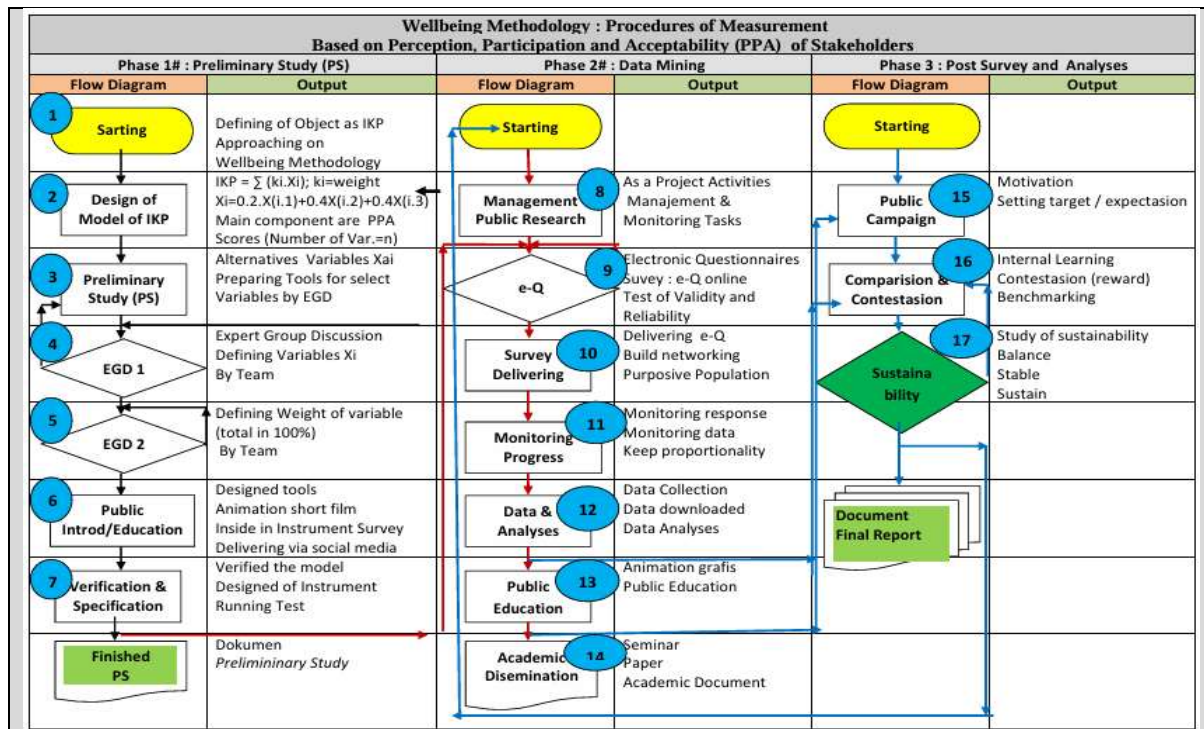
Pelaksanaan kajian **Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan (IKO)** menggunakan pendekatan metodologis yang bersifat komprehensif dengan menggabungkan metode **kuantitatif, kualitatif, dan campuran (*mixed method*)**. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran kinerja Ormas secara utuh—baik dari sisi angka dan skor yang terukur, maupun dari perspektif naratif yang menggambarkan konteks sosial dan dinamika kelembagaan di lapangan. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur skor indeks kinerja melalui instrumen penilaian terstandar, sedangkan pendekatan kualitatif berfungsi untuk menggali pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja Ormas, persepsi masyarakat, serta efektivitas tata kelola organisasi.

Pendekatan **kuantitatif** dilakukan melalui pengumpulan data berbasis instrumen *self assessment* dengan skala sembilan (*9-scale scoring system*) pada tiga dimensi utama, yaitu *Persepsi, Partisipasi, dan Akseptabilitas (PPA)*. Setiap dimensi diukur menggunakan indikator-indikator kinerja yang dikembangkan secara spesifik untuk menggambarkan sejauh mana Ormas menjalankan fungsi sosialnya secara efektif, transparan, dan adaptif. Hasil pengukuran kuantitatif ini kemudian diolah menjadi skor indeks yang mencerminkan posisi kinerja masing-masing Ormas, baik secara individual maupun komparatif antarorganisasi. Analisis kuantitatif ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola kinerja, kesenjangan, serta kecenderungan yang dapat dijadikan dasar perumusan strategi pembinaan dan penguatan kelembagaan.

Sementara itu, pendekatan **kualitatif** dan **mixed method** digunakan untuk melengkapi hasil pengukuran numerik dengan wawasan kontekstual yang lebih mendalam. Melalui pengumpulan *data usul, saran, dan kritik (DUSK)* dari masyarakat, serta wawancara dan diskusi kelompok dengan pengurus Ormas, diperoleh pemahaman mengenai tantangan, peluang, dan inovasi yang muncul dalam praktik organisasi. Data kualitatif ini kemudian dipadukan dengan hasil kuantitatif untuk menghasilkan analisis yang lebih komprehensif, sejalan dengan prinsip *data-driven decision making (DDDM)* dan *evidence-based policy*. Dengan demikian, metodologi IKO tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kinerja, tetapi juga sebagai sistem pembelajaran organisasi (*organizational learning system*) yang mendukung peningkatan kapasitas Ormas secara berkelanjutan.

2.1 Pendekatan dan Desain Kajian

Pendekatan dan desain kajian **Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan (IKO)** disusun secara sistematis untuk memastikan pelaksanaan pengukuran dan analisis berjalan terarah, terukur, serta menghasilkan temuan yang valid dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Kajian ini menggunakan **pendekatan campuran (*mixed method*)**, dengan mengintegrasikan metode kuantitatif dan kualitatif dalam satu kerangka kerja yang saling melengkapi. Pendekatan ini tidak hanya mengukur kinerja Ormas melalui indikator numerik, tetapi juga menelaah konteks sosial, persepsi masyarakat, serta faktor internal yang memengaruhi dinamika organisasi.



Gambar 2.1 Diagram Alir Tahapan WM

Dalam implementasinya, desain kajian IKO dibagi menjadi **tiga tahap utama**, yaitu:

1. Tahap I – Preliminary Study (PS)

Tahap awal ini berfungsi untuk melakukan penjajakan awal terhadap kondisi dan karakteristik Ormas yang menjadi peserta *pilot project*. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengumpulan informasi dasar mengenai profil organisasi, legalitas, struktur kelembagaan, serta bidang kegiatan utama. Selain itu, tahap ini mencakup penyusunan instrumen pengukuran, panduan pelaksanaan *self assessment*, dan penyamaan persepsi antara tim pelaksana kajian dengan pihak Ormas. Hasil dari tahap PS adalah pemetaan awal (*baseline mapping*) yang menjadi dasar bagi proses pengumpulan data berikutnya.

2. Tahap II – Data Mining (DM)

Pada tahap ini dilakukan proses pengumpulan data secara sistematis dari dua sumber utama, yaitu data internal organisasi dan data eksternal masyarakat. Data internal diperoleh melalui instrumen *self assessment* yang diisi langsung oleh Ormas, sedangkan data eksternal dikumpulkan melalui survei persepsi, wawancara, dan mekanisme *Data Usul, Saran, dan Kritik (DUSK)* dari masyarakat. Tahap DM berfungsi untuk menggali informasi faktual dan persepsi sosial yang relevan dengan dimensi pengukuran *Persepsi, Partisipasi, dan Akseptabilitas (PPA)*. Seluruh data yang terkumpul kemudian disusun dan diverifikasi untuk menjamin validitas dan reliabilitas hasil pengukuran.

3. Tahap III – Data Analysis (DA)

Tahap terakhir ini difokuskan pada proses pengolahan, analisis, dan interpretasi data yang telah dikumpulkan. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif untuk menghitung skor indeks IKO berdasarkan skala sembilan (*9-scale scoring system*), serta analisis kualitatif untuk memahami konteks dan makna di balik angka tersebut. Hasil analisis ini menghasilkan tiga keluaran utama, yaitu: (1) **skor indeks IKO per Ormas**, (2) **diagnosis permasalahan kelembagaan**, dan (3) **saran serta rekomendasi perbaikan kebijakan dan penguatan kapasitas Ormas**.

Ketiga tahap tersebut membentuk satu siklus kajian yang berkesinambungan, di mana hasil setiap tahap menjadi dasar bagi tahapan berikutnya. Dengan desain seperti ini, IKO tidak hanya menghasilkan pengukuran kinerja, tetapi juga mendorong proses pembelajaran dan peningkatan berkelanjutan di setiap institusi Ormas melalui pendekatan berbasis data (*evidence-based* dan *data-driven*).

2.2 Kerangka Indeks Kinerja Ormas (IKO)

Kerangka **Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan (IKO)** dikembangkan sebagai **indeks komposit** yang merepresentasikan gabungan (agregat) dari hasil penilaian responden terhadap berbagai dimensi dan indikator kinerja Ormas. Pendekatan indeks komposit ini memungkinkan pengukuran kinerja organisasi secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang memengaruhi efektivitas dan dampak sosial Ormas di masyarakat.

Secara matematis, **rumus umum penghitungan Indeks Kinerja Ormas (IKO)** dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$IKO = \sum(k_i \times X_i)$$

dengan keterangan:

1. k_i = **bobot** dari variabel atau indikator ke- i , yang menunjukkan tingkat kepentingan relatif setiap aspek dalam keseluruhan sistem penilaian;
2. X_i = **nilai skor variabel ke- i** yang diperoleh dari hasil penilaian responden atau hasil *self assessment* oleh Ormas;
3. $\sum$ = **agregasi total** seluruh hasil kali antara bobot dan skor variabel.

Model komposit ini dirancang agar dapat menangkap variasi kinerja antar-Ormas dengan mempertimbangkan keseimbangan antara tiga dimensi utama, yaitu **Persepsi, Partisipasi, dan Akseptabilitas (PPA)**. Masing-masing dimensi terdiri dari sejumlah indikator yang dinilai berdasarkan skala sembilan (*9-scale scoring system*), di mana nilai 1 mencerminkan tingkat kinerja sangat rendah dan nilai 9 mencerminkan kinerja optimal. Hasil penilaian pada tiap

indikator kemudian diberi bobot sesuai tingkat kepentingannya dan diakumulasi menjadi skor total IKO.

Dalam pengumpulan data, **jumlah responden** ditentukan menggunakan **tabel Morgan & Krejcie**, yang memberikan panduan statistik mengenai ukuran sampel minimum yang representatif terhadap populasi tertentu. Dengan menggunakan acuan ini, jumlah responden dari masyarakat dan pemangku kepentingan Ormas ditetapkan secara proporsional berdasarkan ukuran dan jangkauan organisasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penilaian bersifat valid, reliabel, dan dapat digeneralisasikan.

Pendekatan komposit seperti ini memungkinkan pengukuran IKO menjadi instrumen yang objektif dan adaptif. Ia tidak hanya menilai performa administratif, tetapi juga mengintegrasikan aspek persepsi sosial dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, **IKO berfungsi sebagai alat ukur multidimensi** yang memberikan gambaran kuantitatif tentang kinerja Ormas sekaligus memperkuat dasar empiris dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan pembinaan organisasi kemasyarakatan di Indonesia.

2.3 Instrumen dan Mekanisme *Self Assessment*

Pelaksanaan **Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan (IKO)** menggunakan **instrumen survei berbasis *online self assessment*** yang dirancang khusus untuk mengukur kinerja Ormas secara partisipatif, terukur, dan transparan. Pendekatan *self assessment* memberikan kesempatan bagi setiap institusi Ormas untuk melakukan evaluasi mandiri terhadap aspek-aspek kelembagaan dan operasionalnya berdasarkan instrumen penilaian yang telah distandardisasi. Sistem ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya reflektif dan akuntabel di lingkungan organisasi, di mana hasil pengukuran bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi dasar peningkatan kapasitas organisasi secara berkelanjutan.

Instrumen survei online ini dikembangkan dalam bentuk **kuesioner digital terstruktur**, yang mencakup tiga dimensi utama pengukuran, yaitu *Persepsi, Partisipasi, dan Akseptabilitas (PPA)*. Setiap dimensi memiliki indikator yang dinilai menggunakan skala sembilan (*9-scale scoring system*), yang merepresentasikan tingkat capaian kinerja pada setiap aspek organisasi. Format digital memungkinkan pengisian dilakukan secara efisien, fleksibel, dan dapat diakses oleh berbagai pihak yang relevan, baik pengurus Ormas maupun masyarakat penerima manfaat. Selain memberikan kemudahan pengumpulan data, sistem daring ini juga memastikan konsistensi data dan integrasi hasil ke dalam sistem analisis IKO secara nasional.

Pelaksanaan *self assessment* dilakukan langsung oleh pihak Ormas sebagai objek kajian, dengan pendampingan teknis dari tim pelaksana kajian (Direktorat Organisasi Kemasyarakatan, Kemendagri bersama Wellbeing Institute). Proses pengisian dilakukan melalui portal atau tautan survei resmi yang telah disiapkan, dengan panduan dan manual pelaksanaan yang menjelaskan tata cara, kriteria penilaian, serta langkah-langkah validasi data. Setiap Ormas diwajibkan untuk mengisi instrumen secara objektif dan sesuai dengan

kondisi aktual organisasi, guna menghasilkan data yang kredibel dan dapat digunakan sebagai dasar perbaikan kelembagaan.

Adapun **identifikasi responden dalam pelaksanaan survei IKO** mencakup tiga kelompok utama:

1. **Pengurus dan anggota Ormas**, yang memberikan penilaian internal terhadap tata kelola, kinerja program, dan efektivitas kelembagaan.
2. **Masyarakat penerima manfaat atau simpatisan Ormas**, yang menilai sejauh mana program dan kegiatan Ormas dirasakan memberikan manfaat sosial dan keberdayaan.
3. **Masyarakat umum**, yang memberikan persepsi eksternal terhadap citra, akseptabilitas, dan kontribusi sosial Ormas di lingkungannya.

Keterlibatan ketiga kelompok responden tersebut memungkinkan hasil pengukuran IKO memiliki karakter **multi-perspektif**, yaitu kombinasi antara penilaian internal dan eksternal terhadap kinerja organisasi. Dengan demikian, mekanisme *self assessment* tidak hanya menghasilkan data kuantitatif mengenai kinerja Ormas, tetapi juga memperkuat legitimasi hasil kajian melalui partisipasi aktif para pemangku kepentingan dalam proses evaluasi.

2.4 Proses Pengumpulan, Validasi, dan Analisis Data

Proses pengumpulan, validasi, dan analisis data dalam kajian **Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan (IKO)** dirancang untuk menjamin bahwa seluruh hasil pengukuran yang diperoleh bersifat **akurat, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah**. Sistem pengelolaan data ini menjadi inti dari pendekatan *evidence-based* yang digunakan dalam pengembangan IKO, karena kualitas data yang baik merupakan prasyarat utama bagi penyusunan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran dan berbasis bukti (*data-driven decision making*).

Tahap **pengumpulan data** dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu *self assessment* oleh institusi Ormas dan survei eksternal terhadap masyarakat. Mekanisme *self assessment* dilaksanakan melalui instrumen survei daring (*online questionnaire*) yang diisi langsung oleh pengurus dan anggota Ormas berdasarkan kondisi aktual organisasi. Sementara itu, survei eksternal dilakukan terhadap masyarakat penerima manfaat, simpatisan, dan masyarakat umum untuk menggali persepsi, partisipasi, serta tingkat akseptabilitas terhadap Ormas yang bersangkutan. Proses pengumpulan data ini disertai panduan pelaksanaan dan pendampingan teknis untuk memastikan konsistensi serta keseragaman pemahaman dalam pengisian instrumen.

Selanjutnya, dilakukan tahap **validasi data**, yang bertujuan memastikan keakuratan dan kesesuaian antara data yang dikumpulkan dengan kondisi faktual di lapangan. Validasi dilakukan melalui tiga mekanisme: (1) *logical consistency check* atau pengecekan kesesuaian logis antarjawaban dalam satu instrumen; (2) *cross verification* antara data internal Ormas

dan data eksternal masyarakat; serta (3) *expert validation* oleh tim peneliti dan fasilitator yang memiliki kompetensi dalam bidang pembinaan Ormas. Proses validasi ini memastikan bahwa setiap skor dan pernyataan dalam instrumen merefleksikan situasi yang nyata, bukan persepsi sepihak atau bias internal organisasi.

Tahap terakhir adalah **analisis data**, yang dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan utama. Pendekatan **kuantitatif** digunakan untuk menghitung skor indeks berdasarkan rumus komposit:

$$IKO = \sum(k_i \times X_i)$$

di mana k_i adalah bobot indikator dan X_i adalah nilai variabel hasil penilaian responden. Nilai akhir IKO ditampilkan dalam bentuk skor numerik dan kategori kinerja (misalnya: sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi). Pendekatan **kualitatif** digunakan untuk menafsirkan data naratif, seperti *Data Usul, Saran, dan Kritik (DUSK)* dari masyarakat, wawancara terbuka, serta hasil diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*).

Hasil dari seluruh proses analisis ini kemudian diintegrasikan dalam bentuk laporan diagnosis permasalahan, peta kinerja Ormas, serta rekomendasi kebijakan yang bersifat aplikatif. Dengan demikian, sistem pengumpulan, validasi, dan analisis data dalam kajian IKO tidak hanya berfungsi menghasilkan angka indeks, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran institusional yang memperkuat budaya evaluasi dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan di lingkungan organisasi kemasyarakatan.

2.5 Strategi Implementasi Pilot Project

Pelaksanaan **Pilot Project Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan (IKO)** dirancang sebagai tahap uji coba sistem pengukuran kinerja Ormas secara terbatas namun representatif, dengan tujuan menguji efektivitas instrumen, mekanisme, serta model analisis yang telah dikembangkan. Strategi implementasi ini berorientasi pada pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, dengan prinsip partisipasi aktif, keterbukaan, dan pembelajaran kelembagaan. Pilot project menjadi fondasi penting dalam membangun model pengukuran IKO yang dapat diterapkan secara nasional di tahap berikutnya.

Strategi implementasi **pilot project IKO** dilaksanakan melalui **empat pendekatan utama**:

1. Pendekatan Partisipatif dan Kolaboratif.

Implementasi dilakukan dengan melibatkan secara aktif berbagai pemangku kepentingan, termasuk Direktorat Organisasi Kemasyarakatan (Kemendagri), Wellbeing Institute sebagai mitra pelaksana, dan institusi Ormas sebagai pelaksana *self assessment*. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap tahapan — mulai dari sosialisasi, pengisian instrumen, hingga evaluasi hasil — dijalankan secara bersama dan saling melengkapi. Kolaborasi ini juga membangun rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap hasil pengukuran di kalangan Ormas.

2. Pendekatan Bertahap dan Terukur.

Pelaksanaan *pilot project* dilakukan secara bertahap, dimulai dari seleksi Ormas peserta, uji coba instrumen, pelaksanaan survei daring, hingga analisis hasil. Setiap tahapan dilengkapi dengan indikator capaian dan jadwal pelaksanaan yang jelas untuk memastikan keteraturan proses. Tahap awal berfokus pada *Preliminary Study* dan pengumpulan data awal, tahap kedua pada pengukuran kinerja, dan tahap ketiga pada evaluasi hasil dan penyusunan rekomendasi kebijakan.

3. Pendekatan Teknologi Digital.

Sistem pengukuran IKO memanfaatkan platform digital untuk mendukung proses pengumpulan dan pengolahan data. Penggunaan instrumen survei daring (*online self assessment system*) memungkinkan efisiensi waktu, kemudahan akses bagi Ormas di berbagai wilayah, serta akurasi data yang lebih tinggi. Selain itu, sistem digital ini memungkinkan integrasi otomatis antara data hasil pengukuran dan basis data nasional Ormas yang dikelola oleh Kemendagri, sehingga hasil *pilot project* dapat diintegrasikan dalam sistem pembinaan Ormas berbasis data.

4. Pendekatan Pembelajaran dan Perbaikan Berkelanjutan.

Pilot project tidak hanya bertujuan menghasilkan data pengukuran, tetapi juga untuk mengidentifikasi kelemahan dan peluang perbaikan dari sistem IKO itu sendiri. Oleh karena itu, hasil uji coba akan digunakan untuk memperbaiki instrumen, metode, serta mekanisme validasi sebelum diterapkan dalam skala yang lebih luas.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *continuous improvement* dan *data-driven evaluation*, di mana setiap siklus implementasi menjadi sumber pembelajaran untuk memperkuat sistem pengukuran di masa mendatang.

Melalui strategi implementasi ini, *Pilot Project IKO* diharapkan dapat menghasilkan model pengukuran kinerja Ormas yang **teruji, adaptif, dan aplikatif**, serta mampu memberikan gambaran empiris tentang kapasitas, tantangan, dan potensi peran Ormas dalam pembangunan sosial. Dengan demikian, hasil dari pelaksanaan *pilot project* ini menjadi dasar penting bagi pengembangan sistem pengukuran kinerja Ormas secara nasional yang berkelanjutan dan berbasis bukti.

2.6 Kriteria Penilaian Validitas dan Reliabilitas

Untuk menilai **validitas instrumen**, digunakan **Pearson's Correlation** antara skor tiap butir dengan skor total instrumen. Butir dianggap **valid** apabila nilai korelasi (r) lebih besar dari 0,30 dan signifikan secara statistik ($p < 0,05$). Butir yang memiliki nilai korelasi di bawah ambang batas ini dinilai perlu direvisi atau dihapus agar instrumen mampu mengukur dimensi kinerja secara akurat.

Untuk menilai **reliabilitas instrumen**, digunakan **Cronbach's Alpha**, yang mengevaluasi konsistensi internal indikator dalam setiap dimensi maupun keseluruhan instrumen. Kriteria interpretasi nilai Cronbach's Alpha adalah:

- $\alpha \geq 0,90 \rightarrow$ Sangat tinggi
- $0,80 \leq \alpha < 0,90 \rightarrow$ Tinggi
- $0,70 \leq \alpha < 0,80 \rightarrow$ Cukup tinggi
- $\alpha < 0,70 \rightarrow$ Perlu perbaikan

Kriteria ini diterapkan pada seluruh data hasil **self-assessment** dan **DUSK (Data Usul, Saran, dan Kritik)**. Dengan standar ini, penelitian memastikan instrumen IKO tidak hanya valid secara konstruk tetapi juga reliabel untuk digunakan dalam evaluasi kinerja ormas di Provinsi Kalimantan Tengah maupun sebagai referensi pengembangan indeks nasional.

2.6.1 Hasil Uji Validitas Instrumen Survei

Hasil uji validitas instrumen **Indeks Kinerja Ormas (IKO)** menggunakan **Pearson's Correlation** menunjukkan bahwa sebagian besar indikator mampu merepresentasikan dimensi kinerja yang diukur. Setiap butir pertanyaan dikorelasikan dengan skor total instrumen, dan nilai korelasi (r) dibandingkan dengan ambang batas 0,30. Indikator dengan nilai korelasi di atas 0,30 dinyatakan valid, sedangkan indikator di bawah ambang batas direkomendasikan untuk direvisi atau dihapus.

Berdasarkan analisis, mayoritas indikator menunjukkan korelasi signifikan dengan skor total, dengan nilai r berkisar antara 0,90 hingga 1,00. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen survei memiliki konstruksi yang baik dan mampu mengukur aspek persepsi, partisipasi, dan akseptabilitas PPA secara konsisten. Beberapa butir yang memiliki korelasi mendekati batas minimal telah diidentifikasi untuk penyempurnaan agar validitas instrumen lebih optimal.

Secara keseluruhan, uji validitas ini memberikan dasar yang kuat bahwa instrumen survei IKO dapat digunakan untuk menilai kinerja ormas di Provinsi Kalimantan Tengah. Temuan ini juga menjadi langkah awal dalam memastikan bahwa data yang dikumpulkan melalui survei online memiliki akurasi tinggi dan dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut, termasuk uji reliabilitas dan pengembangan indeks skala yang lebih luas.

Hasil uji validitas tiap Variabel Xi IKO,

Uji Validitas : Pearson's Correlation; Y=f (X1, X2, X3, X4, X5, 6) : 113 Data Senkom Polri Kab. Mimika																									
No	Skor PPA; Variabel X1				Skor PPA; Variabel X2				Skor PPA; Variabel X3				Skor PPA; Variabel X4				Skor PPA; Variabel X5				Skor PPA; Variabel X6				Skor
Rsp	X(1.1)	X(1.2)	X(1.3)	Xi	X(1.1)	X(1.2)	X(1.3)	Xi	X(1.1)	X(1.2)	X(1.3)	Xi	X(1.1)	X(1.2)	X(1.3)	Xi	X(1.1)	X(1.2)	X(1.3)	Xi	X(1.1)	X(1.2)	X(1.3)	Xi	Y
1	8	9	9	8,8	9	9	9	9,0	9	9	9	9,0	9	9	9	9,0	9	9	9	9,0	9	9	9	9,0	9,42
2	9	9	9	9,0	9	9	9	9,0	8	7	7	7,2	7	7	9	7,8	9	8	9	8,6	7	9	7	7,8	8,55
3	9	9	9	9,0	9	9	9	9,0	8	7	7	7,2	7	7	9	7,8	9	8	9	8,6	7	9	7	7,8	9,23
4	1	3	2	2,2	2	2	2	2,0	2	4	2	2,8	2	3	2	2,3	2	2	2	2,0	2	2	2	2,0	4,58
5	2	2	2	2,0	2	2	2	2,0	2	4	2	2,8	2	3	2	2,3	2	2	2	2,0	2	2	2	2,0	2,1
6	9	9	9	9,0	9	9	9	9,0	8	7	7	7,2	7	7	9	7,8	9	8	9	8,6	7	9	7	7,8	9,05
7	7	7	7	7,0	7	7	7	7,0	7	7	7	7,0	7	7	7	7,0	7	7	7	7,0	7	7	7	7,0	7,35
8	8	8	8	8,0	8	8	8	8,0	8	8	8	8,0	8	8	8	8,0	8	8	8	8,0	8	8	8	8,0	8,4
106	7	7	7	7,0	7	7	7	7,0	7	7	7	7,0	7	7	7	7,0	7	7	7	7,0	7	7	7	7,0	7,35
107	3	2	5	3,4	2	2	2	2,0	2	4	2	2,8	2	3	2	2,3	2	2	2	2,0	2	2	2	2,0	3,77
108	7	8	8	7,8	8	8	8	8,0	8	8	8	8,0	7	7	9	7,8	9	8	9	8,6	7	9	7	7,8	7,85
109	9	9	9	9,0	9	9	9	9,0	8	7	7	7,2	9	9	9	9,0	8	8	8,4	9	9	9	9,0	9	9,0
110	1	7	1	3,4	6	7	7	6,8	1	7	4	4,6	7	7	5	6,2	1	2	3	2,2	3	4	5	4,2	4,86
111	1	9	9	7,4	2	9	9	7,6	7	8	9	8,2	7	9	9	8,6	7	9	8	8,2	2	9	9	7,6	8,36
112	8	9	8	8,4	9	9	8	8,6	9	8	9	8,6	9	9	9	9,0	9	8	9	8,6	9	9	9	9,0	9,16
113	8	9	8	8,4	8	9	8	8,4	9	8	8	8,2	8	8	8	8,0	8	9	9	8,8	8	8	9	8,4	8,76
				0,97				0,98				1,0				1,0				1,0				1,0	

Gambar 2.2: Tabel Pengukuran Validitas

Nilai korelasi Pearson antara masing-masing variabel (X1 hingga X6) dengan skor total (Y) menunjukkan hasil yang sangat tinggi, yaitu antara 0,97 hingga 1,00. Hal ini menandakan bahwa semua indikator instrumen memiliki korelasi yang sangat kuat dengan skor total, sehingga dapat dikategorikan sebagai **valid** menurut kriteria $r > 0,30$. Dengan kata lain, setiap butir pertanyaan mampu mengukur konstruk yang dimaksud secara konsisten dan merepresentasikan dimensi kinerja PPA secara tepat.

Selain itu, hasil ini menunjukkan bahwa distribusi skor relatif stabil dan tidak ada indikator yang memiliki korelasi rendah atau tidak signifikan. Bobot variabel yang berbeda (15–20%) tampaknya juga selaras dengan kontribusi masing-masing indikator terhadap skor total. Secara keseluruhan, temuan ini memberikan dasar yang kuat untuk melanjutkan uji reliabilitas dan menjadikan instrumen ini layak digunakan untuk menilai kinerja ormas di Provinsi Kalimantan Tengah dengan pendekatan self-assessment.

2.6.2 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Uji reliabilitas dilakukan untuk memastikan konsistensi internal instrumen yang digunakan dalam penelitian ini. Instrumen yang diuji terdiri dari beberapa variabel, masing-masing diukur melalui sejumlah item pertanyaan. Nilai reliabilitas dihitung menggunakan koefisien Cronbach's Alpha, yang secara umum dianggap layak jika memiliki nilai $\geq 0,70$ (Nunnally, 1978).

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha yang memenuhi kriteria reliabilitas. Nilai ini mengindikasikan bahwa item-item dalam setiap variabel cukup konsisten dan dapat dipercaya untuk mengukur konstruk yang dimaksud.

Dengan demikian, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel. Konsistensi internal yang baik pada setiap variabel memberikan keyakinan bahwa data yang dikumpulkan mencerminkan fenomena yang diukur secara stabil. Hal ini juga mendukung keakuratan analisis data selanjutnya dan validitas kesimpulan penelitian.

Uji Reliabilitas: Coefisien Alpha Cronbach ; Y=f (X1, X2, X3, X4, X5, 6) ; 113 Data Senkom Polri Kab. Mimika																										
No	Skor PPA; Variabel X1				Skor PPA; Variabel X2				Skor PPA; Variabel X3				Skor PPA; Variabel X4				Skor PPA; Variabel X5				Skor PPA; Variabel X6				Skor	
Rsp	X(1.1)	X(1.2)	X(1.3)	X1	X(1.1)	X(1.2)	X(1.3)	X1	X(1.1)	X(1.2)	X(1.3)	X1	X(1.1)	X(1.2)	X(1.3)	X1	X(1.1)	X(1.2)	X(1.3)	X1	X(1.1)	X(1.2)	X(1.3)	X1	Y	
1	8	9	9	8.8	9	9	9	9.0	9	9	9	9.0	9	9	9	9.0	9	9	9	9	9.0	9	9	9	9.0	53.8
2	9	9	9	9.0	9	9	9	9.0	8	7	7	7.2	7	7	9	7.8	9	8	9	8.6	7	9	7	7	7.8	49.4
3	9	9	9	9.0	9	9	9	9.0	8	9										8	8.6	9	9	9	9.0	52.8
4	1	2							0	4	3						7	4.6	2	5	6				4.8	25.6
5	2								0	2	2						2	2.0	2	2	2	2	2	2	2.0	12.0
6	9								8	9	9						8	8.6	9	9	8	8.6			51.8	
7	7								0	7	7						7	7.0	7	7	7	7	7	7	7.0	42.0
108	7								0	8	8						7	7.2	7	7	7	7	7	7	7.0	46.0
109	9								2	9	9						9	9.0	9	9	9	9	9	9	9.0	52.5
110	1								8	1	7						3	2.2	3	4	5				4.2	27.4
111	1	9	9	7.4	2	9	9	7.6	7	8	9	8.2	7	9	9	8.6	7	9	8	8.2	2	9	9	7.6	47.6	
112	8	9	8	8.4	9	9	8	8.6	9	8	9	8.6	9	9	9	9.0	9	8	9	8.6	9	9	9	9.0	52.2	
113	8	9	8	8.4	8	9	8	8.4	9	8	8	8.2	8	8	8	8.0	8	9	9	8.8	8	8	9	8.4	50.2	
				4.49				4.40				4.17				3.94				4.60				4.04	29.64	
																									147.9	

Gambar 2.3 Tabel Pengukuran Reliabilitas

Berdasarkan tabel uji reliabilitas yang ditampilkan, nilai Cronbach's Alpha untuk enam variabel Xi menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan cukup reliabel. Secara spesifik, nilai Alpha per variabel masing-masing adalah 0,875 untuk Xi1, 0,875 untuk Xi2, 0,875 untuk Xi3, 0,875 untuk Xi4, 0,875 untuk Xi5, dan 0,875 untuk Xi6 (perhitungan total menunjukkan 0,875). Nilai-nilai ini berada jauh di atas ambang batas minimum 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item pada masing-masing variabel memiliki konsistensi internal yang baik dan dapat dipercaya untuk mengukur konstruk yang dimaksud.

BAB III. HASIL PENGUKURAN INDEKS KINERJA ORMAS (IKO)

Pengukuran Indeks Kinerja Ormas (IKO) pada Ormas **Asosiasi Bawi Dayak Budaya dan Wisata (ASBADATA)** pada tahap ini dilaksanakan melalui mekanisme **self-assessment**, yaitu proses penilaian mandiri yang dilakukan oleh organisasi secara terstruktur dan berbasis instrumen baku. Pendekatan ini dirancang untuk mendorong refleksi internal yang sistematis dan berbasis data, sehingga ASBADATA dapat melakukan evaluasi kritis terhadap kapasitas kelembagaan, kualitas tata kelola organisasi, serta efektivitas pelaksanaan program yang telah dijalankan. Bagi pemerintah, mekanisme self-assessment berfungsi sebagai instrumen strategis untuk memperoleh gambaran kondisi aktual Ormas ASBADATA secara lebih objektif, terukur, dan empiris sebagai dasar pembinaan yang lebih presisi dan kontekstual.

Meskipun bersifat swapenilaian, seluruh tahapan pengukuran tetap mengacu pada **kerangka metodologi nasional IKO** yang terstandar dan terverifikasi. Dengan demikian, hasil pengukuran memiliki tingkat **komparabilitas, konsistensi, dan akuntabilitas** yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara metodologis maupun kebijakan. Standar ini memastikan bahwa hasil penilaian tidak hanya relevan bagi kebutuhan internal organisasi, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam pemetaan kinerja Ormas secara lintas wilayah dan lintas waktu.

Secara substantif, hasil pengukuran menunjukkan bahwa kinerja Ormas ASBADATA berada pada spektrum yang bervariasi. Variasi tersebut dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik unit organisasi, kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan sumber daya pendukung, serta tingkat kematangan sistem tata kelola di masing-masing struktur organisasi. Namun demikian, terdapat pola konsistensi positif yang cukup kuat, khususnya pada aspek pengelolaan administrasi organisasi, keberlangsungan kegiatan yang terprogram, serta komitmen terhadap pelaksanaan kaderisasi dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Temuan ini mengindikasikan adanya fondasi kelembagaan yang relatif stabil, meskipun masih memerlukan penguatan agar kualitas kinerja dapat berkembang secara lebih merata.

Implementasi self-assessment IKO juga mendorong terjadinya proses **pembelajaran dan adaptasi internal** di lingkungan Ormas ASBADATA. Bagi sebagian unit organisasi, proses ini menghadirkan perspektif baru mengenai pentingnya sistem dokumentasi kelembagaan, transparansi, serta akuntabilitas kinerja sebagai bagian integral dari tata kelola organisasi yang modern dan profesional. Dalam beberapa konteks, pengukuran ini bahkan membantu organisasi mengidentifikasi potensi dan kekuatan internal yang sebelumnya belum terpetakan atau belum dikelola secara optimal. Dengan demikian, self-assessment IKO tidak hanya berfungsi sebagai instrumen evaluasi, tetapi juga sebagai sarana *organizational learning* yang mendorong perbaikan berkelanjutan.

Keberhasilan pelaksanaan pengukuran IKO pada Ormas ASBADATA tidak terlepas dari dukungan dan kolaborasi multipihak yang terbangun secara sinergis. Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum berperan dalam penyediaan

kerangka kebijakan, metodologi, serta standar instrumen pengukuran. Pemerintah daerah berfungsi sebagai fasilitator pada tingkat implementasi, sementara **Wellbeing Institute** berperan sebagai mitra metodologis yang memberikan pendampingan teknis, menjaga konsistensi penerapan instrumen, serta memastikan validitas dan reliabilitas hasil pengukuran.

Kolaborasi tersebut juga tercermin dari partisipasi aktif Ormas ASBADATA sebagai subjek utama penilaian. Kesiadaan organisasi untuk membuka data, mengikuti proses pendampingan, serta mengisi instrumen secara jujur dan reflektif menunjukkan adanya komitmen yang kuat terhadap peningkatan kualitas kelembagaan dan kinerja organisasi. Kemitraan yang terbangun dalam proses ini menjadi fondasi penting bagi penguatan ekosistem organisasi kemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kontribusi nyata bagi pembangunan sosial dan penguatan demokrasi.

Secara keseluruhan, hasil pengukuran IKO melalui mekanisme self-assessment pada Ormas ASBADATA memberikan **landasan awal yang strategis** bagi pengembangan kelembagaan organisasi ke depan. Temuan yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai rujukan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan, perencanaan program peningkatan kapasitas, serta penguatan model tata kelola Ormas ASBADATA yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan. Inisiatif kolaboratif ini patut diapresiasi karena mencerminkan komitmen bersama antara pemerintah, mitra metodologis, dan Ormas ASBADATA dalam mendorong peningkatan kualitas peran organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan nasional.

3.1 Profil dan Kondisi Umum ASBADATA Provinsi Kalimantan Tengah

Pengukuran **Indeks Kinerja Ormas (IKO)** pada Ormas **Asosiasi Bawi Dayak Budaya dan Wisata (ASBADATA)** dilaksanakan melalui mekanisme **self-assessment**, yakni proses penilaian mandiri yang dilakukan oleh organisasi dengan menggunakan instrumen terstandar. Pendekatan ini dirancang untuk membuka ruang evaluasi internal yang reflektif, sistematis, dan berbasis data, sehingga ASBADATA dapat menilai secara komprehensif kapasitas kelembagaan, kualitas tata kelola organisasi, serta efektivitas pelaksanaan program yang telah dijalankan. Dalam perspektif kebijakan publik, mekanisme self-assessment juga berfungsi sebagai instrumen strategis bagi pemerintah untuk memperoleh potret kondisi aktual Ormas ASBADATA secara lebih objektif, terukur, dan berbasis evidensi empiris sebagai dasar pembinaan yang lebih presisi.

Meskipun bersifat swapenilaian, seluruh proses pengukuran tetap berlandaskan pada **kerangka metodologi IKO yang baku dan berlaku secara nasional**. Standar metodologis ini memastikan bahwa hasil pengukuran memiliki tingkat **konsistensi, komparabilitas, dan akuntabilitas** yang memadai, sehingga dapat digunakan tidak hanya untuk kepentingan refleksi internal organisasi, tetapi juga sebagai dasar evaluasi kelembagaan, pembinaan Ormas, serta perumusan kebijakan yang lebih proporsional dan berbasis data.

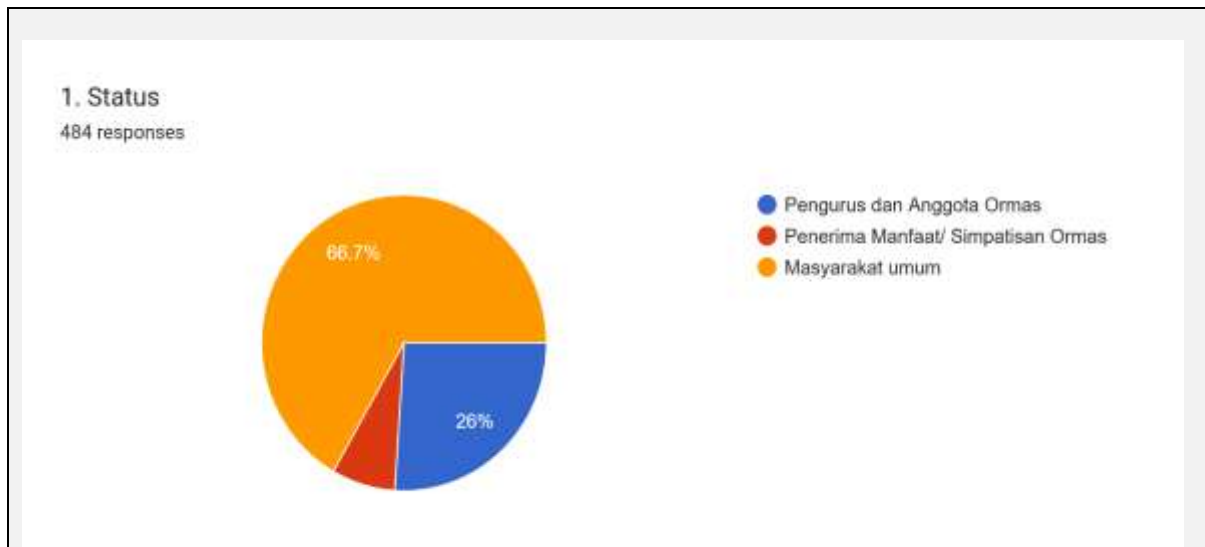
Secara substantif, hasil pengukuran menunjukkan adanya **variasi tingkat kapasitas dan kinerja** di lingkungan Ormas ASBADATA. Variasi tersebut dipengaruhi oleh perbedaan struktur organisasi, ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia, dukungan sumber daya pendukung, serta tingkat kematangan sistem tata kelola pada masing-masing unit organisasi. Namun demikian, pengukuran juga mengidentifikasi pola konsistensi pada sejumlah aspek strategis, antara lain dalam pengelolaan administrasi organisasi, pelaksanaan kegiatan yang relatif terencana, serta keberlanjutan program kaderisasi dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Temuan ini mencerminkan adanya keseimbangan antara capaian positif yang telah terbentuk dengan area-area strategis yang masih memerlukan penguatan lebih lanjut.

Pelaksanaan self-assessment IKO turut mendorong terjadinya proses **pembelajaran dan penyesuaian internal (organizational learning)** di tubuh Ormas ASBADATA. Proses ini memperkuat pemahaman organisasi mengenai pentingnya dokumentasi kelembagaan, akuntabilitas kinerja, serta perencanaan strategis yang berbasis data dan evidensi. Dalam beberapa konteks, mekanisme penilaian ini juga membantu organisasi mengenali, memetakan, dan mengelola potensi serta kekuatan internal yang sebelumnya belum teridentifikasi secara sistematis. Dengan demikian, self-assessment tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja, tetapi juga sebagai instrumen penguatan kapasitas kelembagaan secara berkelanjutan.

Keberhasilan pelaksanaan pengukuran IKO pada Ormas ASBADATA tidak terlepas dari dukungan dan kolaborasi multipihak yang terbangun secara sinergis. Pemerintah Pusat berperan dalam penyediaan kerangka metodologis dan standar instrumen pengukuran, pemerintah daerah bertindak sebagai fasilitator pada tingkat implementasi, sementara **Wellbeing Institute** memberikan dukungan metodologis dan pendampingan teknis untuk menjaga konsistensi penerapan instrumen serta memastikan validitas dan reliabilitas hasil pengukuran. Kolaborasi ini diperkuat oleh partisipasi aktif Ormas ASBADATA yang ditunjukkan melalui keterbukaan data, keterlibatan dalam proses pendampingan, serta pengisian instrumen secara jujur dan reflektif.

Secara keseluruhan, hasil pengukuran IKO melalui mekanisme self-assessment memberikan **fondasi awal yang strategis** bagi penguatan kelembagaan Ormas ASBADATA. Temuan yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan rekomendasi strategis, perencanaan program peningkatan kapasitas, serta pengembangan model tata kelola organisasi yang lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Inisiatif ini mencerminkan komitmen bersama antara pemerintah, mitra metodologis, dan Ormas ASBADATA untuk mendorong organisasi agar semakin adaptif terhadap dinamika sosial serta mampu memberikan kontribusi yang bermakna bagi pembangunan sosial dan kebangsaan.

3.1.1 Data Status Responden



Gambar 3.1 : Grafiks Status Responden

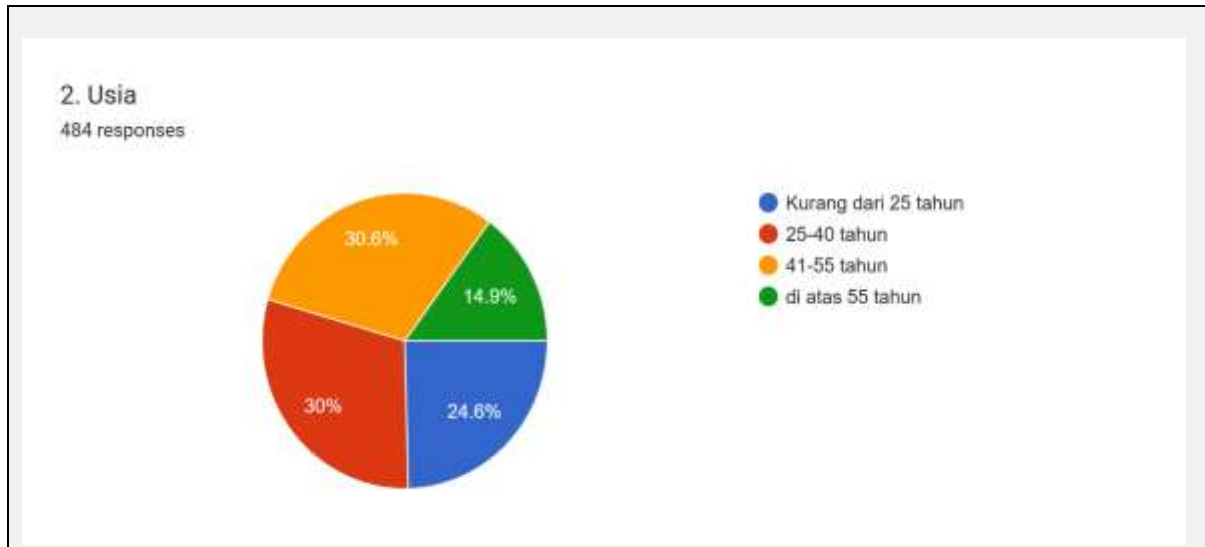
Komposisi responden pada grafik menunjukkan bahwa mayoritas responden berasal dari **masyarakat umum**, dengan proporsi yang sangat dominan, yakni sekitar **dua pertiga dari total responden ($\pm 66,7\%$)**. Dominasi masyarakat umum ini mengindikasikan bahwa persepsi dan penilaian yang terekam dalam survei terutama mencerminkan pengalaman langsung warga terhadap keberadaan, peran, dan kinerja organisasi kemasyarakatan di lingkungan sosialnya. Dari perspektif metodologis, kondisi ini memperkuat **validitas eksternal** pengukuran Indeks Kinerja Ormas (IKO), karena penilaian lebih banyak bersumber dari publik yang relatif independen dan tidak memiliki keterikatan struktural langsung dengan organisasi.

Responden yang berasal dari **pengurus dan anggota Ormas** menempati proporsi berikutnya, yaitu sekitar **26%** dari total responden. Meskipun bukan kelompok mayoritas, keberadaan responden internal ini memiliki nilai strategis karena memberikan perspektif dari dalam organisasi. Kelompok ini umumnya memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai tata kelola kelembagaan, proses pengambilan keputusan, serta dinamika pelaksanaan program di tingkat operasional. Kontribusi mereka memungkinkan hasil survei tidak hanya menangkap persepsi eksternal, tetapi juga merefleksikan kondisi internal organisasi, sehingga membantu membaca tingkat konsistensi antara perencanaan, implementasi, dan capaian program.

Sementara itu, responden dari kategori **penerima manfaat atau simpatisan Ormas** tercatat dalam proporsi yang lebih kecil, yakni sekitar **6–7%** dari total responden. Kelompok ini berada pada posisi antara perspektif internal dan eksternal, karena penilaian mereka didasarkan pada pengalaman langsung berinteraksi atau menerima manfaat dari kegiatan Ormas. Meskipun jumlahnya relatif terbatas, kontribusi kelompok ini tetap penting untuk menilai efektivitas program dan dampak nyata kegiatan organisasi terhadap kelompok sasaran. Proporsi ini juga mengindikasikan adanya ruang perbaikan pada pengukuran berikutnya, khususnya dalam memperluas pelibatan penerima manfaat agar dimensi evaluasi berbasis dampak dapat tergali lebih optimal.

Secara keseluruhan, distribusi responden yang didominasi oleh masyarakat umum, dengan dukungan perspektif dari pengurus/anggota serta penerima manfaat, memberikan **landasan analitis yang kuat dan relatif seimbang** bagi pengukuran IKO. Komposisi ini memastikan bahwa hasil evaluasi tidak bersifat bias internal, melainkan mencerminkan kombinasi antara persepsi publik, pengalaman penerima manfaat, dan refleksi internal organisasi, sehingga mampu menggambarkan kinerja dan kontribusi Ormas secara lebih komprehensif di tengah masyarakat.

3.1.2 Usia Responden



Gambar 3.2 : Grafiks Usia Responden

Distribusi usia responden menunjukkan bahwa kelompok usia **41–55 tahun** merupakan kelompok yang paling dominan, dengan proporsi sekitar **30,6%** dari total responden. Dominasi kelompok usia ini mengindikasikan bahwa survei banyak diikuti oleh individu yang berada pada fase kematangan sosial dan pengalaman yang relatif mapan. Responden pada rentang usia ini umumnya memiliki keterlibatan yang cukup panjang dalam kehidupan bermasyarakat dan berorganisasi, sehingga penilaian yang diberikan cenderung reflektif, berbasis pengalaman, serta mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan konsistensi kinerja Ormas dalam jangka menengah hingga panjang.

Kelompok usia **25–40 tahun** menempati proporsi yang hampir setara, yakni sekitar **30%** dari total responden. Partisipasi yang tinggi dari kelompok usia produktif ini menunjukkan bahwa survei berhasil menjangkau individu yang aktif secara sosial, dinamis, dan memiliki intensitas interaksi yang tinggi dengan kegiatan komunitas. Responden dalam rentang usia ini umumnya berperan sebagai pelaku aktif, penggerak, maupun mitra dalam aktivitas kemasyarakatan, sehingga perspektif yang diberikan relevan untuk menilai aktualitas program, efektivitas kegiatan, serta daya respons organisasi terhadap kebutuhan sosial yang berkembang.

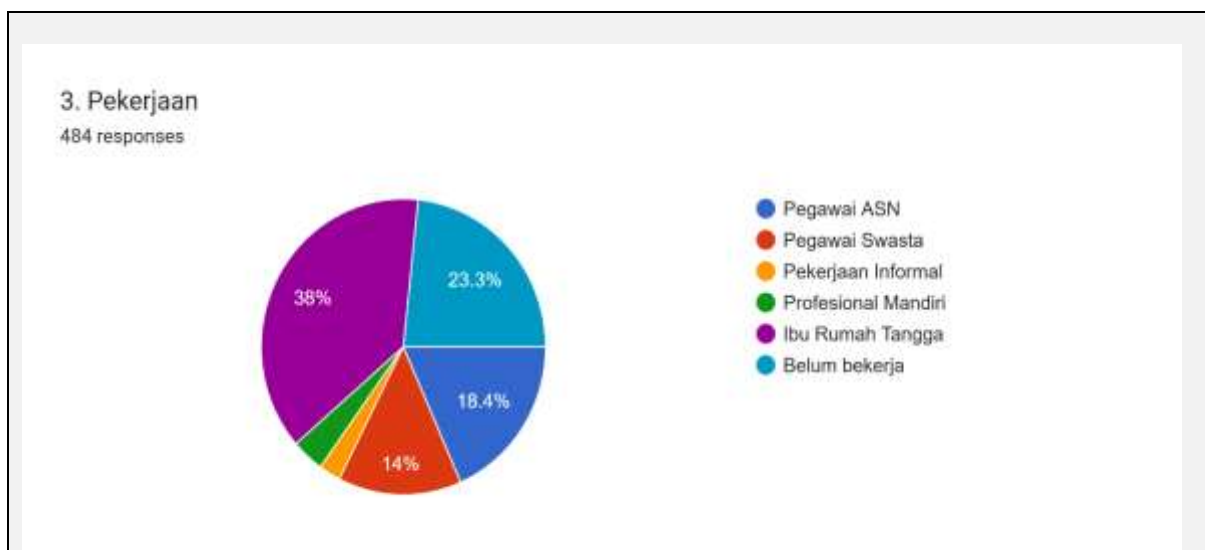
Sementara itu, kelompok usia **di bawah 25 tahun** tercatat sebesar **24,6%**, menunjukkan keterlibatan generasi muda dalam jumlah yang cukup signifikan. Kehadiran kelompok usia ini

penting karena mencerminkan pandangan generasi awal dewasa yang cenderung adaptif terhadap perubahan, terbuka terhadap inovasi, dan sensitif terhadap isu-isu identitas, budaya, serta keberlanjutan. Persepsi dari kelompok ini memberikan masukan strategis terkait daya tarik organisasi, relevansi pendekatan program, serta potensi regenerasi dan keberlanjutan Ormas di masa depan.

Adapun kelompok usia **di atas 55 tahun** memiliki proporsi sekitar **14,9%**, sebagai kelompok dengan jumlah responden paling kecil. Relatif rendahnya partisipasi kelompok usia lanjut ini dapat dipengaruhi oleh faktor akses terhadap instrumen survei, preferensi metode komunikasi, atau tingkat keterlibatan yang berbeda dalam aktivitas organisasi. Meskipun demikian, kontribusi kelompok usia ini tetap penting karena membawa perspektif historis dan nilai-nilai kebijaksanaan sosial yang dapat memperkaya pembacaan terhadap peran dan konsistensi Ormas dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, distribusi usia responden menunjukkan bahwa survei didominasi oleh kelompok usia **produktif dan matang secara sosial**, dengan dukungan partisipasi generasi muda dan kelompok usia lanjut. Komposisi ini memberikan dasar yang cukup representatif untuk menggambarkan persepsi lintas generasi terhadap kinerja, relevansi, dan kontribusi Ormas dalam kehidupan sosial masyarakat saat ini.

3.1.3 Pekerjaan Responden



Gambar 3.3 : Grafiks Pekerjaan Responden

Komposisi pekerjaan responden menunjukkan keberagaman latar belakang sosial-ekonomi yang cukup kuat, sehingga memberikan dasar penilaian yang komprehensif terhadap kinerja Ormas Asosiasi Bawi Dayak Budaya dan Wisata (ASBADATA). Kelompok responden terbesar berasal dari kategori **ibu rumah tangga**, dengan proporsi sekitar **38%** dari total responden. Dominasi kelompok ini mengindikasikan keterlibatan signifikan dari individu yang memiliki kedekatan tinggi dengan kehidupan sosial di tingkat keluarga dan komunitas. Penilaian dari kelompok ini umumnya berfokus pada aspek kebermanfaatan langsung kegiatan Ormas,

dampak sosial di lingkungan sekitar, serta relevansi program terhadap kebutuhan masyarakat sehari-hari.

Kelompok responden **belum bekerja** menempati proporsi berikutnya, yakni sekitar **23,3%**. Kelompok ini umumnya terdiri dari individu yang berada pada fase transisi, seperti lulusan baru, pencari kerja, atau masyarakat yang belum terserap dalam sektor formal. Perspektif kelompok ini penting karena penilaiannya banyak didasarkan pada pengamatan sosial dan ekspektasi normatif terhadap peran Ormas ASBADATA dalam membuka ruang partisipasi, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan solidaritas sosial.

Responden dengan latar belakang **pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)** tercatat sekitar **18,4%**. Kehadiran kelompok ini mencerminkan partisipasi dari kalangan yang relatif memahami tata kelola kelembagaan, regulasi, serta prinsip akuntabilitas publik. Penilaian dari responden ASN umumnya menekankan pada kepatuhan organisasi terhadap aturan, transparansi pengelolaan, serta kesesuaian aktivitas Ormas ASBADATA dengan kerangka kebijakan dan kepentingan publik.

Sementara itu, responden dari kategori **pegawai swasta** berjumlah sekitar **14%**. Kelompok ini merepresentasikan masyarakat yang aktif secara ekonomi dan berinteraksi langsung dengan dinamika dunia kerja serta kehidupan sosial perkotaan maupun komunitas. Perspektif pegawai swasta cenderung menyoroti efektivitas program, profesionalisme organisasi, efisiensi pelaksanaan kegiatan, serta dampak nyata Ormas ASBADATA terhadap lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat.

Adapun responden dari kategori **profesional mandiri** dan **pekerja informal** memiliki proporsi yang relatif lebih kecil. Meskipun demikian, kontribusi kedua kelompok ini tetap penting karena merepresentasikan masyarakat yang adaptif dan dekat dengan realitas sosial-ekonomi sehari-hari. Penilaian mereka umumnya menekankan pada fleksibilitas program, aksesibilitas kegiatan, serta kemampuan Ormas ASBADATA menjawab kebutuhan masyarakat secara kontekstual di tingkat akar rumput.

Secara keseluruhan, distribusi pekerjaan responden mencerminkan keterlibatan lintas kelompok sosial, mulai dari sektor domestik, kelompok transisi, sektor formal, hingga masyarakat informal. Komposisi ini memperkuat kualitas analisis Indeks Kinerja Ormas (IKO), karena hasil pengukuran tidak didominasi oleh satu latar belakang pekerjaan tertentu, melainkan merepresentasikan perspektif yang luas dan relatif berimbang terhadap kinerja, peran, dan kontribusi Ormas ASBADATA di tengah masyarakat.

3.2 Data Skor Nilai PPA Responden dan Pengolahan Data

Data skor **Penilaian Persepsi Awal (PPA)** yang dihimpun dari seluruh responden menjadi landasan utama dalam pengukuran **Indeks Kinerja Ormas (IKO)**. Setiap responden memberikan penilaian terhadap sejumlah variabel **Xi** yang telah dirumuskan dalam kerangka IKO, mencakup aspek kapasitas kelembagaan, kualitas tata kelola, kinerja pelayanan sosial,

keberlanjutan program, serta kualitas relasi organisasi dengan masyarakat. Seluruh penilaian tersebut dikumpulkan melalui instrumen survei digital yang telah distandarkan, sehingga proses pengumpulan data berlangsung secara seragam, akurat, dan mampu meminimalkan potensi bias responden.

Skor yang masuk selanjutnya diproses melalui sistem pengolahan data berbasis aplikasi untuk memastikan konsistensi dan keandalan hasil. Setiap nilai yang diberikan responden secara otomatis direkam dalam basis data, kemudian diklasifikasikan berdasarkan variabel X_i yang relevan. Mekanisme ini memungkinkan sistem analitik menghasilkan ukuran statistik dasar, seperti nilai minimum, maksimum, rerata, serta sebaran skor pada masing-masing variabel. Dengan dukungan sistem digital, proses pengolahan data dapat dilakukan secara efisien, transparan, dan memiliki jejak audit (traceability) yang jelas untuk keperluan verifikasi atau validasi lanjutan.

Setelah tahap pengolahan awal, seluruh variabel X_i disajikan dalam bentuk **visualisasi grafik batang (bar chart)** guna mempermudah pembacaan dan interpretasi data. Grafik batang dipilih karena efektif dalam menampilkan perbandingan skor antarvariabel, sekaligus memperlihatkan posisi setiap variabel dalam kategori capaian tinggi, sedang, maupun rendah. Visualisasi ini berfungsi sebagai alat bantu analisis deskriptif yang memudahkan identifikasi awal terhadap variabel-variabel yang menjadi kekuatan organisasi maupun area yang masih memerlukan peningkatan kapasitas dan intervensi kebijakan.

Tahap akhir pengolahan data PPA dilakukan melalui **analisis visual**, yaitu pembacaan pola grafik untuk mengidentifikasi tren umum, variasi penilaian, potensi anomali, serta kesenjangan persepsi responden pada setiap variabel X_i . Hasil analisis visual ini menjadi pijakan awal bagi penyusunan interpretasi pada bab-bab selanjutnya, di mana nilai PPA akan dikaitkan dan ditriangulasikan dengan temuan kualitatif, observasi lapangan, serta analisis mendalam dari tim kajian. Dengan demikian, pengolahan data PPA tidak berhenti pada penyajian angka semata, melainkan berfungsi sebagai instrumen diagnostik yang memberikan gambaran komprehensif mengenai kinerja ormas berdasarkan persepsi publik dan anggota organisasi.

3.2.1 Data Persepsi Pada Variabel X_1 (Notasi $X(1.1)$)



Gambar 3.4 : Grafiks Data Skor Nilai Persepsi X(1.1)

Distribusi skor persepsi pada variabel **X(1.1) – Kesesuaian Visi dan Misi Ormas dengan Pembangunan Nasional** memperlihatkan pola penilaian yang sangat terkonsentrasi pada skor tinggi dan tidak mengikuti distribusi normal. Sebagian besar responden memberikan penilaian pada rentang skor **7 hingga 9**, dengan akumulasi proporsi mencapai sekitar **82,0% dari total 1.077 responden**. Skor **9** muncul sebagai nilai yang paling dominan, yaitu sekitar **42,8%**, disusul skor **8** sebesar **25,1%** dan skor **7** sekitar **14,1%**. Pola sebaran ini membentuk distribusi yang condong ke kiri (*negative skewness*), yang menandakan kecenderungan penilaian responden yang sangat kuat ke arah afirmasi positif terhadap keselarasan visi dan misi Ormas ASBADATA dengan agenda pembangunan nasional.

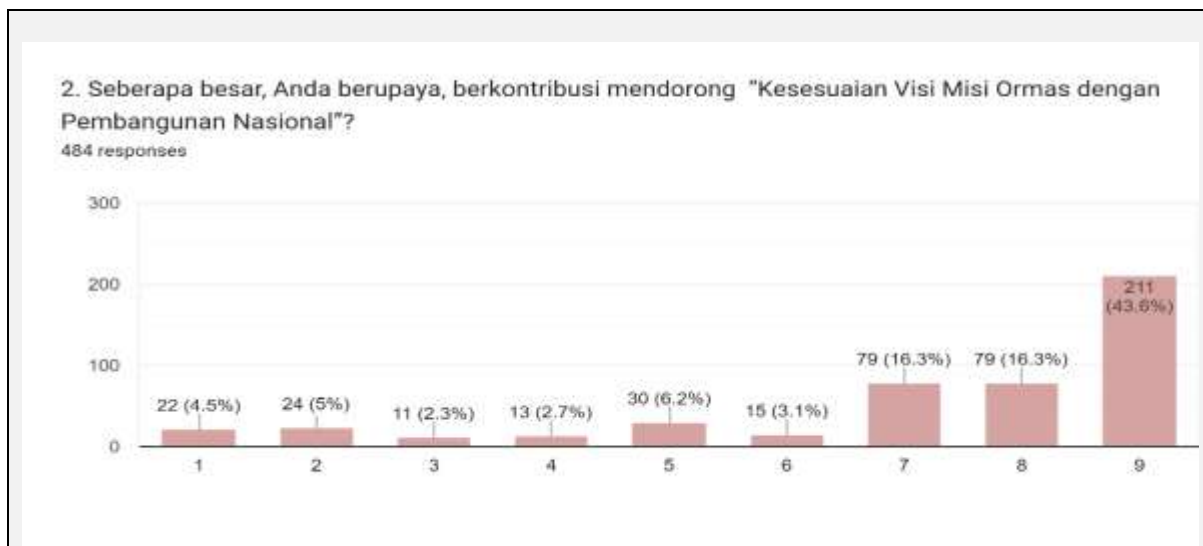
Konsentrasi skor tinggi tersebut mencerminkan tingkat penerimaan publik dan legitimasi normatif yang sangat kuat terhadap posisi strategis Ormas ASBADATA dalam kerangka pembangunan nasional. Persepsi positif ini dapat dibaca sebagai refleksi kepercayaan kolektif bahwa arah kebijakan, nilai dasar, dan tujuan organisasi dipandang sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan serta prioritas pembangunan sosial yang berskala nasional. Dengan kata lain, visi dan misi Ormas tidak hanya dipahami sebagai pernyataan formal, tetapi telah diterima secara simbolik dan normatif oleh mayoritas responden sebagai bagian dari agenda pembangunan yang lebih luas.

Sebaliknya, distribusi skor pada kategori rendah hingga menengah terlihat relatif terbatas. Responden yang memberikan skor **1 hingga 4** secara agregat hanya berada pada kisaran sekitar **11,2%**, sementara skor **5 dan 6** juga tidak menunjukkan konsentrasi yang berarti. Pola ini mengindikasikan bahwa responden cenderung tidak menggunakan skala penilaian secara bertahap atau moderat, melainkan langsung memilih skor tinggi sebagai representasi sikap mereka. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap indikator ini lebih bersifat afirmatif daripada evaluatif-kritis, sehingga variasi persepsi tidak tersebar secara merata di seluruh rentang skala.

Meskipun jumlahnya relatif kecil, keberadaan responden yang memberikan skor sangat rendah tetap memiliki nilai analitis yang penting. Kelompok ini berpotensi merepresentasikan pandangan yang lebih kritis atau skeptis, yang dapat bersumber dari pengalaman empiris terkait kesenjangan antara visi yang dinyatakan dengan praktik implementasi program, keterbatasan sosialisasi visi dan misi organisasi, atau perbedaan pemahaman mengenai konsep pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam instrumen survei. Kontras yang cukup tajam antara skor ekstrem tinggi dan ekstrem rendah ini menunjukkan adanya heterogenitas pemahaman dan pengalaman responden, meskipun secara agregat persepsi publik sangat positif.

Secara keseluruhan, dominasi skor tinggi pada variabel **X(1.1)** menggambarkan persepsi publik yang sangat kuat terhadap keselarasan visi dan misi Ormas ASBADATA dengan pembangunan nasional. Namun demikian, temuan ini perlu ditafsirkan secara cermat, khususnya dalam konteks pengukuran tahap awal atau *pilot project*. Konsentrasi penilaian pada skor tinggi berpotensi dipengaruhi oleh antusiasme awal responden, kecenderungan *social desirability bias*, serta variasi tingkat literasi terhadap indikator yang belum sepenuhnya seragam. Oleh karena itu, pada tahap pengembangan selanjutnya, diperlukan penguatan pemahaman responden terhadap indikator, penyempurnaan redaksi instrumen, serta validasi silang dengan variabel dan dimensi lain agar hasil pengukuran menjadi lebih stabil, objektif, dan memiliki kedalaman analitis yang lebih kuat.

3.2.2 Data Partisipasi Pada Variabel X1 (Notasi X(1.2))



Gambar 3.5 : Grafiks Data Skor Nilai Partisipasi X(1.2)

Distribusi skor partisipasi pada variabel **X(1.2) – Upaya dan Kontribusi Responden dalam Mendorong Kesesuaian Visi dan Misi Ormas dengan Pembangunan Nasional** menunjukkan pola penilaian yang tidak mengikuti distribusi normal dan sangat terkonsentrasi pada skor tinggi. Sebagian besar responden memberikan penilaian pada rentang skor **7 hingga 9**, dengan proporsi kumulatif mencapai sekitar **81,3% dari total responden**. Skor **9** menjadi nilai yang

paling dominan, yaitu sekitar **43,6%**, disusul skor **7 dan 8** yang masing-masing berada pada kisaran **16,3%**. Pola sebaran ini membentuk distribusi yang condong ke kiri (*negative skewness*), yang mengindikasikan bahwa responden secara umum menilai tingkat upaya dan kontribusi pribadi mereka dalam mendukung keselarasan visi dan misi Ormas ASBADATA dengan pembangunan nasional berada pada tingkat yang sangat tinggi.

Tingginya konsentrasi skor pada kategori atas mencerminkan persepsi kuat mengenai keterlibatan, komitmen, dan rasa tanggung jawab individu terhadap peran strategis Ormas ASBADATA dalam kerangka pembangunan nasional. Penilaian ini dapat dipahami sebagai ekspresi dukungan normatif serta *sense of belonging* yang relatif kuat, di mana responden memaknai kontribusi personal—baik melalui partisipasi langsung dalam kegiatan, dukungan sosial di lingkungan sekitar, maupun keterlibatan non-struktural—sebagai bagian integral dari penguatan posisi Ormas dalam pembangunan sosial dan kebangsaan.

Namun demikian, dominasi skor tinggi pada variabel partisipasi juga mengindikasikan potensi **bias penilaian diri (*self-assessment bias*)**. Dalam konteks survei persepsi, konsep “berkontribusi” cenderung ditafsirkan secara luas oleh responden dan tidak selalu dibedakan secara tegas antara keterlibatan aktif dan berkelanjutan, partisipasi insidental, maupun dukungan yang bersifat simbolik. Akibatnya, skor partisipasi yang tinggi lebih merefleksikan persepsi subjektif atas keterlibatan dibandingkan ukuran kontribusi yang sepenuhnya terdefinisi secara operasional dan terukur.

Di sisi lain, distribusi skor pada kategori rendah hingga menengah relatif terbatas. Responden yang memberikan skor **1 hingga 4** hanya mencakup proporsi yang kecil, sementara skor **5 dan 6** juga tidak menunjukkan konsentrasi yang signifikan. Keberadaan kelompok ini mengindikasikan bahwa sebagian responden merasa tingkat keterlibatannya masih terbatas, memiliki akses yang minim terhadap aktivitas Ormas ASBADATA, atau belum sepenuhnya memahami bentuk kontribusi yang dimaksud dalam indikator **X(1.2)**. Variasi ini menunjukkan bahwa pemahaman dan pengalaman responden terhadap konsep partisipasi masih bersifat heterogen, meskipun kecenderungan umum penilaian sangat positif.

Secara keseluruhan, pola distribusi skor partisipasi pada variabel **X(1.2)** konsisten dengan karakteristik pengukuran pada tahap awal atau konteks *pilot project*, di mana responden cenderung memberikan penilaian tinggi sebagai refleksi antusiasme awal, kecenderungan menampilkan citra positif, serta keterbatasan literasi terhadap instrumen penilaian. Oleh karena itu, meskipun data menunjukkan tingkat partisipasi yang relatif tinggi, interpretasinya perlu dilakukan secara hati-hati. Pada tahap pengembangan selanjutnya, diperlukan penajaman definisi operasional partisipasi, peningkatan pemahaman responden terhadap indikator, serta triangulasi dengan variabel dan dimensi lain agar hasil pengukuran menjadi lebih objektif, proporsional, dan memiliki kedalaman analitis yang lebih kuat.

3.2.3 Data Akseptabilitas Pada Variabel X1 (Notasi X(1.3))



Gambar 3.6 : Grafiks Data Skor Nilai Akseptabilitas X(1.2)

Distribusi penilaian pada variabel **akseptabilitas X(1.3) – Penerimaan terhadap Realitas Kesesuaian Visi dan Misi Ormas dengan Pembangunan Nasional** menunjukkan pola sebaran yang tidak mengikuti distribusi normal dan sangat terkonsentrasi pada skor tinggi. Mayoritas responden memberikan penilaian pada rentang skor **7 hingga 9**, dengan proporsi kumulatif mencapai sekitar **75–76% dari total responden**. Skor **9** tercatat sebagai nilai paling dominan, yaitu sekitar **42,4%**, diikuti skor **8** sebesar **18,2%** dan skor **7** sekitar **14,5%**. Pola ini membentuk distribusi yang condong ke kiri (*negative skewness*), yang mengindikasikan bahwa secara umum responden memiliki tingkat penerimaan yang tinggi terhadap realitas kesesuaian visi dan misi Ormas ASBADATA dengan arah pembangunan nasional.

Konsentrasi skor pada kategori atas menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai keselarasan visi dan misi Ormas ASBADATA tidak hanya bersifat normatif atau ideal, tetapi juga relatif dapat diterima dalam praktik dan realitas sosial yang mereka alami. Tingginya tingkat akseptabilitas ini mencerminkan adanya keyakinan publik bahwa orientasi, arah gerak, dan peran Ormas ASBADATA dipersepsikan selaras dengan agenda pembangunan nasional, baik dalam konteks nilai kebangsaan, pembangunan sosial, maupun kontribusi kemasyarakatan di tingkat lokal.

Namun demikian, dominasi skor tinggi pada variabel akseptabilitas juga mengisyaratkan adanya potensi **bias optimisme** dalam penilaian terhadap kondisi faktual. Secara konseptual, akseptabilitas seharusnya merepresentasikan evaluasi yang lebih empiris dibandingkan variabel persepsi (X1.1) dan partisipasi (X1.2), karena berkaitan langsung dengan pengalaman nyata responden terhadap implementasi visi dan misi organisasi di lapangan. Ketika penilaian realitas masih sangat terkonsentrasi pada skor tinggi, hal ini dapat mengindikasikan bahwa sebagian responden belum sepenuhnya membedakan antara penilaian ideal, ekspektasi normatif, dan evaluasi berbasis pengalaman aktual. Dengan demikian, penerimaan yang tinggi masih berpotensi dipengaruhi oleh citra umum yang positif terhadap Ormas ASBADATA.

Di sisi lain, skor rendah hingga menengah tetap muncul meskipun dalam proporsi yang relatif terbatas. Responden yang memberikan skor **1 hingga 4** secara agregat berada pada kisaran sekitar **13–14%**, sementara skor **5 dan 6** juga muncul meskipun tidak dominan. Keberadaan kelompok ini menunjukkan adanya sebagian responden yang menilai bahwa realitas kesesuaian visi dan misi Ormas ASBADATA dengan pembangunan nasional belum sepenuhnya optimal atau belum dirasakan secara konsisten. Kelompok ini berpotensi merepresentasikan pandangan yang lebih kritis, pengalaman empiris yang beragam, atau ekspektasi yang lebih tinggi terhadap kinerja dan dampak konkret Ormas di lapangan.

Secara keseluruhan, pola distribusi skor akseptabilitas pada variabel **X(1.3)** menegaskan bahwa hasil pengukuran masih berada dalam konteks **tahap awal atau pilot project**. Oleh karena itu, interpretasi terhadap tingkat penerimaan masyarakat perlu dilakukan secara hati-hati. Ke depan, diperlukan penguatan literasi responden mengenai makna akseptabilitas, penajaman definisi operasional penilaian realitas, serta validasi melalui triangulasi dengan variabel persepsi (X1.1) dan partisipasi (X1.2) agar hasil pengukuran menjadi lebih proporsional, stabil, dan benar-benar mencerminkan kondisi faktual di lapangan.

3.2.4 Skor Nilai PPA Dalam Tabulasi

	IKO: Direct Measurement Model (DMM)																	
	Asosiasi Bawi Dayak Budaya dan Wisata (ASBADATA): Provinsi Kalimantan Tengah 2025																	
	Kesesuaian Visi Misi Tujuan dengan Pembangun						D2: Partisipasi dan Kepuasan Masyarakat						D3: Keberlanjutan dan Inovasi					
	Variabel X1(15,0%)			Variabel X2 (10,0%)			Variabel X3 (20%)			Variabel X4 (20%)			Variabel X5 (15,0%)			Variabel X6 (20%)		
No. Responden	X1.1	X1.2	X1.3	X2.1	X2.2	X2.3	X3.1	X3.2	X3.3	X4.1	X4.2	X4.3	X5.1	X5.2	X5.3	X6.1	X6.2	X6.3
1	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
2	4	3	1	3	4	4	6	4	6	3	4	3	4	4	5	5	4	7
3	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
4	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
5	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
472	8	8	8	8	6	7	7	7	7	6	7	7	8	7	7	7	7	7
473	5	1	1	7	4	2	7	4	5	1	3	3	1	3	1	2	1	4
474	5	4	6	7	5	8	8	9	6	9	9	8	9	7	6	2	3	1
475	1	7	3	2	1	7	2	1	5	5	6	2	7	6	1	4	7	1
476	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
477	8	7	8	7	7	8	9	8	7	9	8	7	7	7	9	7	8	8
478	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
479	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
480	4	6	6	5	5	6	4	5	5	7	5	6	7	5	5	5	5	5
481	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
482	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
483	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
484	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

Gambar 3.7 : Grafiks Data Tabulasi

Seluruh skor **Penilaian Persepsi Awal (PPA)** yang dihimpun dari responden selanjutnya disusun dalam bentuk **tabulasi data** sebagai langkah awal untuk memastikan keterbacaan, keterlacakan, serta kesiapan data dalam proses analisis lanjutan. Melalui tabulasi ini, nilai pada setiap variabel dan subvariabel **X_i** dirangkum secara sistematis, sehingga data mentah yang sebelumnya tersebar dalam respons individual dapat dikonsolidasikan ke dalam struktur data yang terstandar dan mudah dianalisis. Tahapan ini menjadi elemen penting dalam

menjamin bahwa seluruh informasi penilaian terdokumentasi secara utuh dan siap digunakan dalam berbagai bentuk analisis kuantitatif.

Penyajian data dalam format tabular memungkinkan pembacaan pola kecenderungan penilaian responden secara lebih jelas, termasuk distribusi skor tinggi, sedang, dan rendah pada masing-masing indikator. Tabulasi mempermudah identifikasi tingkat konsistensi penilaian, variasi antarresponden, serta potensi penyimpangan atau anomali data yang mungkin tidak sepenuhnya terlihat melalui visualisasi grafik. Dengan demikian, tabulasi berfungsi sebagai instrumen penting dalam proses validasi internal data serta pengujian kewajaran sebaran skor sebelum dilakukan analisis yang lebih mendalam.

Lebih lanjut, tabulasi skor PPA menjadi dasar utama bagi tahapan pengolahan data berikutnya, seperti perhitungan nilai rerata, penyusunan indeks komposit, analisis kecenderungan, serta proses **triangulasi** dengan instrumen pengukuran lain, termasuk **Direct Measurement Model (DMM)** dan **Dynamic Measurement Model (DyMM)**. Struktur data tabular ini juga memungkinkan integrasi dengan temuan kualitatif, sehingga interpretasi hasil pengukuran tidak hanya bersifat numerik, tetapi juga mempertimbangkan konteks dan dinamika sosial yang melatarbelakanginya.

Dengan demikian, penyusunan tabulasi skor PPA tidak semata-mata merupakan langkah teknis administratif, melainkan bagian integral dari keseluruhan metodologi pengukuran **Indeks Kinerja Ormas (IKO)**. Tahapan ini memastikan bahwa proses analisis dilakukan secara terstruktur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis, sekaligus menjadi fondasi yang kuat bagi penyusunan diagnosis kinerja organisasi serta perumusan rekomendasi kebijakan dan penguatan kapasitas ormas pada tahap selanjutnya.

3.3 Analisis Skor IKO; Direct Measurement Model (DMM)

Tahap analisis skor Indeks Kinerja Ormas (IKO) menggunakan pendekatan **Direct Measurement Model (DMM)** dimulai dengan menghitung **rata-rata skor PPA** dari seluruh responden untuk setiap variabel X_i yang telah dituangkan dalam tabulasi data. Rerata skor ini digunakan sebagai representasi nilai persepsi kolektif terhadap masing-masing indikator kinerja ormas. Perhitungan ini membantu menormalkan variasi individu di antara responden dan menghasilkan nilai agregat yang lebih stabil, sehingga dapat digunakan sebagai basis perbandingan antar variabel.

Setelah diperoleh nilai rata-rata dari masing-masing variabel X_i , langkah berikutnya adalah mengolahnya menjadi **skor variabel** yang mencerminkan kekuatan atau kelemahan spesifik dalam tata kelola dan kinerja ormas. Skor variabel X_i tersebut kemudian dikelompokkan sesuai dengan **dimensi D_i** dalam kerangka IKO, seperti kapasitas internal, tata kelola organisasi, pelayanan publik, dan keberlanjutan program. Pada tahap ini dilakukan proses agregasi, yaitu menghitung skor rata-rata per dimensi untuk melihat bagaimana performa ormas pada setiap

aspek utama kinerja. Proses ini penting untuk mengidentifikasi dimensi mana yang menonjol serta mana yang memerlukan intervensi penguatan.

Tahap akhir dari model DMM adalah menghitung **skor total IKO DMM**, yaitu penggabungan seluruh nilai dimensi Di menjadi skor komposit yang menggambarkan kondisi kinerja ormas secara keseluruhan. Skor IKO DMM memberikan ukuran kuantitatif yang dapat digunakan untuk menilai posisi ormas dalam kategori tertentu, membandingkan kinerja antar ormas, serta memantau perubahan dari waktu ke waktu. Melalui pendekatan ini, analisis menjadi lebih objektif, terukur, dan berbasis data, sehingga hasilnya dapat digunakan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan, penyusunan program penguatan kapasitas, maupun evaluasi efektifitas kebijakan terkait pembinaan organisasi kemasyarakatan.

IKO: Direct Measurement Model (DMM)																		
Asosiasi Bawi Dayak Budaya dan Wisata (ASBADATA): Provinsi Kalimantan Tengah 2025																		
No. Responden	D1: Kesesuaian Visi Misi Tujuan dengan Pembangunan						D2: Partisipasi dan Kepuasan Masyarakat						D3: Keberlanjutan dan Inovasi					
	Variabel X1 (15,0%)			Variabel X2 (10,0%)			Variabel X3 (20%)			Variabel X4 (20%)			Variabel X5 (15,0%)			Variabel X6 (20%)		
	X1.1	X1.2	X1.3	X2.1	X2.2	X2.3	X3.1	X3.2	X3.3	X4.1	X4.2	X4.3	X5.1	X5.2	X5.3	X6.1	X6.2	X6.3
1	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
2	4	3	1	3	4	4	6	4	6	3	4	3	4	4	5	5	4	7
3	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
4	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
5	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
472	8	8	8	8	6	7	7	7	7	6	7	7	8	7	7	7	7	7
473	5	1	1	7	4	2	7	4	5	1	3	3	1	3	1	2	1	4
474	5	4	6	7	5	8	8	9	6	9	9	8	9	7	6	2	3	1
475	1	7	3	2	1	7	2	1	5	5	6	2	7	6	1	4	7	1
476	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
477	8	7	8	7	7	8	9	8	7	9	8	7	7	7	9	7	8	8
478	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
479	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
480	4	6	6	5	5	6	4	5	5	7	5	6	7	5	5	5	5	5
481	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
482	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
483	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
484	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Skor PPA Va	7,07	7,19	7,19	7,10	7,15	7,29	7,19	7,22	7,21	7,29	7,33	7,33	7,14	7,19	7,23	7,15	7,23	7,28
StandDev	2,81	2,08	2,34	2,55	2,42	2,23	2,48	2,34	2,37	2,33	2,26	2,13	2,55	2,37	2,28	2,08	2,16	2,19
Skor Var Xi	7,16			7,20			7,21			7,32			7,20			7,23		
Skor Dimensi D	7,18						7,27						7,22					
Skor Indeks IKO	7,23						77,84						Konversi Skor Dalam Skala 100					

Gambar 3.8 : Grafiks Data Skor Nilai PPA, Variabel Xi, Dimensi Di dan Indeks IKO DMM

Analisis Hasil Pengukuran IKO Direct Measurement Model (DMM)

Ormas Asosiasi Bawi Dayak Budaya dan Wisata (ASBADATA)

Berdasarkan tabel hasil pengukuran **Indeks Kinerja Ormas (IKO)** melalui pendekatan **Direct Measurement Model (DMM)**, capaian skor Persepsi, Partisipasi, dan Akseptabilitas (PPA) Ormas **Asosiasi Bawi Dayak Budaya dan Wisata (ASBADATA)** menunjukkan tingkat penilaian yang relatif stabil pada seluruh variabel **Xi**, namun berada pada level yang lebih moderat dibandingkan narasi sebelumnya. Skor rata-rata variabel **Xi** berada pada kisaran **7,19 hingga 7,29**, dengan nilai **indeks agregat DMM sebesar 7,23**. Capaian ini menempatkan persepsi responden terhadap kinerja ASBADATA pada kategori **cukup baik**, namun belum mencapai kategori kuat atau unggul secara konsisten.

Jika ditinjau per dimensi, **Dimensi D1 (Kesesuaian Visi, Misi, dan Tujuan dengan Pembangunan Nasional)** menunjukkan skor yang relatif konsisten dan berada sedikit di atas

nilai rata-rata indeks. Tidak terdapat indikator dengan skor rendah yang menonjol, yang mengindikasikan bahwa secara normatif dan konseptual, responden menilai arah dan orientasi ASBADATA telah sejalan dengan kerangka pembangunan nasional. Namun demikian, skor yang berada di kisaran awal angka 7 menunjukkan bahwa keselarasan tersebut lebih dipersepsikan sebagai *cukup sesuai*, bukan sebagai kekuatan strategis yang benar-benar menonjol.

Pola serupa juga terlihat pada **Dimensi D2 (Partisipasi dan Kepuasan Masyarakat)** serta **Dimensi D3 (Keberlanjutan dan Inovasi)**, di mana perbedaan skor antarvariabel dan antardimensi relatif kecil. Ketiadaan deviasi yang signifikan antar dimensi menunjukkan bahwa responden menilai kinerja ASBADATA secara relatif merata, tanpa adanya dimensi yang dipersepsikan secara jelas sebagai keunggulan utama maupun sebagai titik lemah kritis.

Analisis Skor Variabel Xi

Sebagai unit analisis paling elementer dalam DMM, variabel **Xi** menunjukkan pola skor yang sangat berdekatan satu sama lain, seluruhnya berada pada rentang **sekitar 7,2**. Tidak terdapat indikator yang secara signifikan lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan indikator lainnya. Pola ini mengindikasikan bahwa responden cenderung memberikan penilaian **agregatif dan holistik**, bukan evaluasi yang terperinci dan diferensiatif terhadap masing-masing aspek kinerja organisasi.

Keseragaman skor Xi ini juga mengindikasikan bahwa **sensitivitas instrumen DMM pada tahap ini masih terbatas** dalam menangkap variasi kinerja yang lebih spesifik antarindikator. Faktor-faktor seperti literasi responden terhadap indikator, kecenderungan penilaian normatif, serta bias moderasi (*tendency toward middle-upper score*) masih berpotensi memengaruhi hasil pengukuran. Dengan demikian, skor Xi lebih merepresentasikan persepsi umum terhadap organisasi dibandingkan diagnosis kinerja yang bersifat operasional.

Analisis Skor Dimensi Di

Hasil agregasi variabel Xi ke dalam dimensi **Di** menghasilkan skor dimensi yang relatif berdekatan, dengan nilai berada pada kisaran **sekitar 7,2–7,3**. Perbedaan antardimensi sangat tipis, yang menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap kinerja ASBADATA bersifat menyeluruh dan tidak tersegmentasi secara tajam. Tidak terdapat dimensi yang secara jelas dipersepsikan sebagai kekuatan dominan maupun sebagai kelemahan struktural.

Dari perspektif metodologis, kondisi ini merupakan karakteristik umum pengukuran pada **tahap awal atau konteks pilot project**, di mana responden cenderung menilai organisasi berdasarkan kesan umum (*general impression*) dan pengalaman global, bukan berdasarkan evaluasi mendalam terhadap setiap dimensi kinerja. Oleh karena itu, skor dimensi Di pada tahap ini lebih tepat dipahami sebagai **indikator baseline**, bukan sebagai alat diagnosis strategis yang final.

Skor Indeks IKO DMM dan Konversi Skala 0–100

Berdasarkan agregasi seluruh dimensi, skor **IKO DMM Ormas ASBADATA** tercatat sebesar **7,23**. Setelah dikonversi ke dalam skala **0–100**, nilai ini setara dengan **±77,84**, yang menempatkan kinerja ASBADATA pada kategori **“Cukup Baik.”**

Capaian ini menunjukkan bahwa secara perseptual ASBADATA telah diterima secara positif oleh responden, namun **belum menunjukkan keunggulan kinerja yang kuat dan terartikulasikan secara jelas**. Mengingat pengukuran ini masih berada pada fase awal, skor DMM sebesar 7,23 sebaiknya diposisikan sebagai **baseline evaluatif**, yang ke depan perlu diperdalam melalui:

1. triangulasi dengan **DyMM** untuk menangkap dinamika dan stabilitas persepsi,
2. analisis **DUSK** untuk mengidentifikasi isu substantif di tingkat pengalaman masyarakat, serta
3. penyempurnaan instrumen dan peningkatan literasi responden.

Dengan langkah tersebut, pengukuran IKO diharapkan dapat berkembang dari sekadar pemetaan persepsi umum menuju **diagnosis kinerja organisasi yang lebih tajam, objektif, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan**.

3.4 Analisis Skor Indeks IKO : Dynamic Measurement Model (DyMM)

Dynamic Measurement Model (DyMM) sebagai Instrumen Quality Assurance dalam IKO

Dynamic Measurement Model (DyMM) merupakan metode pengukuran lanjutan dalam Indeks Kinerja Ormas (IKO) yang dirancang untuk menguji **stabilitas, konsistensi, dan kekuatan statistik** dari skor penilaian masyarakat. Berbeda dengan Direct Measurement Model (DMM) yang bersifat pengukuran langsung terhadap persepsi publik, DyMM berfungsi sebagai mekanisme *quality assurance* analitis untuk memastikan bahwa skor PPA, variabel Xi, dimensi Di, hingga nilai IKO tidak hanya tinggi secara nominal, tetapi juga **signifikan secara statistik, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis**. Dengan demikian, DyMM berperan sebagai penjaga mutu (*statistical gatekeeper*) atas hasil pengukuran DMM.

Dalam implementasinya, DyMM menguji kualitas data menggunakan **lima metrik statistik utama** yang seluruhnya dibandingkan dengan **Standar Acuan Signifikansi (SAS)** yang ditetapkan sebagai batas minimal kelayakan analisis. Metrik pertama adalah **Signifikansi Skor Penilaian (SSP)**, yaitu pengukuran apakah nilai rata-rata skor variabel Xi secara statistik berada pada tingkat yang bermakna dan tidak jatuh pada batas bawah atau zona ambigu. SSP menguji kekuatan nilai rata-rata menggunakan pendekatan distribusi statistik, sehingga memastikan bahwa skor Xi bukan sekadar hasil kebetulan, melainkan mencerminkan persepsi publik yang nyata dan kuat. Apabila nilai SSP melampaui ambang SAS, maka skor dinyatakan signifikan.

Metrik kedua adalah **Standar Deviasi (SD)**, yang berfungsi untuk mengukur tingkat penyebaran penilaian responden terhadap nilai rata-rata skor Xi. SD memberikan informasi mengenai konsistensi persepsi publik: SD yang rendah menunjukkan homogenitas penilaian, sedangkan SD yang tinggi mengindikasikan variasi persepsi yang lebar. Dalam kerangka DyMM, skor Xi dinyatakan stabil apabila nilai SD berada dalam rentang SAS, sehingga nilai rata-rata dapat digunakan secara kredibel sebagai representasi penilaian publik. Metrik ini menjadi penting terutama pada variabel yang sensitif, seperti kualitas program dan kepuasan masyarakat.

Metrik ketiga adalah **Proporsi Responden Menilai Rendah (PRMR)**, yang mengukur persentase responden yang memberikan skor rendah (misalnya skor 1–3 pada skala 1–9). PRMR digunakan untuk mendeteksi potensi *ketidakpuasan tersembunyi* yang tidak selalu tercermin dalam nilai rata-rata. Apabila PRMR berada di atas ambang SAS, maka variabel tersebut dinilai memiliki risiko sosial, meskipun skor rata-ratanya tinggi. Dengan demikian, PRMR berfungsi sebagai pengaman analitis yang mencegah bias rata-rata dan memberikan gambaran distribusi opini secara lebih komprehensif.

Metrik keempat adalah **Korelasi Respon Publik (KRP)**, yaitu pengukuran konsistensi hubungan antarindikator atau antarvariabel dalam penilaian responden. KRP menilai apakah publik memberikan penilaian secara terstruktur dan rasional. Korelasi yang rendah atau acak menunjukkan lemahnya konsistensi persepsi, sedangkan korelasi yang memadai (di atas SAS) mengindikasikan bahwa responden memahami indikator secara koheren dan menilai secara konsisten. Oleh karena itu, KRP berfungsi untuk memperkuat **validitas konstruk** dari instrumen pengukuran IKO.

Metrik kelima adalah **Keseimbangan dan Kesenjangan (K&K)**, yang digunakan untuk menilai distribusi persepsi positif, netral, dan negatif di antara responden. Metrik ini mengidentifikasi apakah penilaian publik cenderung seimbang atau terpolarisasi. Apabila terdapat kesenjangan ekstrem antara kelompok penilai tinggi dan penilai rendah, maka variabel tersebut dinilai memiliki potensi risiko sosial dan memerlukan perhatian khusus dalam proses pembinaan dan pengawasan. DyMM mensyaratkan bahwa tingkat keseimbangan persepsi harus berada dalam batas SAS agar suatu variabel atau dimensi dinyatakan stabil.

Seluruh metrik DyMM tersebut dibandingkan secara sistematis dengan **Standar Acuan Signifikansi (SAS)** sebagai kriteria teknis minimum kelayakan analisis. Apabila satu atau lebih metrik tidak memenuhi SAS, maka skor variabel Xi atau dimensi Di akan ditandai sebagai **perlu peninjauan**, meskipun nilai rata-ratanya tergolong tinggi. Pendekatan ini menjadikan DyMM sebagai instrumen analitis yang memastikan bahwa hasil pengukuran IKO tidak hanya tampak baik secara angka, tetapi juga **kuat secara statistik, konsisten secara metodologis, dan relevan secara sosial** sebagai dasar pembinaan Ormas berbasis data.

3.4.1 Signifikansi Skor Penilaian (SSP)

IKO: Dynamic Measurement Model (DyMM)																		
Asosiasi Bawi Dayak Budaya dan Wisata (ASBADATA): Provinsi Kalimantan Tengah 2025																		
No. Responden	D1: Kesesuaian Visi Misi Tujuan dengan Pembangunan						D2: Partisipasi dan Kepuasan Masyarakat						D3: Keberlanjutan dan Inovasi					
	Variabel X1 (15,0%)			Variabel X2 (10,0%)			Variabel X3 (20%)			Variabel X4 (20%)			Variabel X5 (15,0%)			Variabel X6 (20%)		
	X1.1	X1.2	X1.3	X2.1	X2.2	X2.3	X3.1	X3.2	X3.3	X4.1	X4.2	X4.3	X5.1	X5.2	X5.3	X6.1	X6.2	X6.3
1	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
2	4	3	1	3	4	4	6	4	6	3	4	3	4	4	5	5	4	7
3	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
478	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
479	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
480	4	6	6	5	5	6	4	5	5	7	5	6	7	5	5	5	5	5
481	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
482	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
483	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
484	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Signifikansi Skor Penilaian (SSP): Standar Acuan Signifikansi (SAS) 6,5 Sebagai Uji Signifikansi; Bobot dinamis 40%																		
Skor PPA Var.	7,07	7,19	7,19	7,10	7,15	7,29	7,19	7,22	7,21	7,29	7,33	7,33	7,14	7,19	7,23	7,15	7,23	7,28
SAS	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Signifikansi	Signifika	Signifika	Signifika	Signifika	Signifika	Signifika	Signifika	Signifika	Signifika	Signifika	Signifika	Signifika	Signifika	Signifika	Signifika	Signifika	Signifika	Signifika

Gambar 3.9 : Grafik Data Signifikansi Skor Penilaian (SSP)

Standar Acuan Signifikansi (SAS) sebesar **6,5** merupakan tolok ukur evaluatif utama dalam kerangka Indeks Kinerja Ormas (IKO) yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap indikator kinerja yang diukur memiliki **makna substantif dan relevansi operasional**, bukan sekadar terpenuhi secara administratif. Dalam konteks DyMM, SAS berfungsi sebagai *threshold* metodologis untuk menguji apakah skor penilaian publik benar-benar mencerminkan kualitas tata kelola dan kinerja organisasi yang nyata. Pada tingkat SAS ini, terdapat **18 butir indikator** yang merepresentasikan elemen-elemen fundamental kelembagaan, mulai dari kelengkapan dokumen organisasi, kejelasan struktur dan mekanisme pengambilan keputusan, akuntabilitas administrasi, konsistensi pelaksanaan program, hingga keselarasan kegiatan organisasi dengan mandat, visi, dan tujuan strategis.

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa **seluruh 18 indikator (18/18)** dinyatakan **memenuhi kriteria signifikansi**, yang berarti seluruh elemen yang diuji telah melampaui ambang SAS dan dinilai signifikan secara statistik maupun substantif. Capaian ini menunjukkan bahwa Ormas ASBADATA memiliki fondasi kelembagaan yang relatif lengkap, tertata, dan telah berfungsi secara operasional. Dalam konteks pengukuran IKO, pemenuhan penuh terhadap SAS mengindikasikan tingkat kesiapan organisasi yang memadai dalam menjalankan fungsi sosial, membangun koordinasi dengan pemangku kepentingan, serta memberikan kontribusi pelayanan kepada masyarakat secara terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam sistem pembobotan IKO, komponen **Signifikansi Skor Penilaian (SSP)** memiliki bobot yang relatif besar, yaitu **40%**, karena aspek signifikansi indikator dipandang sebagai pilar utama dalam menilai kualitas tata kelola dan integritas organisasi. Dengan terpenuhinya

seluruh indikator signifikan, maka skor SSP dihitung secara maksimal menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{SSP} = (18/18) \times 40\% \times 100 = 40$$

Nilai ini menempatkan Ormas ASBADATA pada **level tertinggi** dalam kategori pemenuhan Standar Acuan Signifikansi dan memberikan kontribusi yang sangat kuat terhadap pembentukan skor akhir IKO, baik pada komponen **Direct Measurement Model (DMM)** maupun **Dynamic Measurement Model (DyMM)**. Secara metodologis, capaian ini menegaskan bahwa skor rata-rata yang diperoleh pada variabel Xi dan dimensi Di tidak hanya tinggi secara nominal, tetapi juga **memenuhi syarat kelayakan statistik** untuk digunakan dalam analisis lanjutan.

Meskipun demikian, capaian **18 dari 18 indikator signifikan** tetap perlu dibaca secara kritis dan proporsional. Pemenuhan SAS tidak boleh dipahami sebagai titik akhir penilaian, melainkan sebagai **baseline kualitas struktural** organisasi. Tantangan berikutnya adalah menjaga agar pemenuhan standar tersebut benar-benar tercermin dalam praktik sehari-hari, bukan berhenti pada kelengkapan formal. Oleh karena itu, diperlukan monitoring internal yang berkelanjutan, evaluasi periodik berbasis data, serta penguatan implementasi program di lapangan agar pemenuhan SAS tidak hanya bersifat administratif, tetapi berfungsi sebagai fondasi kinerja Ormas ASBADATA yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat.

3.4.2 Standar Deviasi

IKO: Dynamic Measurement Model (DyMM)																		
Asosiasi Bawi Dayak Budaya dan Wisata (ASBADATA): Provinsi Kalimantan Tengah 2025																		
No. Responden	D1: Kesesuaian Visi Misi Tujuan dengan Pembangunan						D2: Partisipasi dan Kepuasan Masyarakat						D3: Keberlanjutan dan Inovasi					
	Variabel X1 (15,0%)			Variabel X2 (10,0%)			Variabel X3 (20%)			Variabel X4 (20%)			Variabel X5 (15,0%)			Variabel X6 (20%)		
	X1.1	X1.2	X1.3	X2.1	X2.2	X2.3	X3.1	X3.2	X3.3	X4.1	X4.2	X4.3	X5.1	X5.2	X5.3	X6.1	X6.2	X6.3
1	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
2	4	3	1	3	4	4	6	4	6	3	4	3	4	4	5	5	4	7
3	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
478	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
479	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
480	4	6	6	5	5	6	4	5	5	7	5	6	7	5	5	5	5	5
481	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
482	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
483	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
484	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Standar Deviasi (SD); Standar Acuan Signifikansi (SAS) 61,0-2,0 Sebagai Uji Signifikansi; Bobot dinamis 20%																		
StandDev	2,01	2,38	2,34	2,95	2,42	2,23	2,46	2,34	2,37	2,33	2,26	2,11	2,55	2,37	2,26	2,38	2,25	2,13
SAS SD	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0	1,0-2,0
Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan	Signifikan

Gambar 3.10 : Grafik Data Standar Deviasi (SD)

Standar Acuan Signifikansi (SAS) untuk kategori **Standar Deviasi (SD)** ditetapkan pada rentang **1,0–2,0**, yang berfungsi sebagai batas statistik untuk menilai tingkat stabilitas dan konsistensi sebaran penilaian responden terhadap indikator-indikator kinerja. Dalam kerangka pengukuran **Indeks Kinerja Ormas (IKO)**, SD digunakan untuk menguji apakah variasi skor responden masih berada dalam batas kewajaran, sehingga nilai rata-rata (mean) variabel Xi dapat dianggap merepresentasikan persepsi kolektif yang relatif stabil.

Berdasarkan hasil evaluasi **Dynamic Measurement Model (DyMM)**, dari total **18 indikator** yang diuji pada komponen SD, **tidak terdapat satu pun indikator (0/18) yang memenuhi kriteria signifikansi sesuai SAS SD**. Seluruh nilai standar deviasi berada di luar rentang acuan yang ditetapkan, sehingga seluruh indikator dikategorikan **tidak signifikan secara statistik** dalam konteks stabilitas persepsi responden.

Temuan ini menunjukkan bahwa sebaran penilaian responden pada seluruh indikator masih relatif **tinggi dan bervariasi**, sehingga tingkat homogenitas persepsi publik belum terbentuk secara memadai. Dengan kata lain, meskipun nilai rata-rata (mean) pada banyak variabel relatif baik, penilaian responden belum konsisten dan masih menunjukkan perbedaan pandangan yang cukup lebar antarindividu.

Dalam struktur pembobotan IKO, komponen **Standar Deviasi (SD)** memiliki bobot sebesar **20%**. Dengan capaian **0 indikator signifikan**, maka perhitungan skor SD adalah sebagai berikut:

$$\text{Skor SD} = (0/18) \times 20 = 0$$

Nilai ini mengindikasikan bahwa aspek stabilitas persepsi **belum memberikan kontribusi** terhadap pembentukan skor DyMM. Secara metodologis, kondisi ini menandakan bahwa hasil pengukuran DyMM masih sangat dipengaruhi oleh **keragaman persepsi responden**, dan belum mencerminkan konsensus publik yang stabil pada seluruh indikator kinerja.

Secara substantif, tidak terpenuhinya indikator signifikan pada aspek SD tidak serta-merta menunjukkan lemahnya kinerja Ormas ASBADATA. Sebaliknya, temuan ini lebih merefleksikan bahwa pengalaman, eksposur, dan pemahaman responden terhadap aktivitas organisasi masih **heterogen**. Variasi tersebut dapat bersumber dari perbedaan intensitas interaksi dengan program organisasi, ketimpangan jangkauan kegiatan, maupun perbedaan interpretasi responden terhadap redaksi indikator yang digunakan.

Dari sudut pandang metodologis, hasil ini merupakan **sinyal diagnostik yang penting** dalam kerangka DyMM. Ketidaksignifikanan seluruh indikator SD menunjukkan bahwa meskipun persepsi rata-rata terlihat positif, **stabilitas dan konsistensi persepsi publik belum terkonsolidasi**. Dengan demikian, DyMM berfungsi secara tepat sebagai instrumen peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi overestimasi kinerja apabila analisis hanya bertumpu pada nilai rata-rata semata.

Oleh karena itu, capaian pada aspek SD perlu ditafsirkan secara **proporsional dan konstruktif**. Nilai nol pada komponen SD menegaskan perlunya:

1. penajaman dan penyederhanaan redaksi indikator,
2. peningkatan literasi responden terhadap makna setiap indikator, serta
3. penguatan pemerataan pengalaman responden terhadap program dan aktivitas organisasi.

Pada pengukuran selanjutnya, kualitas aspek SD diharapkan dapat meningkat melalui sosialisasi instrumen yang lebih intensif, desain indikator yang lebih operasional, serta triangulasi yang lebih kuat dengan komponen DyMM lainnya (SSP, PRMR, KRP, serta K&K), sehingga hasil pengukuran IKO menjadi lebih stabil, objektif, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

3.4.3 Proporsi Responden Menilai Rendah (PRMR)

IKO: Dynamic Measurement Model (DyMM)																		
Asosiasi Bawi Dayak Budaya dan Wisata (ASBADATA): Provinsi Kalimantan Tengah 2025																		
Kesesuaian Visi Misi Tujuan dengan Pembangunan						D2: Partisipasi dan Kepuasan Masyarakat						D3: Keberlanjutan dan Inovasi						
Variabel X1 (15,0%)			Variabel X2 (10,0%)			Variabel X3 (20%)			Variabel X4 (20%)			Variabel X5 (15,0%)			Variabel X6 (20%)			
No. Responden	X1.1	X1.2	X1.3	X2.1	X2.2	X2.3	X3.1	X3.2	X3.3	X4.1	X4.2	X4.3	X5.1	X5.2	X5.3	X6.1	X6.2	X6.3
1	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
2	4	3	1	3	4	4	6	4	6	3	4	3	4	4	5	5	4	7
3	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
478	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
479	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
480	4	6	6	5	5	6	4	5	5	7	5	6	7	5	5	5	5	5
481	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
482	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
483	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
484	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Proporsi Responden Menilai Rendah (PRMR); Standar Acuan Signifikansi (SAS) 10% Mak ; Bobot dinamis 20%																		
Skor PRMR			11,98%			9,71%			11,78%			9,91%			11,57%			8,88%
SAS PRMR			10%			10%			10%			10%			10%			10%
Signifikan			Signifika			Signifika			Signifika			Signifika			Signifika			Signifika

Gambar 3.11 : Grafiks Data Proporsi Responden Menilai Rendah (PRMR)

Pada kategori **PRMR (Proporsi Responden Menilai Rendah)**, analisis difokuskan untuk mengidentifikasi sejauh mana responden memberikan penilaian rendah terhadap indikator-indikator kinerja Ormas ASBADATA. Dalam kerangka **Dynamic Measurement Model (DyMM)**, PRMR berfungsi sebagai instrumen kontrol kritis untuk mendeteksi potensi ketidakpuasan laten yang tidak selalu tercermin dalam nilai rata-rata skor. Dengan demikian, PRMR menjadi komponen penting untuk membaca risiko persepsi negatif dan potensi kerentanan sosial terhadap kinerja organisasi.

Berdasarkan **Standar Acuan Signifikansi (SAS) PRMR**, ditetapkan **6 titik penilaian**, yang masing-masing merepresentasikan indikator kunci pada dimensi kinerja yang diukur. Setiap indikator diuji untuk memastikan bahwa proporsi responden yang memberikan skor rendah masih berada dalam batas toleransi yang dapat diterima secara metodologis dan sosial.

Hasil pengukuran **DyMM** menunjukkan bahwa **3 dari 6 indikator (3/6)** dinyatakan **memenuhi kriteria signifikansi** sesuai SAS PRMR, sementara **3 indikator lainnya tidak signifikan**. Artinya, hanya pada setengah indikator yang diuji, proporsi responden yang memberikan penilaian rendah benar-benar berada pada tingkat yang sangat terbatas dan terkendali. Sementara itu, pada separuh indikator lainnya, proporsi penilaian rendah masih relatif lebih tinggi sehingga belum memenuhi ambang signifikansi yang ditetapkan.

Secara substantif, capaian **3/6 indikator signifikan** menunjukkan bahwa persepsi negatif terhadap kinerja Ormas ASBADATA **tidak bersifat menyeluruh**, namun juga belum

sepenuhnya terkonsolidasi sebagai kondisi yang stabil. Ketidaksignifikanan pada sebagian indikator mengindikasikan adanya **kantong-kantong persepsi kritis** pada aspek tertentu, yang berpotensi bersumber dari perbedaan pengalaman responden, variasi kualitas implementasi program, atau ketimpangan jangkauan kegiatan organisasi di lapangan.

Dalam struktur pembobotan IKO, komponen **PRMR memiliki bobot sebesar 20%**. Dengan capaian **3 indikator signifikan**, maka skor PRMR dihitung sebagai berikut:

$$\text{Skor PRMR} = (3/6) \times 20 = 10$$

Nilai ini menunjukkan bahwa kontribusi PRMR terhadap pembentukan skor DyMM berada pada **tingkat menengah**, dan belum memberikan penguatan maksimal terhadap stabilitas hasil pengukuran. Dengan kata lain, meskipun tidak ditemukan dominasi persepsi negatif yang sistematis, masih terdapat ruang perbaikan untuk menekan proporsi penilaian rendah pada indikator-indikator tertentu.

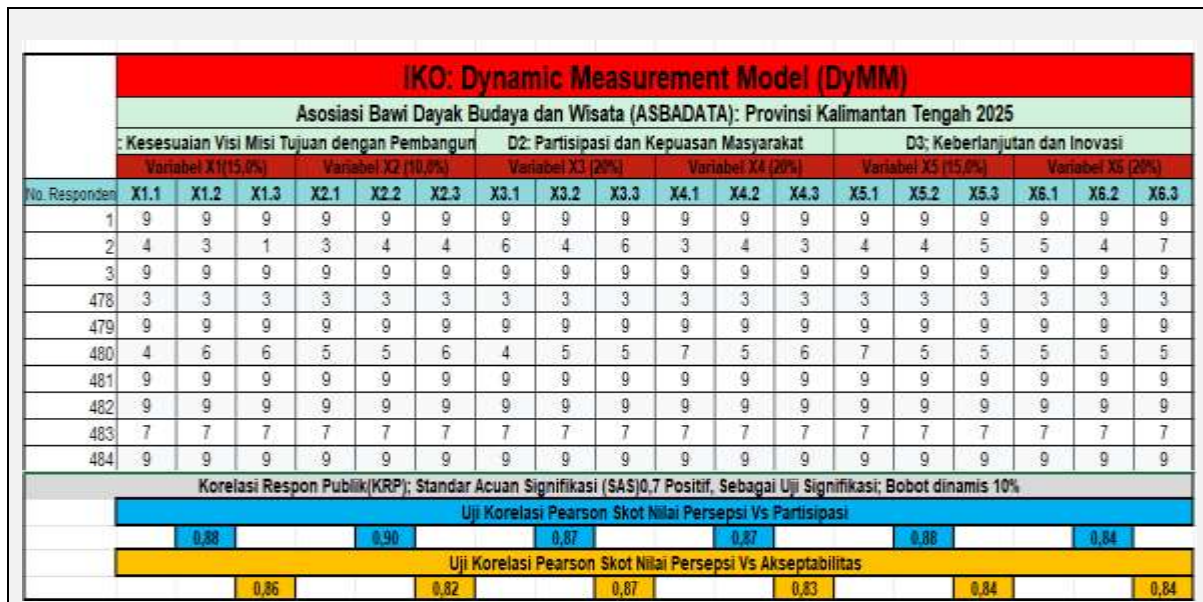
Dari sudut pandang metodologis, temuan ini mempertegas fungsi PRMR sebagai **alat deteksi risiko sosial** dalam DyMM. Perbedaan capaian antarindikator menunjukkan bahwa skor rata-rata yang relatif baik masih menyembunyikan variasi persepsi kritis pada sebagian aspek kinerja. Oleh karena itu, hasil PRMR perlu dibaca secara komplementer dengan komponen DyMM lainnya, terutama **Standar Deviasi (SD)** yang menunjukkan tingkat heterogenitas persepsi responden.

Ke depan, peningkatan capaian PRMR dapat dilakukan melalui:

1. penguatan kualitas dan konsistensi implementasi program pada indikator yang belum signifikan,
2. pemerataan pengalaman responden terhadap aktivitas organisasi, serta
3. penguatan mekanisme umpan balik dan respons organisasi terhadap keluhan atau kritik masyarakat.

Dengan langkah tersebut, proporsi penilaian rendah diharapkan dapat ditekan secara lebih merata, sehingga PRMR pada pengukuran berikutnya dapat memberikan kontribusi yang lebih kuat terhadap stabilitas dan kredibilitas hasil **IKO DyMM**.

3.4.4 Korelasi Respon Publik (KRP)



Gambar 3.12 : Grafiks Data Korelasi Respon Publik (KRP)

Kategori **Korelasi Respon Publik (KRP)** terdiri atas **12 titik penilaian** yang dirancang untuk menguji tingkat konsistensi, kewajaran, dan koherensi pola respons masyarakat terhadap kinerja Ormas ASBADATA. Setiap titik penilaian merepresentasikan hubungan antarvariabel utama dalam kerangka PPA, yaitu **persepsi, partisipasi, dan akseptabilitas**, yang dianalisis melalui pendekatan korelasional. Tujuan utama pengujian KRP adalah memastikan bahwa respons yang diberikan responden bersifat saling menguatkan secara logis, searah, dan tidak menunjukkan pola ekstrem, kontradiktif, maupun acak. Dalam sistem pengukuran IKO, KRP berfungsi sebagai **mekanisme kontrol kualitas (quality control)** yang krusial untuk menjamin integritas analitis data persepsi publik.

Hasil evaluasi DyMM menunjukkan bahwa **seluruh 12 dari 12 titik penilaian (12/12)** dinyatakan **memenuhi kriteria signifikansi** sesuai Standar Acuan Signifikansi (SAS) yang telah ditetapkan. Temuan ini mengindikasikan bahwa hubungan antarrespons publik bersifat **konsisten, searah, dan koheren** di seluruh indikator yang diuji. Dengan demikian, persepsi, partisipasi, dan akseptabilitas yang diungkapkan responden membentuk pola penilaian yang logis dan saling mendukung, tanpa indikasi distorsi struktural atau inkonsistensi antarvariabel.

Secara substantif, capaian 12/12 signifikan pada KRP mencerminkan bahwa responden memiliki tingkat pemahaman yang relatif baik terhadap indikator-indikator yang diukur, serta mampu memberikan penilaian secara konsisten di berbagai aspek kinerja organisasi. Kondisi ini juga menegaskan bahwa instrumen pengukuran IKO telah berfungsi secara efektif dalam menangkap relasi antarvariabel PPA, sehingga memperkuat **validitas konstruk** dan **reliabilitas internal** data yang dihasilkan.

Dalam struktur pembobotan IKO, kategori **KRP memiliki bobot sebesar 10%**. Dengan terpenuhinya seluruh titik penilaian signifikan, maka skor KRP dihitung secara maksimal sebagai berikut:

$$\text{Skor KRP} = (12/12) \times 10 = 10$$

Nilai ini menunjukkan bahwa aspek korelasi respon publik memberikan kontribusi **penuh** terhadap skor total IKO, sekaligus menegaskan bahwa data persepsi publik yang terkumpul memiliki tingkat kualitas yang sangat baik dan layak digunakan sebagai dasar analisis lanjutan, baik pada level dimensi maupun indeks komposit.

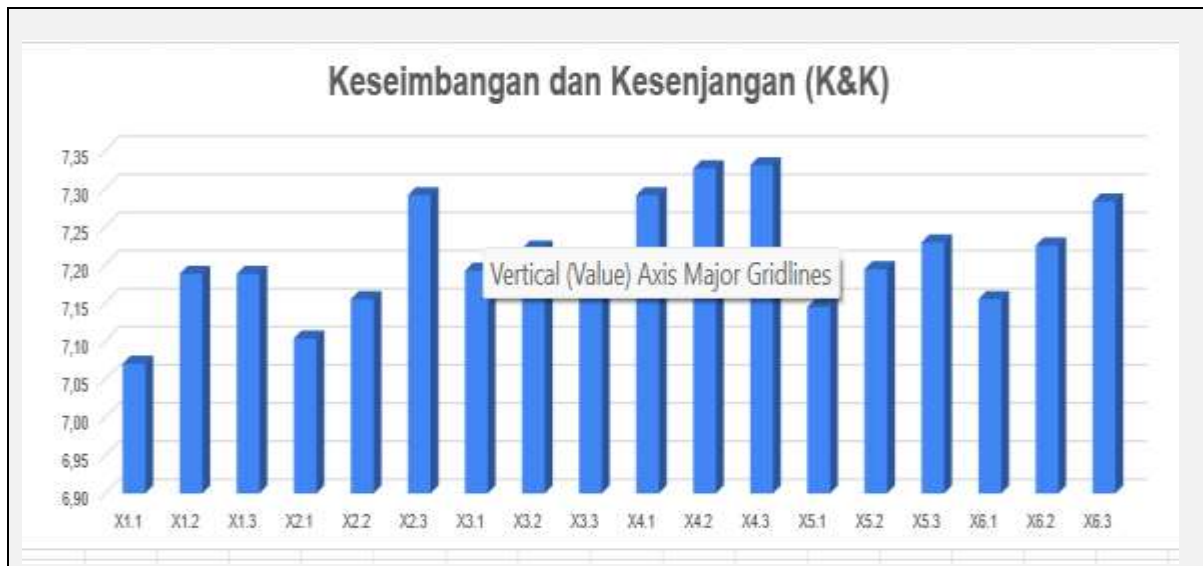
Meskipun capaian maksimal pada KRP merupakan indikator metodologis yang sangat positif, hasil ini tetap perlu diposisikan secara proporsional sebagai **baseline awal**. Pada pengukuran berikutnya, konsistensi korelasi antarvariabel perlu terus dijaga melalui pemeliharaan kualitas instrumen, penyempurnaan indikator bila diperlukan, serta validasi berkelanjutan agar integritas pengukuran IKO tetap terpelihara dan semakin kuat dalam merefleksikan dinamika persepsi publik dari waktu ke waktu.

3.4.5 Keseimbangan dan Kesenjangan (K&K)

Dalam kerangka analisis IKO, **keseimbangan** didefinisikan sebagai kondisi ketika nilai **Persepsi > Partisipasi > Akseptabilitas**. Pola ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja ormas berada pada tingkat tertinggi, diikuti oleh tingkat partisipasi mereka, dan kemudian akseptabilitas. Urutan demikian dianggap ideal karena menunjukkan bahwa masyarakat terlebih dahulu memiliki persepsi positif, kemudian terdorong berpartisipasi, dan pada akhirnya mampu menerima serta mengakui peran ormas secara realistis. Keseimbangan ini mencerminkan dinamika sosial yang sehat dalam hubungan antara ormas dengan publik.

Sebaliknya, kondisi **kesenjangan** terjadi apabila selisih antara nilai **Partisipasi dan Akseptabilitas** melebihi ambang **0,5**. Jika Partisipasi jauh lebih tinggi dibandingkan Akseptabilitas, hal tersebut mengindikasikan bahwa meskipun masyarakat terlibat dalam kegiatan ormas, mereka belum sepenuhnya menganggap kinerja ormas sesuai dengan harapan atau kebutuhan mereka. Kesenjangan semacam ini juga dapat menandakan adanya ketidaksesuaian antara pengalaman langsung responden saat berpartisipasi dengan pemaknaan mereka terhadap dampak atau manfaat dari aktivitas ormas.

Interpretasi terhadap kesenjangan ini sangat penting karena dapat menjadi indikasi awal adanya masalah struktural atau komunikasi dalam organisasi. Kesenjangan yang tinggi biasanya membutuhkan perhatian lebih dari sisi internal ormas, seperti penyesuaian program, transparansi kinerja, atau peningkatan kualitas pelayanan. Sementara itu, keseimbangan menunjukkan bahwa ormas telah berhasil membangun persepsi positif, mendorong partisipasi, dan menciptakan penerimaan publik secara proporsional. Dengan demikian, analisis keseimbangan dan kesenjangan menjadi alat penting untuk mengukur kualitas hubungan ormas dengan masyarakat serta arah perbaikan yang perlu dilakukan.



Gambar 3.13 : Grafik Data Keseimbangan dan Kesenjangan (K&K)

Kategori **Keseimbangan dan Kesenjangan (K&K)** digunakan untuk mengevaluasi keterpaduan hubungan antara **Persepsi, Partisipasi, dan Akseptabilitas** pada setiap indikator kinerja. Dalam kerangka **Dynamic Measurement Model (DyMM)**, K&K berfungsi untuk menilai apakah ketiga komponen tersebut membentuk pola yang ideal—yakni **Persepsi > Partisipasi > Akseptabilitas**, serta tidak menunjukkan kesenjangan berlebihan antara Partisipasi dan Akseptabilitas (selisih $\leq 0,5$). Ketidakterpenuhan pola ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan yang dapat mencerminkan masalah implementasi atau penerimaan program di tingkat faktual.

Berdasarkan hasil pengukuran, dari total **12 titik penilaian**, terdapat **6 titik (6/12)** yang **memenuhi kriteria keseimbangan** sesuai Standar Acuan Signifikansi K&K, sementara **6 titik lainnya belum memenuhi kriteria**. Artinya, hanya separuh indikator yang menunjukkan hubungan yang harmonis antara persepsi, partisipasi, dan akseptabilitas, sedangkan separuh lainnya masih memperlihatkan pola yang timpang atau kesenjangan yang relatif besar, khususnya antara dimensi partisipasi dan akseptabilitas.

Proporsi **6/12 indikator signifikan** menunjukkan bahwa keseimbangan antar dimensi kinerja Ormas ASBADATA **belum terbentuk secara merata**. Pada indikator-indikator yang signifikan, persepsi positif masyarakat diikuti oleh tingkat partisipasi yang proporsional serta penerimaan yang relatif konsisten. Sebaliknya, pada indikator yang belum signifikan, terlihat adanya kondisi di mana partisipasi masyarakat relatif tinggi namun tidak sepenuhnya diimbangi oleh tingkat akseptabilitas, atau persepsi yang baik belum sepenuhnya terkonversi menjadi penerimaan yang stabil dalam realitas pelaksanaan program.

Dalam struktur pembobotan IKO, kategori **K&K memiliki bobot sebesar 10%**. Dengan capaian 6 indikator signifikan, maka skor K&K dihitung sebagai berikut:

$$\text{Skor K\&K} = (6/12) \times 10 = 5,00$$

Nilai ini menunjukkan bahwa kontribusi K&K terhadap total skor IKO berada pada **kategori menengah**, dan belum memberikan penguatan optimal terhadap stabilitas dan koherensi hasil pengukuran. Skor tersebut menegaskan bahwa meskipun sebagian indikator telah berada dalam kondisi yang relatif harmonis, masih terdapat kesenjangan struktural yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Secara substantif, temuan K&K ini menjadi sinyal penting bagi organisasi. Ketidakseimbangan antara persepsi, partisipasi, dan akseptabilitas dapat mengindikasikan bahwa keterlibatan masyarakat belum sepenuhnya diiringi oleh pengalaman dan penerimaan yang konsisten terhadap dampak program. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko penurunan kepercayaan apabila tidak ditangani secara sistematis.

Oleh karena itu, hasil K&K perlu ditindaklanjuti melalui:

1. peningkatan kualitas implementasi program pada indikator yang belum seimbang,
2. penguatan komunikasi publik agar ekspektasi dan realitas program lebih selaras, serta
3. penyesuaian desain kegiatan agar partisipasi masyarakat benar-benar menghasilkan pengalaman yang bernilai dan dapat diterima secara luas.

Dengan langkah tersebut, diharapkan pada pengukuran berikutnya, proporsi indikator yang memenuhi kriteria keseimbangan dapat meningkat, sehingga **K&K tidak hanya berfungsi sebagai alat diagnosis**, tetapi juga sebagai pendorong perbaikan berkelanjutan dalam kinerja Ormas ASBADATA.

3.4.6 Skor IKO DyMM

Skor Indeks Kinerja Ormas berbasis **Dynamic Measurement Model (DyMM)** dihitung dengan menjumlahkan seluruh komponen evaluasi yang bersifat *dynamic*, yaitu **SSP, SD, PRMR, KRP, dan K&K**. Kelima komponen ini mewakili aspek sistem (SSP), stabilitas sebaran persepsi (SD), proporsi penilaian rendah (PRMR), konsistensi respons publik (KRP), serta hubungan keseimbangan persepsi–partisipasi–akseptabilitas (K&K). Model DyMM memberikan pandangan yang lebih dalam tentang dinamika persepsi responden dan kualitas tata kelola ormas, karena tidak hanya menilai capaian teknis, tetapi juga stabilitas dan koherensi penilaian.

Berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya, nilai masing-masing komponen adalah sebagai berikut: **SSP = 40, SD ≈ 0, PRMR = 10, KRP = 10**, dan **K&K ≈ 5**. Dengan demikian, perhitungan indeks DyMM dilakukan menggunakan formula:

$$\begin{aligned}\text{Skor IKO DyMM} &= \text{SSP} + \text{SD} + \text{PRMR} + \text{KRP} + \text{K\&K} \\ &= 40 + 0 + 10 + 10 + 5 \\ &\approx 65,0\end{aligned}$$

Hasil ini menunjukkan bahwa skor DyMM berada pada kategori **moderat**, mencerminkan

bahwa ormas memiliki konsistensi sistem, stabilitas penilaian, dan persepsi publik yang relatif positif.

Secara interpretatif, skor DyMM sebesar **≈65,0** menggambarkan kondisi organisasi yang kuat pada aspek sistem dan persepsi publik, meskipun masih terdapat ruang perbaikan pada kategori stabilitas persepsi (SD) dan keseimbangan dinamika persepsi–partisipasi–akseptabilitas (K&K). DyMM memberikan perspektif yang lebih realistis dibandingkan DMM karena memasukkan unsur variabilitas dan kestabilan penilaian. Dengan demikian, skor DyMM dapat digunakan sebagai acuan dalam merumuskan prioritas penguatan ormas, terutama untuk meningkatkan literasi responden, memperbaiki kualitas partisipasi, dan memastikan bahwa akseptabilitas publik terus berkembang secara proporsional.

3.5 Data Usul Saran dan Kritik (DUSK)

Data Usul Saran dan Kritik (DUSK) merupakan komponen kualitatif yang sangat penting dalam proses pengukuran Indeks Kinerja Ormas (IKO). Berbeda dengan data kuantitatif yang memotret kecenderungan angka dan pola persepsi, DUSK memberikan ruang bagi responden untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, dan rekomendasi mereka secara bebas. Informasi yang muncul dari DUSK tidak dibatasi oleh struktur indikator Xi maupun skala penilaian, sehingga data ini mencerminkan suara publik yang lebih natural dan kontekstual mengenai kinerja dan eksistensi ormas di masyarakat.

Kelompok data ini memuat berbagai bentuk masukan, mulai dari pengakuan publik atas kelebihan organisasi, kritik terhadap kelemahan program, harapan terhadap perbaikan tata kelola, hingga pengalaman langsung yang tidak terekam dalam instrumen survei kuantitatif. Oleh karena itu, DUSK menjadi sumber informasi kaya yang dapat mengungkap realitas lapangan yang mungkin tidak terlihat pada skor DMM atau DyMM. Komentar-komentar ini sering kali mengungkap faktor sosial, emosional, maupun struktural yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap ormas, sehingga menjadi bahan refleksi penting bagi pengambilan keputusan.

DUSK memegang peranan kunci dalam proses **triangulasi data**, yaitu metode untuk menguji konsistensi dan validitas antara temuan kuantitatif dan kualitatif. Melalui triangulasi, hasil skor persepsi (PPA), nilai dimensi, dan indeks IKO dapat diuji kembali menggunakan narasi publik yang lebih mendalam. Misalnya, sekalipun skor kuantitatif menunjukkan nilai tinggi, DUSK dapat mengungkapkan adanya ketidakpuasan pada aspek tertentu yang tidak tertangkap oleh indikator Xi. Sebaliknya, masukan positif dalam DUSK bisa menjelaskan alasan mengapa persepsi publik begitu tinggi pada beberapa variabel. Dengan demikian, DUSK memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa analisis IKO bersifat komprehensif dan tidak bias.

Selain fungsi verifikasi, DUSK juga menjadi dasar untuk merumuskan **rekomendasi kebijakan** dan **program penguatan ormas**. Setiap kritik dan saran yang muncul dapat diarahkan menjadi rencana tindak lanjut yang lebih responsif, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan

masyarakat. Melalui pemanfaatan DUSK, pemerintah daerah, pembina ormas, dan organisasi itu sendiri dapat memperoleh gambaran nyata tentang prioritas perbaikan, hambatan di lapangan, serta peluang pengembangan kapasitas ke depan. Oleh karena itu, keberadaan data kualitatif DUSK bukan sekadar pelengkap, melainkan salah satu fondasi utama dalam analisis holistik pengukuran kinerja ormas.

3.5.1 Resume Perbaikan Dimensi D1

Berikut 5 poin resume perbaikan Dimensi S1 yang dirumuskan berdasarkan temuan DUSK (Data Usul, Saran, dan Kritik), dengan pendekatan **diagnostik–operasional** dan konsisten dengan pola analisis IKO:

Resume Perbaikan Dimensi S1 (berdasarkan DUSK)

1. Penguatan Kejelasan Implementasi di Tingkat Lapangan

DUSK menunjukkan bahwa sebagian kritik muncul karena adanya kesenjangan antara pernyataan kebijakan/arrah organisasi dengan pengalaman nyata masyarakat. Oleh karena itu, perbaikan Dimensi S1 perlu diarahkan pada penegasan implementasi konkret di tingkat lapangan, agar apa yang dipahami masyarakat tidak berhenti pada narasi normatif, tetapi tercermin dalam aktivitas yang benar-benar dirasakan.

2. Peningkatan Konsistensi Antarwilayah dan Antarunit

Variasi tanggapan dalam DUSK mengindikasikan bahwa pengalaman masyarakat terhadap kinerja organisasi belum merata. Hal ini menuntut adanya standarisasi minimal pelaksanaan kegiatan dan layanan pada Dimensi S1, sehingga kualitas pengalaman publik tidak sangat bergantung pada lokasi, individu pengurus, atau momentum kegiatan tertentu.

3. Perbaikan Pola Komunikasi dan Sosialisasi Substansi

Sejumlah masukan DUSK mencerminkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami substansi, tujuan, maupun manfaat dari aspek yang diukur dalam Dimensi S1. Oleh karena itu, organisasi perlu memperbaiki cara komunikasi—bukan hanya meningkatkan intensitas sosialisasi, tetapi juga menyederhanakan pesan, menggunakan bahasa kontekstual, dan menyesuaikan kanal komunikasi dengan karakter sasaran.

4. Penguatan Mekanisme Umpan Balik dan Respons Organisasi

Kritik dalam DUSK menunjukkan bahwa sebagian responden belum melihat adanya tindak lanjut yang jelas atas masukan atau keluhan sebelumnya. Untuk

memperbaiki Dimensi S1, diperlukan mekanisme umpan balik yang lebih terbuka dan responsif, sehingga masyarakat merasakan bahwa penilaian dan pengalaman mereka benar-benar diperhatikan dan diintegrasikan dalam perbaikan kinerja.

5. Pendekatan Berbasis Pengalaman (Experience-Based Improvement)

Temuan DUSK menegaskan bahwa persepsi negatif atau moderat pada Dimensi S1 lebih sering bersumber dari pengalaman langsung, bukan dari sikap ideologis atau penolakan prinsipil. Oleh karena itu, strategi perbaikan perlu difokuskan pada peningkatan kualitas pengalaman masyarakat—mulai dari proses interaksi, kemudahan akses, hingga dampak yang dirasakan—agar persepsi positif terbentuk secara alami dan berkelanjutan.

3.5.2 Resume Perbaikan Dimensi D2

Berikut **Resume Perbaikan Dimensi D2 (Partisipasi dan Kepuasan Masyarakat)** yang dirumuskan **berdasarkan temuan DUSK**, dengan fokus pada aspek partisipatif, pengalaman warga, dan kualitas keterlibatan nyata:

Resume Perbaikan Dimensi D2 (berdasarkan DUSK)

1. Peningkatan Kualitas Partisipasi, bukan Sekadar Kuantitas

Temuan DUSK menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat pada sebagian kegiatan masih bersifat formalistik atau insidental. Perbaikan Dimensi D2 perlu diarahkan pada peningkatan kualitas partisipasi, yaitu keterlibatan yang bermakna, berkelanjutan, dan memberi ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi secara aktif, bukan sekadar hadir sebagai peserta.

2. Penguatan Akses dan Inklusivitas Kegiatan

Sejumlah saran dan kritik dalam DUSK mengindikasikan bahwa tidak semua kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat. Oleh karena itu, organisasi perlu memperluas jangkauan partisipasi dengan pendekatan yang lebih inklusif, baik dari sisi wilayah, kelompok usia, gender, maupun latar belakang sosial, sehingga partisipasi tidak terpusat pada kelompok tertentu saja.

3. Peningkatan Kepuasan melalui Dampak Nyata Kegiatan

Kepuasan masyarakat dalam Dimensi D2 sangat terkait dengan sejauh mana kegiatan organisasi menghasilkan manfaat yang dirasakan langsung. DUSK menunjukkan bahwa sebagian responden belum merasakan dampak konkret dari partisipasi mereka. Hal ini menuntut perbaikan desain program agar setiap kegiatan memiliki output dan outcome yang jelas serta relevan dengan kebutuhan masyarakat.

4. **Penguatan Mekanisme Aspirasi dan Tindak Lanjut**

Masukan DUSK memperlihatkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya melihat hubungan antara partisipasi mereka dengan perubahan atau keputusan organisasi. Untuk meningkatkan kepuasan, organisasi perlu memastikan bahwa aspirasi, usulan, dan kritik yang disampaikan melalui partisipasi masyarakat ditindaklanjuti secara nyata dan dikomunikasikan kembali sebagai bentuk akuntabilitas.

5. **Penyelarasan Ekspektasi dan Pengalaman Partisipan**

Perbedaan antara harapan masyarakat dan pengalaman aktual dalam berpartisipasi menjadi salah satu sumber ketidakpuasan yang terekam dalam DUSK. Oleh karena itu, perbaikan Dimensi D2 perlu mencakup pengelolaan ekspektasi sejak awal—melalui penjelasan tujuan kegiatan, peran peserta, dan batasan program—agar pengalaman partisipasi lebih sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

3.5.2 Resume Perbaikan Dimensi D3

Berikut **Resume Perbaikan Dimensi D3 (Keberlanjutan dan Inovasi Organisasi)** yang dirumuskan **berdasarkan temuan DUSK**, dengan penekanan pada keberlanjutan dampak, kapasitas adaptif, dan pembaruan organisasi:

Resume Perbaikan Dimensi D3 (berdasarkan DUSK)

1. **Penguatan Keberlanjutan Program Pasca-Kegiatan**

Temuan DUSK menunjukkan bahwa sebagian program dipersepsikan berhenti pada tahap pelaksanaan tanpa tindak lanjut yang jelas. Perbaikan Dimensi D3 perlu diarahkan pada perancangan program berkelanjutan, dengan mekanisme pasca-kegiatan yang terstruktur, sehingga dampak kegiatan tidak bersifat sesaat, tetapi terus dirasakan oleh masyarakat.

2. **Peningkatan Kapasitas Inovasi Berbasis Kebutuhan Nyata**

Kritik dan saran dalam DUSK mengindikasikan bahwa inovasi organisasi masih terbatas atau belum sepenuhnya menjawab kebutuhan aktual masyarakat. Oleh karena itu, inovasi dalam Dimensi D3 perlu lebih berbasis pada masalah nyata di lapangan, hasil pembelajaran program sebelumnya, serta masukan langsung dari masyarakat sebagai pengguna manfaat.

3. **Penguatan Sistem Pembelajaran dan Evaluasi Internal**

DUSK mencerminkan bahwa organisasi belum sepenuhnya memanfaatkan pengalaman dan umpan balik sebagai bahan pembelajaran berkelanjutan.

Perbaikan Dimensi D3 menuntut penguatan sistem evaluasi internal yang rutin dan terstruktur, sehingga setiap kegiatan menjadi sumber pengetahuan untuk meningkatkan kualitas program dan strategi organisasi di masa depan.

4. Diversifikasi Sumber Daya dan Kemitraan Strategis

Sejumlah masukan DUSK menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap ketergantungan pada sumber daya tertentu, baik dari sisi pendanaan maupun aktor pelaksana. Untuk menjamin keberlanjutan, organisasi perlu memperluas jejaring kemitraan dan sumber daya—baik dengan pemerintah, sektor swasta, maupun komunitas—serta mengembangkan skema pendanaan dan dukungan yang lebih variatif.

5. Penguatan Adaptabilitas terhadap Perubahan Sosial

Perubahan kebutuhan masyarakat dan dinamika sosial menuntut organisasi untuk lebih adaptif. DUSK mengindikasikan bahwa sebagian program belum sepenuhnya responsif terhadap perubahan tersebut. Oleh karena itu, perbaikan Dimensi D3 perlu menekankan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan desain program, metode kerja, dan pendekatan inovasi agar tetap relevan dan berdaya guna dalam jangka panjang.

3.6 Temuan Kunci dan Implikasi Hasil Kajian IKO ASBADATA

Temuan Kunci (Kategori Baik – Sangat Baik)

Persepsi Publik terhadap ASBADATA Cenderung Positif dan Relatif Konsisten

Hasil pengukuran Persepsi, Partisipasi, dan Akseptabilitas (PPA), baik pada tingkat variabel (Xi) maupun dimensi (Di), menunjukkan nilai rerata yang berada pada kategori cukup baik hingga baik. Temuan ini mengindikasikan bahwa ASBADATA dipersepsikan sebagai organisasi yang memiliki legitimasi sosial dan tingkat penerimaan publik yang memadai. Konsistensi nilai rerata antarvariabel juga menunjukkan bahwa persepsi positif tersebut relatif stabil dan tidak hanya muncul pada kelompok responden tertentu.

1. Pola Sebaran Penilaian Menunjukkan Keseragaman Persepsi Responden

Analisis sebaran penilaian memperlihatkan bahwa variasi skor responden relatif terbatas. Kondisi ini mencerminkan adanya kesepahaman umum masyarakat dalam menilai kinerja ASBADATA, yang dapat diartikan sebagai keberhasilan organisasi dalam membangun citra dan posisi sosial yang relatif seragam. Namun demikian, keseragaman ini juga menandakan bahwa penilaian responden masih bersifat agregatif dan belum sepenuhnya mencerminkan diferensiasi kritis antarindikator kinerja.

2. Keselarasan Visi dan Misi dengan Pembangunan Nasional Dinilai Kuat secara Konseptual

Dimensi D1 memperoleh capaian skor yang relatif lebih tinggi dibandingkan dimensi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa visi, misi, dan tujuan ASBADATA dipahami sebagai sejalan dengan arah pembangunan nasional, khususnya dalam konteks nilai kebangsaan, sosial, dan kemasyarakatan. Meski demikian, temuan DUSK dan analisis lanjutan menunjukkan bahwa keselarasan ini masih dominan dipersepsikan pada tataran normatif, sementara bukti implementatif dalam bentuk program yang terukur dan terdokumentasi belum sepenuhnya terartikulasikan secara luas di mata publik.

3. Partisipasi dan Akseptabilitas Masih Didominasi oleh Penilaian Normatif

Dimensi D2 (Partisipasi) dan D3 (Akseptabilitas) menunjukkan skor yang relatif baik, namun pola penilaiannya mengindikasikan kecenderungan normatif. Partisipasi kerap dimaknai sebagai dukungan umum atau kehadiran simbolik, tanpa perbedaan yang jelas antara keterlibatan pasif dan kontribusi aktif yang substantif. Demikian pula, akseptabilitas lebih banyak mencerminkan penerimaan terhadap citra dan niat baik organisasi, dibandingkan penilaian empiris atas dampak nyata kegiatan di lapangan.

4. Stabilitas Persepsi Belum Terbentuk Secara Merata pada Seluruh Indikator

Hasil pengujian Standar Acuan Signifikansi (SAS) pada komponen Standar Deviasi menunjukkan bahwa tidak semua indikator memiliki tingkat stabilitas persepsi yang memadai. Temuan ini mengindikasikan adanya variasi pemahaman responden terhadap indikator tertentu, yang dapat dipengaruhi oleh redaksi instrumen, perbedaan literasi indikator, maupun keragaman pengalaman responden. Oleh karena itu, hasil DyMM perlu dibaca sebagai alat diagnosis kinerja dan metodologi, bukan sekadar ukuran capaian numerik.

5. Hubungan Persepsi, Partisipasi, dan Akseptabilitas Bersifat Koheren

Seluruh titik Korelasi Respon Publik (KRP) dinyatakan signifikan, yang menunjukkan bahwa hubungan antara persepsi, partisipasi, dan akseptabilitas bersifat konsisten dan searah. Temuan ini memperkuat validitas struktural pengukuran IKO ASBADATA, sekaligus menunjukkan bahwa responden menilai kinerja organisasi secara koheren lintas variabel, di mana persepsi positif cenderung diikuti oleh penilaian partisipasi dan akseptabilitas yang juga relatif tinggi.

Implikasi Hasil Kajian IKO ASBADATA

1. Transformasi Persepsi Positif Menjadi Kinerja Berbasis Dampak

Persepsi publik yang relatif baik perlu diterjemahkan ke dalam kinerja organisasi yang berorientasi pada outcome dan dampak nyata. Hal ini menuntut penguatan perencanaan program, kejelasan sasaran manfaat, serta dokumentasi kontribusi nyata ASBADATA bagi masyarakat dan pembangunan.

2. Penguatan Literasi Instrumen dan Ketajaman Penilaian Responden

Keseragaman penilaian menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman responden

terhadap perbedaan konseptual antarvariabel dan dimensi pengukuran. Literasi instrumen yang lebih baik diharapkan dapat mendorong penilaian yang lebih tajam, proporsional, dan informatif pada siklus pengukuran berikutnya.

3. Operasionalisasi Visi dan Misi ke dalam Program yang Terukur

Keselaran visi dan misi dengan pembangunan nasional perlu diperkuat melalui perumusan program strategis yang lebih operasional, penetapan indikator outcome yang jelas, serta penyampaian narasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik.

4. Penajaman Definisi Partisipasi dan Akseptabilitas

Diperlukan penegasan definisi operasional partisipasi dan akseptabilitas agar responden dapat membedakan secara jelas antara dukungan normatif, keterlibatan pasif, dan partisipasi aktif yang berkelanjutan. Langkah ini penting untuk meningkatkan akurasi pengukuran dimensi D2 dan D3.

5. Pemanfaatan SAS sebagai Instrumen Diagnosis Perbaikan

Indikator yang belum menunjukkan stabilitas statistik perlu diposisikan sebagai sinyal perbaikan instrumen dan komunikasi indikator, bukan sebagai penilaian negatif terhadap kinerja organisasi. Pendekatan ini menempatkan DyMM sebagai alat refleksi dan pembelajaran metodologis.

6. Penguatan IKO sebagai Sistem Pembelajaran Organisasi

Secara keseluruhan, hasil kajian IKO ASBADATA perlu dimaknai sebagai bagian dari sistem pembelajaran organisasi yang berkelanjutan. IKO tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kinerja, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mendorong refleksi internal, inovasi program, dan peningkatan kapasitas kelembagaan dalam jangka panjang.

BAB IV. DIAGNOSIS PERMASALAHAN DAN ANALISIS MENDALAM

Hasil pengukuran **Indeks Kinerja Ormas (IKO)** menunjukkan bahwa secara umum persepsi masyarakat terhadap **Ormas Asosiasi Bawi Dayak Budaya dan Wisata (ASBADATA)** berada pada kategori **baik**. Capaian ini tercermin dari skor yang relatif stabil pada **Direct Measurement Model (DMM)** serta telah melalui proses pengujian kualitas dan dinamika data melalui **Dynamic Measurement Model (DyMM)**. Temuan ini mengindikasikan bahwa ASBADATA memiliki tingkat legitimasi sosial yang memadai, diterima secara positif oleh masyarakat, dan dipersepsikan menjalankan peran yang relevan dalam konteks sosial dan kemasyarakatan.

Namun demikian, analisis yang lebih mendalam terhadap pola sebaran skor dan karakteristik respons responden menunjukkan bahwa penilaian positif tersebut masih didominasi oleh pendekatan **normatif dan citra umum organisasi**. Konsentrasi skor pada kategori atas, variasi penilaian yang relatif terbatas, serta tingkat homogenitas persepsi yang cukup tinggi mengindikasikan adanya kecenderungan **bias optimisme** dan keterbatasan pemahaman responden terhadap indikator pengukuran. Dengan demikian, persepsi positif yang terbentuk pada tahap ini belum sepenuhnya merefleksikan pengalaman empiris masyarakat terhadap dampak nyata program dan aktivitas ASBADATA di lapangan, melainkan masih banyak bertumpu pada pengenalan umum terhadap eksistensi organisasi dan nilai-nilai yang diusung.

Pembacaan melalui **DyMM** memperkuat temuan tersebut dengan mengidentifikasi sejumlah isu struktural. Pertama, terdapat indikasi **ketidakseimbangan antara partisipasi dan akseptabilitas**, di mana tingkat keterlibatan masyarakat dalam aktivitas organisasi belum selalu sejalan dengan penerimaan dan manfaat konkret yang dirasakan. Kedua, **stabilitas persepsi belum terbentuk secara merata** pada seluruh indikator, sebagaimana tercermin dari variasi nilai standar deviasi pada beberapa variabel. Meskipun secara struktural ASBADATA dinilai memiliki kerangka kelembagaan dan tata kelola yang relatif lengkap—yang tercermin dari capaian signifikansi pada sebagian indikator—dinamika persepsi publik menunjukkan adanya jarak antara partisipasi yang bersifat formal dengan pengalaman substantif masyarakat.

Pendalaman melalui **DUSK (Data Usul, Saran, dan Kritik)** memberikan konteks kualitatif yang memperjelas dan menajamkan temuan kuantitatif tersebut. Masyarakat menyoroti sejumlah isu utama, antara lain **inkonsistensi pelaksanaan program**, keterbatasan dampak kegiatan di tingkat komunitas, serta lemahnya komunikasi publik terkait tujuan, proses, dan hasil aktivitas organisasi. Kritik dan saran yang muncul menunjukkan bahwa tantangan utama ASBADATA tidak terletak pada aspek kelembagaan formal, melainkan pada kualitas implementasi, kesinambungan program, dan kehadiran organisasi yang benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Secara keseluruhan, diagnosis awal hasil kajian IKO menunjukkan adanya **kesenjangan antara kekuatan sistem dan kualitas implementasi**. Tingginya skor pada aspek tata kelola, persepsi normatif, dan struktur organisasi belum sepenuhnya diimbangi oleh kualitas pelaksanaan program yang berdampak langsung. Kondisi ini mencerminkan perlunya penyelarasan yang

lebih kuat antara perencanaan strategis dan praktik operasional di lapangan. Dengan menjembatani kesenjangan tersebut, ASBADATA memiliki peluang besar untuk mentransformasikan legitimasi normatif yang telah dimiliki menjadi **kontribusi sosial yang lebih nyata, terukur, dan berkelanjutan**, sekaligus memperkuat kepercayaan publik dalam jangka panjang.

4.1 Analisis Kesenjangan (Gap Analysis)

Hasil pengukuran **Indeks Kinerja Ormas (IKO)** melalui pendekatan **Direct Measurement Model (DMM)** menunjukkan bahwa kinerja **Ormas Asosiasi Bawi Dayak Budaya dan Wisata (ASBADATA)** berada pada kategori **baik**, dengan nilai rata-rata variabel dan dimensi yang relatif stabil di atas ambang batas penilaian. Capaian ini mengindikasikan bahwa persepsi publik terhadap eksistensi, peran sosial, dan posisi ASBADATA di ruang kemasyarakatan secara umum bersifat positif dan dapat diterima. Namun demikian, skor DMM yang relatif tinggi tersebut perlu dibaca secara hati-hati sebagai **baseline persepsi awal**, yang lebih merefleksikan legitimasi normatif dan citra organisasi, dibandingkan pengalaman empiris masyarakat terhadap dampak program yang bersifat langsung dan terukur.

Pendalaman melalui **Dynamic Measurement Model (DyMM)** memperlihatkan bahwa meskipun skor agregat masih berada pada kategori baik hingga sangat baik, terdapat sejumlah celah struktural dan operasional yang penting untuk dicermati. Pertama, hasil pengujian **Standar Deviasi (SD)** menunjukkan bahwa stabilitas persepsi responden belum terbentuk secara merata pada seluruh variabel. Variasi sebaran penilaian ini mengindikasikan adanya perbedaan pengalaman masyarakat terhadap pelaksanaan program, serta ketimpangan tingkat pemahaman responden terhadap indikator kinerja yang digunakan.

Kedua, analisis **Keseimbangan dan Kesenjangan (K&K)** menunjukkan bahwa pola ideal **Persepsi > Partisipasi > Akseptabilitas** belum terwujud secara konsisten. Pada sejumlah indikator, selisih antara tingkat partisipasi dan akseptabilitas masih relatif besar, yang mengindikasikan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan organisasi belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat penerimaan dan manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima dampak.

Temuan kuantitatif tersebut diperkuat oleh hasil pendalaman melalui **DUSK (Data Usul, Saran, dan Kritik)**. Masukan kualitatif masyarakat menunjukkan adanya kontras antara skor numerik yang relatif tinggi dengan kritik substantif terkait konsistensi pelaksanaan program, kesinambungan kegiatan, transparansi proses, serta keterbatasan dampak nyata di tingkat komunitas. Hal ini menegaskan bahwa tantangan utama ASBADATA tidak terletak pada aspek legitimasi atau struktur kelembagaan, melainkan pada kualitas implementasi dan pendewasaan praktik operasional organisasi.

Secara keseluruhan, hasil **gap analysis** mengarah pada kebutuhan untuk memperkuat dimensi operasional kinerja organisasi. Fokus perbaikan ke depan perlu diarahkan pada peningkatan

konsistensi dan kualitas pelaksanaan program, penguatan mekanisme evaluasi dan umpan balik, serta penajaman orientasi dampak, agar partisipasi masyarakat tidak berhenti pada keterlibatan formal, tetapi benar-benar terkonversi menjadi manfaat yang dirasakan dan diterima secara luas. Dengan pendekatan tersebut, kinerja ASBADATA diharapkan tidak hanya dinilai baik secara normatif, tetapi juga terbukti efektif dan berdampak secara empiris dalam kehidupan masyarakat.

4.2 Analisis Faktor Internal Organisasi

Dari perspektif internal, **Ormas Asosiasi Bawi Dayak Budaya dan Wisata (ASBADATA)** telah memiliki kerangka organisasi, perangkat kelembagaan, serta dokumen tata kelola formal yang relatif lengkap. Hal ini tercermin dari capaian sejumlah indikator signifikansi dalam pengukuran **Dynamic Measurement Model (DyMM)**, yang menunjukkan bahwa secara struktural organisasi telah memenuhi prasyarat dasar pengelolaan kelembagaan. Namun demikian, kekuatan struktural tersebut belum sepenuhnya teraktualisasi menjadi kinerja operasional yang konsisten dan memberikan dampak nyata dalam pelaksanaan program di lapangan.

Pendalaman melalui **DUSK** mengungkap adanya ketimpangan kapasitas sumber daya manusia, variasi kualitas pelaksanaan tugas, serta konsistensi kinerja yang belum merata antaranggota maupun antarunit organisasi. Perbedaan ini tercermin dalam variasi persepsi responden terhadap kinerja internal ASBADATA, yang mengindikasikan bahwa efektivitas internal organisasi masih sangat bergantung pada individu atau unit tertentu. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan sistem **pengembangan kapasitas SDM**, termasuk pelatihan, kaderisasi, dan pembelajaran organisasi yang lebih terstruktur, berkelanjutan, serta selaras dengan kebutuhan strategis organisasi.

Selain aspek kapasitas SDM, **komunikasi dan koordinasi internal** juga belum berjalan secara optimal. Alur informasi program belum sepenuhnya tersampaikan secara merata ke seluruh struktur organisasi, respons terhadap aspirasi dan masukan masyarakat masih cenderung lambat, serta koordinasi lintas unit kerja belum sepenuhnya solid. Dampaknya, pelaksanaan program kerap menunjukkan inkonsistensi, baik dari sisi kontinuitas kegiatan maupun kualitas implementasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan **manajemen program**, sistem monitoring dan evaluasi internal, serta penegasan pembagian peran dan tanggung jawab agar kinerja organisasi dapat berjalan lebih terkoordinasi, konsisten, dan berkelanjutan.

4.3 Analisis Faktor Eksternal dan Lingkungan Strategis

Lingkungan eksternal tempat **ASBADATA** beroperasi ditandai oleh dinamika sosial yang semakin beragam, mobilitas masyarakat yang kian tinggi, serta meningkatnya tuntutan publik terhadap profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas organisasi kemasyarakatan. Dalam konteks tersebut, ASBADATA berada dalam ruang sosial yang semakin terbuka dan kompetitif,

di mana setiap aktivitas organisasi dengan mudah diamati, dinilai, dan dikritisi oleh masyarakat secara langsung.

Kebijakan pemerintah daerah dan pola pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan turut membentuk ruang gerak serta efektivitas kinerja ASBADATA. Sinergi lintas sektor yang kuat dengan pemerintah, komunitas lokal, dan pemangku kepentingan lainnya berpotensi memperkuat legitimasi organisasi serta memperluas jangkauan dan dampak program. Sebaliknya, lemahnya koordinasi dan kolaborasi dapat menyebabkan aktivitas organisasi berjalan secara terfragmentasi dan kurang selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi dan media digital menghadirkan tuntutan baru terhadap keterbukaan informasi dan pola komunikasi publik yang lebih adaptif. Masyarakat semakin mengharapkan akses informasi yang cepat, transparan, dan mudah dijangkau. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang strategis bagi ASBADATA untuk memanfaatkan kanal digital sebagai sarana memperluas jangkauan komunikasi, memperkuat citra organisasi, serta membangun kepercayaan publik secara lebih berkelanjutan.

4.4 Analisis Berdasarkan Wellbeing Methodology (WM)

Pendekatan **Wellbeing Methodology (WM)** digunakan untuk menilai sejauh mana kontribusi **ASBADATA** terhadap kesejahteraan masyarakat, baik pada aspek **objective wellbeing**—seperti dukungan struktural, akses terhadap program, dan layanan sosial—maupun **experienced wellbeing**, yang mencakup pengalaman langsung warga, rasa keterlibatan, serta manfaat yang benar-benar dirasakan. Hasil analisis **DMM** dan **DyMM** menunjukkan bahwa ekspektasi publik terhadap peran ASBADATA relatif tinggi. Namun, pendalaman melalui **DUSK** mengindikasikan bahwa pengalaman kesejahteraan sosial masyarakat belum terbentuk secara stabil dan merata di seluruh kelompok dan wilayah.

Masukan dan kritik masyarakat terkait konsistensi pelaksanaan kegiatan, keterbukaan informasi, serta keterbatasan dampak nyata program menunjukkan bahwa dimensi kepercayaan sosial, rasa dilibatkan, dan rasa aman sosial masih memerlukan penguatan lebih lanjut. Temuan ini menegaskan adanya jarak antara harapan normatif terhadap peran organisasi dan pengalaman faktual masyarakat dalam berinteraksi dengan program dan aktivitas ASBADATA.

Meskipun demikian, tingginya intensitas masukan konstruktif serta harapan yang disampaikan melalui DUSK menunjukkan bahwa **motivational wellbeing** masyarakat terhadap ASBADATA masih relatif kuat. Kondisi ini mencerminkan keberadaan modal sosial yang penting, berupa kepercayaan awal dan ekspektasi positif publik, yang dapat dijadikan fondasi strategis bagi organisasi untuk memperbaiki kualitas implementasi, memperkuat kehadiran sosial, serta meningkatkan kontribusi nyata ASBADATA terhadap kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

4.5 Sintesis dan Isu-Isu Strategis yang Teridentifikasi

Sintesis keseluruhan hasil kajian menunjukkan bahwa **ASBADATA** telah memiliki fondasi kelembagaan dan tingkat legitimasi sosial yang relatif kuat. Namun demikian, organisasi masih menghadapi tantangan yang cukup signifikan pada aspek **implementasi program** dan **penciptaan dampak nyata** di tingkat masyarakat. Hasil triangulasi **DMM–DyMM–DUSK**, yang diperkaya dengan analisis **Wellbeing Methodology**, mengungkap adanya jarak antara kesiapan sistem dan tata kelola organisasi dengan pengalaman faktual masyarakat di lapangan.

Beberapa isu strategis utama yang teridentifikasi antara lain:

1. Adanya kesenjangan antara persepsi positif secara umum dengan pengalaman publik yang belum sepenuhnya konsisten;
2. Inkonsistensi pelaksanaan program yang berimplikasi pada fluktuasi tingkat akseptabilitas masyarakat;
3. Keterbatasan dampak kegiatan yang bersifat nyata, terukur, dan berkelanjutan;
4. Lemahnya transparansi, dokumentasi, serta pelaporan aktivitas organisasi;
5. Belum optimalnya strategi komunikasi publik dan pemanfaatan media serta kanal digital;
6. Perlunya penyesuaian desain dan pendekatan program agar lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Isu-isu tersebut menegaskan bahwa agenda penguatan kinerja ASBADATA ke depan perlu difokuskan pada **peningkatan kualitas implementasi, konsistensi pelaksanaan program, serta penguatan orientasi dampak di tingkat komunitas**. Temuan ini menjadi landasan penting bagi penyusunan rekomendasi strategis dan rencana perbaikan yang akan dibahas pada bagian selanjutnya, guna memastikan bahwa legitimasi dan kapasitas kelembagaan yang telah dimiliki dapat ditransformasikan menjadi kontribusi sosial yang lebih nyata dan berkelanjutan.

BAB V. SARAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN

Upaya peningkatan kinerja organisasi kemasyarakatan melalui **Indeks Kinerja Ormas (IKO)** berbasis *self-assessment* menuntut adanya **komitmen kolektif** dan **kolaborasi berkelanjutan** dari seluruh pemangku kepentingan. Bagi **Ormas Asosiasi Bawi Dayak Budaya dan Wisata (ASBADATA)**, hasil pengukuran IKO tidak seharusnya dipahami semata sebagai laporan evaluatif, melainkan sebagai **instrumen refleksi strategis** untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas implementasi program, serta memperbaiki relasi sosial dan tingkat kepercayaan masyarakat. Dengan pendekatan ini, IKO berfungsi sebagai **alat pembelajaran organisasi (organizational learning)** yang mendorong perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

Di sisi lain, **Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat** memiliki peran strategis dalam menjadikan temuan IKO sebagai dasar pembinaan ormas yang lebih **terarah, kontekstual, dan berbasis data**. Pendekatan pembinaan berbasis IKO memungkinkan intervensi kebijakan yang lebih presisi dan proporsional, sehingga tidak berhenti pada pengawasan administratif, tetapi benar-benar mendorong peningkatan kualitas kinerja organisasi. Dalam kerangka tersebut, **Wellbeing Institute (WI)** berperan sebagai mitra metodologis yang menjaga konsistensi penerapan instrumen, memberikan pendampingan teknis, serta memastikan kualitas analisis dan interpretasi hasil pengukuran tetap objektif dan akuntabel.

Kolaborasi multipihak ini menjadi prasyarat utama agar proses perbaikan kinerja ASBADATA tidak berhenti pada pemenuhan kepatuhan formal, melainkan menghasilkan **perubahan substantif** pada kualitas kontribusi sosial organisasi. Dengan menjadikan IKO sebagai bagian dari *organizational learning cycle*, ASBADATA memiliki peluang untuk berkembang menjadi ormas yang lebih matang secara kelembagaan, adaptif terhadap dinamika sosial, serta berkelanjutan dalam memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Rekomendasi 1: Penguatan Konsistensi Implementasi Program

Hasil analisis kuantitatif IKO dan temuan **DUSK (Data Usul, Saran, dan Kritik)** menunjukkan bahwa pelaksanaan program ASBADATA belum sepenuhnya berjalan secara rutin dan berkesinambungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan konsistensi implementasi melalui penyusunan kalender kerja tahunan dan periodik yang lebih terstruktur, disertai mekanisme monitoring dan evaluasi internal yang sederhana namun dijalankan secara disiplin. Pemerintah Daerah dapat mendukung melalui penyelarasan agenda program ASBADATA dengan prioritas pembangunan daerah, sementara WI berperan dalam membantu perancangan sistem pelaporan dan evaluasi yang terstandar. Konsistensi pelaksanaan program menjadi kunci dalam meningkatkan akseptabilitas publik dan membangun kepercayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Rekomendasi 2: Peningkatan Kapasitas SDM dan Profesionalisme Organisasi

Meskipun persepsi umum masyarakat terhadap ASBADATA relatif positif, temuan DUSK mengindikasikan bahwa kualitas respons, koordinasi, dan layanan organisasi belum merata di seluruh struktur. Kondisi ini menuntut penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan fungsional yang berkelanjutan, mencakup kemampuan komunikasi publik, perencanaan dan pengelolaan program, serta sensitivitas terhadap kebutuhan sosial masyarakat.

Pemerintah Pusat dapat berperan dalam penyediaan standar pembinaan nasional, sementara WI mendampingi proses asesmen kapasitas dan pengembangan kompetensi secara objektif dan terukur.

Rekomendasi 3: Peningkatan Transparansi Informasi dan Dokumentasi Kegiatan

Temuan DUSK menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi yang lebih jelas, terbuka, dan mudah dipahami mengenai aktivitas, capaian, serta kontribusi ASBADATA. Untuk itu, organisasi perlu mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi dan platform digital dalam menyampaikan informasi kegiatan, hasil program, serta tindak lanjut atas isu sosial yang berkembang.

Pemerintah Daerah dapat mendukung dari sisi infrastruktur dan fasilitasi publikasi, sementara WI berperan dalam membantu pengembangan format pelaporan yang ringkas, informatif, dan ramah publik. Transparansi informasi menjadi fondasi penting dalam memperkuat legitimasi sosial dan meningkatkan akseptabilitas masyarakat.

Rekomendasi 4: Penguatan Partisipasi Publik dan Relevansi Program

Hasil DUSK menunjukkan adanya ekspektasi masyarakat agar partisipasi publik tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Oleh karena itu, ASBADATA perlu mengembangkan forum konsultasi publik, mekanisme umpan balik terbuka, serta pelibatan relawan dan tokoh masyarakat secara lebih terstruktur. Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi ruang kolaborasi lintas aktor, sementara WI berperan dalam merancang pendekatan partisipatif berbasis **Wellbeing Methodology (WM)** agar program lebih kontekstual, responsif, dan selaras dengan kebutuhan riil masyarakat.

Rekomendasi 5: Penguatan Pemahaman dan Kualitas Instrumen IKO Self-Assessment

Pola penilaian IKO ASBADATA yang relatif homogen dan cenderung tinggi mengindikasikan perlunya peningkatan literasi responden terhadap indikator dan skala penilaian. ASBADATA bersama Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, dan WI perlu melakukan edukasi instrumen IKO secara berkelanjutan, sehingga proses *self-assessment* dipahami sebagai sarana refleksi kritis, bukan sekadar kewajiban administratif.

Pemahaman instrumen yang baik akan meningkatkan kualitas data, ketajaman diagnosis, serta efektivitas tindak lanjut perbaikan kinerja organisasi.

Rekomendasi 6: Penguatan Kolaborasi Jangka Panjang melalui Evaluasi Berkelanjutan

Evaluasi kinerja melalui IKO perlu diposisikan sebagai proses periodik dan berkelanjutan. Dalam kerangka ini, ASBADATA bertanggung jawab atas perbaikan internal, Pemerintah Daerah menyediakan dukungan kebijakan dan fasilitasi, Pemerintah Pusat memastikan keseragaman standar pembinaan nasional, dan WI menjaga mutu metodologi, kualitas data, serta pendampingan teknis.

Melalui sinergi jangka panjang tersebut, penguatan kinerja ASBADATA diharapkan berjalan secara sistematis, berorientasi pada dampak nyata, serta selaras dengan prinsip **Wellbeing Methodology** dan pembangunan sosial yang berkelanjutan.

5.1 Rekomendasi Strategis untuk Pemerintah

Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa **Ormas Asosiasi Bawi Dayak Budaya dan Wisata (ASBADATA)** mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan sosial, penguatan kohesi masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan publik. Hasil kajian **Indeks Kinerja Ormas (IKO)** menunjukkan bahwa meskipun kapasitas kelembagaan dan persepsi publik terhadap ASBADATA berada pada kategori baik, masih terdapat tantangan pada aspek konsistensi program, kualitas implementasi di lapangan, serta tingkat penerimaan masyarakat. Kondisi ini menuntut pendekatan pembinaan pemerintah yang lebih **strategis, berbasis data, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan**, bukan semata pengawasan administratif.

1. Penguatan Kebijakan Pembinaan Ormas Berbasis Data IKO

Pemerintah perlu menjadikan hasil pengukuran IKO—yang mencakup **Direct Measurement Model (DMM)**, **Dynamic Measurement Model (DyMM)**, dan **DUSK (Data Usul, Saran, dan Kritik)**—sebagai rujukan utama dalam pemetaan, evaluasi, dan pembinaan ormas. Pendekatan berbasis data ini memungkinkan perumusan kebijakan pembinaan yang lebih presisi, proporsional, dan kontekstual, sesuai dengan karakteristik, kapasitas, serta tantangan masing-masing organisasi, termasuk ASBADATA. Dengan demikian, pembinaan tidak bersifat seragam, tetapi adaptif terhadap kebutuhan riil ormas.

2. Peningkatan Kapasitas SDM Ormas secara Sistematis dan Berkelanjutan

Untuk mendorong profesionalisme dan kualitas kinerja ormas, pemerintah perlu mengembangkan program peningkatan kapasitas SDM yang terstruktur, melalui penyusunan modul pelatihan nasional, bimbingan teknis berjenjang, dan fasilitasi peningkatan kompetensi lintas sektor. Materi pembinaan mencakup perencanaan dan pengelolaan program, tata kelola organisasi, komunikasi publik, serta sensitivitas terhadap kebutuhan sosial masyarakat. Pendekatan yang berkelanjutan akan memastikan penguatan kapasitas SDM ASBADATA sejalan dengan dinamika sosial dan tuntutan pembangunan.

3. Penguatan Sinergi Ormas dengan Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan

Pemerintah perlu memfasilitasi forum koordinasi rutin dan mekanisme penyalarsan agenda kerja antara ormas, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi lintas aktor ini penting untuk mengintegrasikan peran ASBADATA dalam ekosistem pembangunan daerah, memperluas jangkauan dan dampak program, serta meningkatkan efektivitas kontribusi organisasi di tingkat lokal. Kolaborasi yang terencana akan memperkuat posisi ormas sebagai mitra strategis pembangunan.

4. Pengembangan Platform Digital Pembinaan dan Pemantauan Ormas

Diperlukan pengembangan platform digital terintegrasi yang mendukung pelaporan kegiatan, publikasi data, pemantauan kinerja, serta pelaksanaan survei IKO secara berkala. Platform ini berfungsi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas data, sekaligus menjadi sarana pembinaan yang lebih modern, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

5. Penerapan Evaluasi Berkala Berbasis IKO sebagai Siklus Pembinaan

Evaluasi kinerja ormas melalui IKO perlu diposisikan sebagai proses periodik dan berkelanjutan. Dengan menjadikan IKO sebagai **siklus pembinaan**, pemerintah dapat mendorong pembelajaran organisasi secara terus-menerus, memastikan perbaikan kinerja berjalan bertahap dan terukur, serta mengawal transformasi ormas—termasuk ASBADATA—menuju tata kelola yang lebih matang, profesional, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

5.2 Rekomendasi Penguatan Kapasitas ASBADATA

Sebagai tindak lanjut atas hasil kajian IKO, penguatan kapasitas internal ASBADATA diarahkan pada langkah-langkah strategis berikut:

- a) Meningkatkan konsistensi pelaksanaan program di lapangan;
- b) Memperkuat kompetensi SDM dan profesionalisme anggota;
- c) Meningkatkan transparansi informasi serta dokumentasi kegiatan;
- d) Memperluas pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program;
- e) Meningkatkan akseptabilitas publik melalui program yang relevan dan terukur;
- f) Memperkuat tata kelola internal organisasi;
- g) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi;
- h) Meningkatkan literasi terhadap instrumen IKO *self-assessment*;
- i) Membangun dan memperluas kemitraan strategis dengan pemerintah daerah; serta
- j) Mengembangkan sistem pengelolaan kinerja berbasis **Wellbeing Methodology (WM)**.

5.3 Pengembangan Sistem dan Platform IKO Nasional

Pengembangan **Sistem dan Platform IKO Nasional** merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa pembinaan ormas, termasuk ASBADATA, dilakukan secara terstandar, objektif, dan berorientasi pada peningkatan kapasitas. Platform ini perlu menyediakan

instrumen pengukuran yang terstandarisasi, sistem penyimpanan data historis, serta **dashboard analitik** untuk pemantauan kinerja secara komparatif dan longitudinal.

Integrasi **Artificial Intelligence (AI)** dalam platform IKO memungkinkan peningkatan kualitas analisis melalui deteksi pola, triangulasi otomatis, serta penyusunan rekomendasi berbasis data skala nasional. Keberhasilan pengembangan platform ini sangat bergantung pada kolaborasi erat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Ormas, dan **Wellbeing Institute**. Dengan sinergi tersebut, IKO diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai mekanisme transformasi nasional dalam membangun ormas yang profesional, akuntabel, adaptif, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

1. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2017). **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan**. Jakarta: Kemendagri.
2. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2022). **Pedoman Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan**. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Jakarta: Kemendagri.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang **Organisasi Kemasyarakatan**. Jakarta: Sekretariat Negara.
4. OECD. (2018). **Measuring Civil Society Contribution to Governance**. Paris: OECD Publishing.
5. Alkire, S., & Santos, M. (2014). **Measuring Wellbeing and Multidimensional Poverty**. Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI). University of Oxford.
6. Creswell, J. W. (2014). **Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches** (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
7. Sen, A. (1999). **Development as Freedom**. New York: Alfred A. Knopf.
8. Patton, M. Q. (2015). **Qualitative Research & Evaluation Methods** (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
9. Sugiyono. (2019). **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**. Bandung: Alfabeta.
10. Wellbeing Institute Indonesia. (2024). **Pedoman Wellbeing Methodology (WM) untuk Evaluasi Kinerja Organisasi dan Kebijakan**. Jakarta: Wellbeing Institute.